

ISSN 2621-5764



RESOLUSI

Jurnal Sosial Politik

Volume 6 Number 2 | July - December 2023

Inovasi Pelayanan Publik dan Transformasi Birokrasi

Hamdun Hamdillah

Cultural Adaptation and Integration of the Vietnamese Community in Australia

Tri Minh Nguyen

Etika Politik Generasi Milenial Menjelang Pemilu 2024

Munadi

Pemindahan Ibu Kota Negara: Pembangunan Kota Inklusif dan Berkelanjutan

Sandy Ratna Puspitaningrum, Chotib Chotib, & Husnul Fitri Sundoko

Transformasi Komunikasi Politik: Analisis Partai Politik Baru dalam Era Digital

Supartinah

From State-Centric to Security Complexes: A Review of Regional Security Complex Theory in International Relations

Shafiullah Farzayee

**DEPARTMENT OF POLITICAL SCIENCE
UNIVERSITAS SAINS AL-QUR'AN**

Inovasi Pelayanan Publik dan Transformasi Birokrasi: Pendekatan Administrasi Publik dalam Meningkatkan *Good Governance*

Hamdun Hamdillah

Sekolah Tinggi Ilmu Sosial dan Ilmu Politik (STISIP) Widyapuri Mandiri Sukabumi
hamdunhamdillah1@gmail.com

DOI: 10.32699/resolusi.v6i2.5672

Submitted: 2023-10-07, Revised: 2023-12-11, Accepted: 2023-12-15

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan dan menganalisis bagaimana inovasi pelayanan publik berperan dalam mendukung good governance serta transformasi birokrasi. Dengan pendekatan administrasi publik, penelitian ini menggunakan metode studi pustaka dengan pengumpulan informasi terkait penerapan inovasi pelayanan, pembudayaan inovasi di sektor publik, dan dampaknya terhadap kinerja organisasi. Hasil temuan penelitian ini mengungkapkan urgensi penerapan budaya inovatif dalam pelayanan publik sebagai langkah awal dalam mencapai good governance. Inovasi dalam pelayanan publik mendorong transformasi birokrasi, memfasilitasi koordinasi antara pemerintah dan masyarakat, serta mengurangi tumpang tindih kebijakan. Melalui inovasi, sektor publik dapat meningkatkan kinerjanya dan merespons perubahan dalam kebutuhan masyarakat dengan lebih efektif. Dengan demikian, penelitian ini memberikan wawasan penting tentang pentingnya inovasi pelayanan publik sebagai instrumen untuk mencapai tujuan good governance dan transformasi birokrasi.

Kata kunci: administrasi publik, good governance, pelayanan publik, transformasi birokrasi

Abstract

This research aims to describe and analyze how public service innovation plays a role in supporting good governance and bureaucratic transformation. Using a public administration approach, this study was conducted through literature review and the collection of information related to the implementation of service innovation, the cultivation of innovation in the public sector, and its impact on organizational performance. The findings reveal the urgency of implementing an innovative culture in public services as a starting point in achieving good governance. Innovation in public services drives bureaucratic transformation, facilitates coordination between the government and the public, and reduces policy overlap. Through innovation, the public sector can enhance its performance and respond more effectively to changes in societal needs. Thus, this research provides important insights into the significance of public service innovation as an instrument for achieving the goals of good governance and bureaucratic transformation.

Keywords: bureaucratic transformation, good governance, public administration, public service

Pendahuluan

Pelayanan publik merupakan tulang punggung dari interaksi antara pemerintah dan masyarakat, dan memiliki peran yang sangat penting dalam menciptakan kesejahteraan dan keadilan dalam suatu negara. Namun, pada kenyataannya, masih terdapat banyak tantangan dalam penyelenggaraan pelayanan publik yang optimal. Salah satu permasalahan yang umum ditemui adalah tumpang tindih kebijakan dan kurangnya koordinasi antara instansi pemerintah, yang sering kali mengakibatkan pemborosan sumber daya dan kebingungan di kalangan masyarakat. Selain itu, kurangnya kompetensi pejabat publik dan resistensi terhadap inovasi sering menghambat perubahan yang diperlukan dalam pelayanan publik (Barsei, 2022).

Dalam era dinamika sosial, ekonomi, dan teknologi yang terus berkembang, menurut Rakhmadani (2022) inovasi dianggap sebagai salah satu kunci sukses untuk meningkatkan kualitas pelayanan publik dan memacu transformasi birokrasi. Namun, belum banyak penelitian yang secara komprehensif menggali bagaimana inovasi pelayanan publik berperan dalam mencapai good governance dan perubahan fundamental dalam administrasi publik. Oleh karena itu, penelitian ini mengisi celah pengetahuan ini dengan menerapkan pendekatan kualitatif untuk menggambarkan secara mendalam bagaimana inovasi pelayanan publik dapat memengaruhi budaya organisasi, meningkatkan kinerja sektor publik, dan mendukung perubahan birokrasi. Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan pandangan yang berharga bagi praktisi pemerintah, peneliti, dan pembuat kebijakan dalam upaya meningkatkan efisiensi, efektivitas, dan akuntabilitas pelayanan publik.

Temuan dari penelitian yang dilakukan oleh Safiri (2022) menyoroti bahwa implementasi inovasi pelayanan publik dapat merangsang perubahan budaya organisasi dengan mengubah pola pikir pegawai publik dan mendorong sikap proaktif terhadap perubahan. Di sisi lain, Manaf & Puspaningtyas (2023) meneliti dampak positif inovasi pelayanan publik terhadap peningkatan kinerja sektor publik melalui peningkatan efisiensi dan efektivitas dalam penyelenggaraan layanan kepada masyarakat. Meskipun penelitian-penelitian ini memberikan wawasan yang berharga, keterbatasan utamanya adalah fokus yang terbatas pada beberapa aspek inovasi dan kecenderungan kurangnya analisis mendalam tentang dampak inovasi pelayanan publik terhadap perubahan birokrasi secara keseluruhan.

Dalam konteks literatur yang ada, penelitian ini bertujuan untuk mengisi kekosongan pengetahuan dengan memperluas wawasan mengenai peran inovasi pelayanan publik dalam administrasi publik. Dalam upaya ini, penelitian ini akan lebih mendalam menganalisis bagaimana inovasi pelayanan publik memengaruhi budaya organisasi dan kinerja sektor publik, serta bagaimana konsep ini dapat mendukung transformasi birokrasi dan pencapaian good governance. Oleh karena itu, penelitian ini mengoperasionalkan asumsi tersebut sebagai landasan untuk menyelidiki kontribusi inovasi pelayanan publik dalam mencapai good governance dan perubahan substansial dalam administrasi publik.

Penelitian ini bertujuan untuk menggali dampak inovasi pelayanan publik dalam perspektif administrasi publik terhadap perubahan budaya organisasi dan peningkatan

kinerja sektor publik, serta bagaimana kontribusi inovasi ini mendukung transformasi birokrasi menuju good governance. Pertanyaan utama yang muncul adalah bagaimana implementasi inovasi pelayanan publik memengaruhi budaya organisasi di sektor publik dan apakah dampaknya dapat meningkatkan kinerja pelayanan publik dalam mencapai good governance dan perubahan substansial dalam administrasi publik.

Dalam konteks inovasi pelayanan publik dan transformasi birokrasi, pendekatan administrasi publik memegang peranan penting dalam meningkatkan tata kelola yang baik. Melalui pendekatan studi pustaka, diharapkan tercipta pelayanan publik yang lebih efektif, efisien, dan responsif terhadap kebutuhan masyarakat. Selain itu, transformasi birokrasi juga diharapkan mampu menciptakan lingkungan kerja yang lebih profesional, transparan, dan akuntabel.

Oleh karena itu, penelitian ini bertujuan untuk memberikan wawasan yang lebih komprehensif dalam memahami peran inovasi pelayanan publik dan kontribusinya terhadap kemajuan administrasi publik. Penelitian ini akan lebih berfokus pada peran inovasi pelayanan publik dalam administrasi publik kontemporer dan kontribusinya dalam mencapai good governance. Dengan demikian, diharapkan hasil penelitian ini dapat memberikan kontribusi yang signifikan dalam upaya meningkatkan kualitas pelayanan publik dan tata kelola pemerintahan secara keseluruhan.

Metode Penelitian

Penelitian ini menggunakan desain studi kepustakaan. Secara teoritis, studi pustaka adalah serangkaian kegiatan yang berkenaan dengan metode pengumpulan data pustaka, membaca, mencatat, serta mengolah bahan penelitian (Zed. 2008). Studi pustaka ini menggunakan pendekatan deskriptif-analitis untuk mengevaluasi konsep inovasi pelayanan publik dan transformasi birokrasi dalam konteks administrasi publik untuk meningkatkan good governance. Data utama diperoleh melalui tinjauan literatur yang mencakup jurnal ilmiah, buku, laporan resmi pemerintah, serta publikasi terkait inovasi pelayanan publik, transformasi birokrasi, dan good governance.

Sampel penelitian mencakup literatur-literatur yang membahas praktik inovasi pelayanan publik dan transformasi birokrasi di berbagai tingkat pemerintahan, baik nasional maupun lokal, dengan fokus pada dampaknya terhadap peningkatan good governance. Analisis dilakukan dengan merinci konsep-konsep kunci terkait inovasi pelayanan publik, transformasi birokrasi, dan good governance. Penggunaan kerangka konseptual menjadi instrumen untuk membimbing penelitian. Prosedur melibatkan pencarian intensif dalam database akademis seperti ProQuest dan Google Scholar, serta penelusuran dalam perpustakaan digital pemerintah dan lembaga terkait. Data dianalisis secara kualitatif dengan mengidentifikasi tren, pola, dan hubungan antara konsep inovasi pelayanan publik, transformasi birokrasi, dan good governance.

Tahap awal penelitian ini melibatkan identifikasi sumber-sumber utama yang relevan dengan inovasi pelayanan publik, administrasi publik, budaya organisasi, kinerja sektor

publik, good governance, dan transformasi birokrasi. Sumber-sumber yang diidentifikasi akan dianalisis secara kritis untuk mengidentifikasi temuan-temuan utama, teori-teori yang relevan, model konseptual, dan bukti empiris yang mendukung atau menggambarkan peran inovasi pelayanan publik dalam administrasi publik.

Hasil analisis akan disintesis menjadi rangkuman yang menyajikan pemahaman komprehensif tentang topik penelitian (Mustofa et al., 2023), mencakup peran inovasi dalam membentuk budaya organisasi, dampaknya pada kinerja sektor publik, serta kaitannya dengan good governance dan transformasi birokrasi. Kesimpulan akan ditarik berdasarkan sintesis sumber-sumber yang telah dijelajahi dalam studi pustaka. Dengan menggunakan metode studi pustaka, penelitian ini akan menggali pengetahuan yang telah ada dalam literatur akademis dan praktis untuk memberikan wawasan yang mendalam tentang peran inovasi pelayanan publik dalam administrasi publik, serta kontribusinya terhadap good governance dan transformasi birokrasi.

Dampak Inovasi Pelayanan Publik terhadap Budaya Organisasi di Sektor Publik

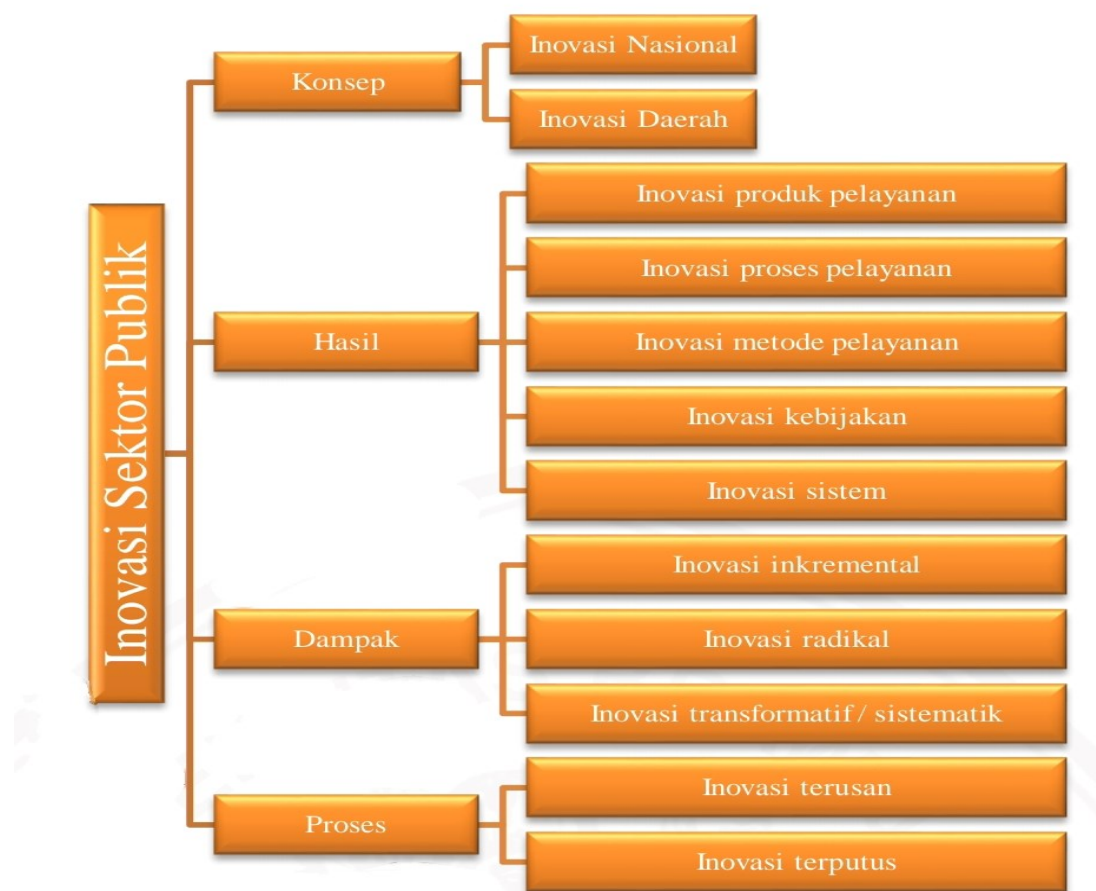
Transformasi birokrasi terkait inovasi pelayanan publik telah menjadi fokus utama dalam upaya meningkatkan kualitas pelayanan publik di Indonesia. Beberapa langkah transformasi yang dilakukan meliputi pemanfaatan teknologi informasi untuk memudahkan akses masyarakat terhadap pelayanan publik, pembinaan inovasi pelayanan publik, dan penilaian inovasi pelayanan publik. Implementasi transformasi digital dalam pelayanan publik bertujuan untuk menjawab kebutuhan masyarakat yang terus berkembang dengan tetap menyediakan pelayanan publik yang mudah, cepat, dan responsif (Firdaus et al., 2021).

Seperti yang kita ketahui bersama, salah satu dampak dari Revolusi Industri 4.0 yaitu otomatisasi dan pengurangan jumlah tenaga kerja manusia dalam proses produksi. Dengan kemajuan teknologi dan dampak tersebut, revitalisasi birokrasi pemerintah melalui transformasi birokrasi menjadi penting. Ini bertujuan untuk memenuhi tuntutan akuntabilitas publik dan transparansi yang semakin tinggi sebagai akibat perkembangan Revolusi Industri 4.0. Perkembangan Revolusi Industri 4.0 juga membawa konsekuensi meningkatnya tuntutan akuntabilitas dan transparansi dari organisasi pemerintah, serta perlunya responsivitas yang tinggi dan cepat (Rahardian, 2019). Fenomena ini mengarah pada perubahan paradigma desain organisasi.

Inovasi pelayanan publik juga menjadi tolok ukur keberhasilan reformasi birokrasi, terutama dalam konteks pelayanan publik. Kementerian PANRB melibatkan pembinaan inovasi pelayanan publik sebagai langkah transformasi, yang mencakup penciptaan inovasi, pengembangan inovasi, dan pelembagaan inovasi untuk menjaga keberlanjutan inovasi dalam instansi. Dengan demikian, transformasi birokrasi terkait inovasi pelayanan publik menekankan pentingnya pemanfaatan teknologi, pembinaan inovasi, dan penilaian inovasi sebagai langkah-langkah kunci dalam meningkatkan kualitas pelayanan publik dan memastikan keberlanjutan reformasi birokrasi (Purnama, 2022).

Hasil survei Ombudsman Republik Indonesia menunjukkan bahwa kualitas layanan publik di Indonesia masih rendah pada tahun 2018 (Ombudsman Republik Indonesia, 2019). Pemerintah sebagai penyelenggara negara berkewajiban memberikan pelayanan publik (Hardiyansyah, 2018). Pemberian layanan publik adalah aspek kunci dalam pengelolaan organisasi publik dan indikator utama dalam mengukur kinerjanya (Hayat, 2017). Organisasi publik di Indonesia termasuk pemerintah pusat, daerah, partai politik, LSM, yayasan, lembaga keagamaan, pendidikan, dan fasilitas kesehatan seperti Puskesmas dan Rumah Sakit. Badan Layanan Umum Daerah (BLUD) merupakan bagian tak terpisahkan dari Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) yang memiliki fleksibilitas untuk meningkatkan layanan masyarakat.

Klasifikasi Inovasi Pelayanan Publik



Sumber: Yaniar, 2018

Inovasi pelayanan publik memiliki dampak yang signifikan terhadap budaya organisasi di sektor publik, seperti yang diungkapkan dalam hasil penelitian ini. Hasil kajian kepustakaan menyoroti bahwa inovasi mendorong perubahan dalam pola pikir dan sikap pegawai publik terhadap perubahan. Studi oleh Pudjiarti (2023) menunjukkan bahwa inovasi pelayanan publik merangsang pegawai untuk mengadopsi sikap proaktif dalam menghadapi perubahan, menganggap inisiatif baru sebagai peluang, dan berkontribusi pada budaya organisasi yang lebih responsif serta inovatif. Temuan ini menegaskan bahwa inovasi tidak

hanya menciptakan perubahan dalam praktik kerja, tetapi juga menciptakan perubahan dalam cara pegawai memandang perubahan itu sendiri.

Dalam konteks ini, temuan ini mendukung penelitian terdahulu, seperti penelitian oleh Utami (2023), yang menekankan pentingnya adaptasi dan inovasi dalam birokrasi publik. Ini juga konsisten dengan pandangan bahwa inovasi pelayanan publik dapat memainkan peran kunci dalam menciptakan budaya organisasi yang lebih responsif terhadap tuntutan masyarakat yang berubah dengan cepat. Oleh karena itu, hasil penelitian ini memberikan pemahaman yang lebih dalam tentang bagaimana inovasi pelayanan publik dapat memengaruhi budaya organisasi di sektor publik, dan bagaimana perubahan budaya ini dapat mendukung administrasi publik yang lebih efisien serta responsif terhadap perubahan.

Temuan ini juga mengungkapkan pentingnya kepemimpinan dalam membentuk budaya organisasi yang mendukung inovasi. Studi oleh Henriyani (2020) dan penelitian lainnya telah menyoroti bahwa kepemimpinan visioner dan berorientasi inovasi memiliki peran kunci dalam memotivasi dan mengarahkan pegawai publik dalam upaya inovasi. Kepemimpinan yang mampu mengartikulasikan visi inovatif, memberikan dukungan, dan memberdayakan pegawai untuk berkontribusi dalam perubahan menjadi faktor penting dalam membentuk budaya organisasi yang mendukung inovasi pelayanan publik.

Selain kontribusi terhadap pemahaman yang lebih dalam tentang dampak inovasi pelayanan publik terhadap budaya organisasi, penelitian ini juga menunjukkan pentingnya peran pemimpin dalam mengelola perubahan budaya ini. Pemimpin yang dapat memainkan peran sebagai agen perubahan dan fasilitator inovasi menjadi kunci dalam menciptakan budaya organisasi yang progresif. Keseluruhan, hasil penelitian ini memiliki implikasi yang signifikan bagi praktisi dan pembuat kebijakan di sektor publik, dengan menekankan perlunya mendukung inovasi dalam layanan publik dan memastikan bahwa budaya organisasi mendukung inisiatif inovatif ini. Dengan demikian, upaya menuju administrasi publik yang lebih efisien, responsif, dan inovatif dapat diwujudkan, menghasilkan pelayanan publik yang lebih baik bagi masyarakat.

Perubahan budaya organisasi bukanlah proses instan, dan sering kali dihadapi dengan resistensi. Pegawai publik yang telah terbiasa dengan praktik-praktik lama mungkin merasa enggan menerima inovasi. Oleh karena itu, organisasi publik perlu mengidentifikasi dan mengatasi hambatan-hambatan ini. Memahami faktor-faktor yang mempengaruhi resistensi adalah langkah awal yang penting. Faktor seperti kurangnya pemahaman tentang manfaat inovasi, ketakutan akan perubahan, atau kurangnya dukungan dari manajemen dapat menjadi penghalang utama yang perlu diatasi.

Manajemen perubahan yang efektif sangat diperlukan. Dalam konteks ini, kepemimpinan berperan sentral dalam membantu organisasi menghadapi perubahan budaya. Dalam peran ini, pemimpin tidak hanya harus mengartikulasikan visi inovasi, tetapi juga harus menciptakan lingkungan yang mendukung eksperimen, pembelajaran, dan pengembangan inovasi. Mereka juga perlu melibatkan pegawai publik dalam proses perubahan, menggali ide-ide inovatif mereka, dan memberikan penghargaan untuk

partisipasi dalam inisiatif inovatif. Dengan cara ini, kepemimpinan dapat menjadi kunci keberhasilan dalam membentuk budaya organisasi yang mendukung inovasi pelayanan publik (Khabibi, 2023).

Keseluruhan hasil penelitian ini memberikan pemahaman yang lebih dalam tentang kompleksitas peran inovasi pelayanan publik dalam mengubah budaya organisasi di sektor publik. Dengan mendukung perubahan budaya yang positif, inovasi pelayanan publik memiliki potensi untuk meningkatkan efisiensi, responsivitas, dan akuntabilitas dalam penyelenggaraan layanan publik. Oleh karena itu, penelitian ini memiliki implikasi penting dalam upaya menciptakan administrasi publik yang lebih efisien, responsif, dan inovatif, yang pada akhirnya akan memberikan manfaat yang lebih besar bagi masyarakat.

Kontribusi Inovasi Pelayanan Publik terhadap Peningkatan Kinerja Sektor Publik dan Good Governance

Strategi peningkatan kinerja sektor publik dapat dilakukan melalui perspektif knowledge management, seperti peningkatan kualitas kepemimpinan, tim kerja, dan sistem organisasi. Good governance juga menjadi faktor penting dalam peningkatan kinerja sektor publik, dengan prinsip-prinsip seperti transparansi, akuntabilitas, partisipasi, dan rule of law. Beberapa contoh inovasi pelayanan publik terpuji tahun 2022 dapat dilihat pada Top 45 Inovasi dari kelompok umum dan 5 pemenang *Outstanding Achievement of Public*.

Untuk mempertahankan dan meningkatkan kinerja di sektor publik, dapat dilakukan dengan melakukan transparansi, penetapan metrik kinerja, dan memberikan pelayanan yang terbaik. Pembaruan struktur organisasi juga dapat menjadi salah satu cara untuk meningkatkan kinerja organisasi publik (Purnama, 2021). Inovasi pelayanan publik di Indonesia mencakup berbagai aspek, mulai dari menggunakan teknologi digital, hingga mengembangkan sistem pengendalian karhutla dan pelayanan publik responsif.

Pelayanan publik diatur dalam Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945, pasal 4, yang menekankan perlindungan terhadap seluruh rakyat Indonesia, kemajuan kesejahteraan umum, peningkatan intelektual bangsa, dan partisipasi dalam menjaga ketertiban dunia berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial. Hal penting dalam implementasi pelayanan publik adalah memajukan kesejahteraan umum dan keadilan sosial bagi seluruh masyarakat Indonesia. Penilaian kualitas pelayanan publik bukan perkara sederhana karena pelayanan ini berperan dalam kehidupan manusia, dari berbagai aspek dan skala, mulai dari sejak dikandung sampai hidup dalam masyarakat.

Pentingnya menerapkan prinsip-prinsip tata kelola pemerintahan yang efektif sangat terlihat dalam upaya meningkatkan performa pemerintah dalam memberikan pelayanan publik. Misutari dan Ariyanto (2021) menyatakan bahwa ini disebabkan oleh inisiatif pemerintah dalam merancang konsep tata kelola pemerintahan yang baik, dengan tujuan untuk mengoptimalkan potensi perubahan dalam birokrasi guna menyajikan pelayanan publik yang lebih baik. Selain itu, pandangan masyarakat yang masih melihat pelayanan publik dari birokrasi sebagai sesuatu yang lambat.

Inovasi dapat meningkatkan kinerja di sektor publik melalui berbagai cara, seperti peningkatan efisiensi, pelayanan yang lebih baik, dan pengembangan kebijakan yang inovatif. Penelitian Anggriany (2023) menunjukkan bahwa inovasi, bersama dengan kepemimpinan transformasional dan sistem pengendalian intern, berpengaruh positif terhadap kinerja organisasi sektor publik. Selain itu, inovasi juga dapat membantu lembaga publik untuk menembus kemacetan dan jalan buntu yang terkait dengan organisasi sektor publik, serta memungkinkan adaptasi dan respons terhadap perubahan yang cepat di luar organisasi publik (Suriadi & Frinaldi, 2023). Sebagai contoh, inovasi seperti penerapan piket malam telah terbukti dapat meningkatkan kinerja pelayanan publik. Dengan demikian, inovasi memainkan peran penting dalam meningkatkan kinerja di sektor publik, dengan membantu organisasi publik untuk tetap kompetitif dan responsif terhadap tuntutan masyarakat dan lingkungannya.

Penelitian ini mengungkapkan bahwa inovasi pelayanan publik memiliki kontribusi yang signifikan terhadap peningkatan kinerja sektor publik dan mendorong prinsip-prinsip good governance. Hasil analisis literatur menunjukkan bahwa inovasi pelayanan publik dapat membawa perubahan positif dalam berbagai aspek kinerja sektor publik. Penelitian seperti yang dilakukan oleh Tasyah et al. (2021) menekankan bahwa inovasi dapat meningkatkan efisiensi dalam penyelenggaraan layanan publik. Inovasi ini mencakup penggunaan teknologi baru, proses yang lebih efisien, dan pemangkasan birokrasi yang tidak perlu. Dengan peningkatan efisiensi ini, sektor publik dapat menyediakan layanan yang lebih baik dengan sumber daya yang ada.

Selain efisiensi, inovasi pelayanan publik juga memiliki dampak positif pada responsivitas dan akuntabilitas sektor publik, yang merupakan dua pilar utama dalam prinsip-prinsip good governance. Inovasi dapat meningkatkan responsivitas sektor publik terhadap kebutuhan dan tuntutan masyarakat, terutama melalui partisipasi masyarakat dalam proses perumusan kebijakan dan pengambilan keputusan. Studi oleh Firman (2023) mengindikasikan bahwa inovasi yang berfokus pada partisipasi masyarakat dapat memperkuat keterlibatan warga dalam pengambilan keputusan publik. Sehingga, inovasi pelayanan publik dapat membantu menciptakan lingkungan yang lebih terbuka, transparan, dan akuntabel dalam sektor publik. Dengan demikian, inovasi bukan hanya memberikan manfaat operasional, tetapi juga mendukung pencapaian prinsip-prinsip good governance, yang merupakan landasan yang kuat dalam administrasi publik yang berkualitas.

Perubahan dalam sektor publik tidak selalu berjalan mulus (Purnama, 2020). Implementasi inovasi pelayanan publik seringkali dihadapi dengan hambatan, termasuk resistensi dari dalam organisasi dan perubahan budaya yang diperlukan. Oleh karena itu, manajemen perubahan yang cermat diperlukan untuk memastikan bahwa inovasi benar-benar memberikan dampak positif yang diharapkan. Pemimpin dalam sektor publik memiliki peran yang sangat penting dalam memotivasi, mendukung, dan memandu perubahan ini menuju pencapaian prinsip-prinsip good governance. Keseluruhan, hasil penelitian ini menunjukkan bahwa inovasi pelayanan publik memiliki potensi besar dalam mendukung peningkatan kinerja sektor publik dan mendorong good governance, yang pada gilirannya akan membawa manfaat yang lebih besar bagi masyarakat dan pemerintah.

Inovasi pelayanan pada sektor publik merupakan peran penting administrasi publik dalam masyarakat kontemporer yang semakin meluas dan kompleks. Di era modern ini, negara menghadapi tuntutan yang khusus terkait dengan pelayanan publik yang berkualitas tinggi (Muharam, 2019). Masyarakat mengharapkan pemerintah untuk meningkatkan kemampuannya dalam merancang dan menjalankan kebijakan yang sesuai dengan kebutuhan mereka, tetapi tetap mematuhi peraturan perundangan yang berlaku (Purnama, 2023).

Kebijakan pemerintah hendaknya bertujuan untuk memberdayakan masyarakat dan meningkatkan kesejahteraannya. Substansi kebijakan pemerintah dapat berbeda-beda tergantung pada isu atau persoalan yang dihadapi di suatu wilayah tertentu, seperti kemiskinan, keamanan, dan pembangunan. Pemerintah dapat menggunakan berbagai metode penelitian untuk mempelajari dan menganalisis kebijakan, termasuk komunikasi dan konsultasi publik, membangun jaringan dengan pemangku kepentingan terkait, serta mengumpulkan data dan informasi (Belau, 2020). Masyarakat dalam hal ini dapat membantu pemerintah selain dalam hal merancang kebijakan, menjalankan kebijakan dengan mendukung dan melaksanakan kebijakan yang telah ditetapkan, serta melaporkan pelanggaran atau masalah yang terjadi dalam pelaksanaan kebijakan tersebut.

Menurut Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik, ditegaskan bahwa Pelayanan Publik merupakan serangkaian tindakan yang dilakukan sebagai bagian dari upaya untuk memenuhi kebutuhan warga negara dan penduduk atas barang, jasa, dan/atau pelayanan administrasi yang diberikan oleh masyarakat sesuai dengan hukum yang berlaku. Penyedia layanan dengan jelas menggambarkan peran negara dalam sektor publik. Artinya, pemerintah memiliki tanggung jawab untuk memberikan pelayanan publik yang baik kepada warga negara dan penduduk, dan hal ini harus sesuai dengan aturan yang berlaku. Dengan demikian, Undang-Undang ini menegaskan pentingnya pelayanan publik yang berkualitas tinggi dan sesuai dengan ketentuan hukum.

Dalam upaya meningkatkan inovasi pelayanan publik, beberapa langkah harus diambil. Salah satunya adalah melalui Kompetisi Inovasi Pelayanan Publik (KIPP) yang digelar untuk mendorong tumbuhnya inovasi. Dalam kompetisi ini, evaluasi tidak lagi membutuhkan setiap inovasi diiringi oleh aplikasi, namun yang bisa mengintegrasikannya akan mendapatkan peringkat lebih baik, selain tentu inovasi tersebut harus berdampak optimal bagi masyarakat. Inovasi pelayanan publik juga dapat dikembangkan melalui portal Knowledge Management System (KMS) yang didedikasikan untuk memfasilitasi kolaborasi dan berbagi pengetahuan inovasi pelayanan publik di Indonesia. Langkah-langkah seperti ini merupakan upaya untuk terus mendorong inovasi dalam pelayanan publik guna meningkatkan kualitas pelayanan kepada masyarakat (Purnama, 2021).

Mencapai tata kelola pemerintahan yang efektif dan efisien akan menjadi tantangan jika ketiga sektor yaitu pemerintah, swasta, dan masyarakat tidak dapat bekerjasama secara sinergis dan saling mendukung, terutama jika terjadi saling menyalahkan. Keberhasilan sistem pemerintahan yang efisien bergantung pada fungsionalitas semua komponennya

sesuai dengan hukum yang berlaku dan interaksi yang erat antara mereka, karena komponen-komponen tersebut saling terkait dan tidak dapat dipisahkan satu sama lain.

Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian ini, dapat disimpulkan bahwa inovasi dalam pelayanan publik memegang peranan penting dalam mendukung *good governance* dan transformasi birokrasi. Dengan fokus pada budaya inovatif, penelitian ini telah mengungkap bahwa inovasi dalam pelayanan publik mampu mendorong perubahan positif dalam birokrasi, memfasilitasi kerjasama antara pemerintah dan masyarakat, serta mengurangi tumpang tindih kebijakan. Reformasi birokrasi sejalan dengan reformasi pelayanan publik karena setiap penyelenggaraan negara akan bermuara pada pelayanan publik. Inovasi pelayanan publik berbasis teknologi informasi dapat membuat pelayanan publik menjadi lebih cepat, dapat diakses di manapun, murah, dan mudah untuk membentuk citra baik di masyarakat. Dengan demikian, penelitian ini secara tegas menjawab pentingnya inovasi dalam pelayanan publik sebagai instrumen utama dalam mencapai tujuan *good governance* secara keseluruhan dan transformasi birokrasi yang berhasil. Budaya inovasi harus dipertahankan dalam birokrasi untuk menciptakan tata pemerintahan yang baik.

Daftar Pustaka

- Anggriany, E. (2023). Pengaruh Kepemimpinan Transformasional, Sistem Pengendalian Intern, dan Inovasi Terhadap Kinerja Organisasi Sektor Publik. *Jurnal Ekonomi Trisakti*, 3(1), 1239-1246. <https://doi.org/10.25105/jet.v3i1.16026>
- Barsei, A. N. (2022). Faktor-Faktor Pendorong dan Penghambat Implementasi Inovasi Sektor Publik di Kota Padang Panjang. *Jurnal Ilmu Administrasi Negara (JUAN)*, 10(02), 42-58. <https://doi.org/10.31629/juan.v10i02.5166>
- Belau, Y. H. (2020). Kebijakan Pemerintah dalam Pemberdayaan Masyarakat di Distrik Sugapa Kabupaten Intan Jaya1. *Politico : Jurnal Ilmu Politik*, 2(6), 1068.
- Firdaus, I. T., Tursina, M. D., & Roziqin, A. (2021). Transformasi Birokrasi Digital Di Masa Pandemi Covid-19 Untuk Mewujudkan Digitalisasi Pemeritahan Indonesia. *Kybernan : Jurnal Studi Pemerintahan*, 4(2), 226-239. <https://doi.org/10.35326/kybernan.v4i2.1244>
- Firman, F. (2023). Tata Kelola Smart City dalam Perspektif Collaboratif Governance. *The Indonesian Journal of Public Administration (IJPA)*, 9(1). <https://doi.org/10.52447/ijpa.v9i1.6903>
- Ginanjari, D., & Purnama, W. W. (2023). Optimizing Legal Strategies : Combating Corruption through Anti-Corruption Education in Universities. *Veteran Law Review*, 6(2), 122-132. <https://doi.org/10.35586/velrev.v6i2.6477>

- Khabibi, A. R. (2023). Mendorong Inovasi Keorganisasian di Sektor Publik: Peran Kepemimpinan Transformatif dalam Membentuk Budaya Inovasi. *PRAJA LAMONGAN*, 6(1).
- Manaf, A., Kusbandrijo, B., & Puspaningtyas, A. (2023). Efektivitas Penerapan Digitalisasi Pemerintahan Desa dalam Meningkatkan Pelayanan Publik Studi di Desa Marga Mulya Kabupaten Ogan Komering Ulu. *PRAJA observer: Jurnal Penelitian Administrasi Publik* (e-ISSN: 2797-0469), 3(05), 348-354. Retrieved from <https://aksiologi.org/index.php/praja/article/view/1148>
- Muharam, R. S. (2019). Inovasi Pelayanan Publik Dalam Menghadapi Era Revolusi Industri 4.0 Di Kota Bandung. *Decision: Jurnal Administrasi Publik*, 1(01), 39-47. <https://doi.org/10.23969/decision.v1i01.1401>
- Misutari, N. M. S., & Ariyanto, D. (2021). Good Corporate Governance Memoderasi Pengaruh Corporate Sosial Responsibility dan Penerapan Green Accounting terhadap Kinerja Keuangan. *E-Jurnal Akuntansi*, 31(12), 2975-2987.
- Purnama, W. W. (2021). Efektivitas Peraturan Pertanahan dalam Menangani Pelanggaran Penggunaan Tanah tanpa Izin. *JURNAL PENELITIAN SERAMBI HUKUM*, 14(02), 42-48. <https://doi.org/10.59582/sh.v14i02.921>
- Purnama, W. W. (2022). Implementasi Pendistribusian Royalti : Strategi Inovatif Untuk Pemenuhan Hak Ekonomi Pencipta Lagu Dan Musik. *Jurnal Hukum Media Justitia Nusantara (MJN)*, 12(1), 189-198.
- Purnama, W. W. (2022). Regulasi Mata Uang Kripto di Indonesia : Pandangan Regulator dan Implikasi Hukum bagi Ekonomi Masyarakat. *JURNAL PENELITIAN SERAMBI HUKUM*, 15(02), 96-101. <https://doi.org/10.59582/sh.v15i02.922>
- Purnama, W. W. (2020). Tantangan dan Peluang Dalam Penegakan Hukum Terhadap Insider Trading di Pasar Modal. *Jurnal Hukum Media Justitia Nusantara (MJN)*, 10(2), 134-141.
- Purnama, W. W. (2023). Tantangan Perlindungan Dana Nasabah pada Layanan Equity Crowdfunding di Era Industri 4.0 : Analisis Peraturan OJK. *DOKTRINA : JOURNAL OF LAW*, 6(2), 174-183. <https://doi.org/10.31289/doktrina.v6i2.10344>
- Rahadian, A. H. (2019, May). Revitalisasi Birokrasi Melalui Transformasi Birokrasi Menuju E-Governance Pada Era Revolusi Industri 4.0. *Prosiding Seminar STIAM I* (Vol. 6, No. 1, pp. 85-94). Retrieved from <https://ojs.stiami.ac.id/index.php/PS/article/view/373>
- Rakhmadani, R. (2022). Implementasi Model Komunikasi Dua Arah dalam Program Curhat Ning Ita guna Meningkatkan Kualitas Pelayanan Publik Pemerintah Kota Mojokerto. *The Commercium*, 5(01), 159-168. Retrieved from <https://ejournal.unesa.ac.id/index.php/Commercium/article/view/45328>
- Safiri, R. B. (2022). Pelatihan Penerapan Perilaku Adaptif PNS dalam Menghadapi Era Globalisasi. *COMMUNITY: Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat*, 2(2), 107-114. <https://doi.org/10.51878/community.v2i2.1917>

- Sipayung, B., & Wahyudi, A. (2022). Penerapan Good Governance dalam Rangka Meningkatkan Kualitas Pelayanan Publik yang Berintegritas di Lingkungan Badan Pemeriksa Keuangan. *Jurnal Pendidikan Tambusai*, 6(2), 14323-14334.
- Suriadi, H., & Frinaldi, A. (2023). Inovasi Dalam Meningkatkan Kinerja Organisasi Sektor Publik. *Menara Ilmu*, 17(2) 41-48. <https://doi.org/10.31869/mi.v17i2.4276>
- Tasyah, A., Lestari, P. A., Syofira, A., Rahmayani, C. A., Cahyani, R. D., & Tresiana, N. (2021). Inovasi Pelayanan Publik Berbasis Digital (E-Government) di Era Pandemi Covid-19. *Jurnal Ilmu Administrasi: Media Pengembangan Ilmu Dan Praktek Administrasi*, 18(2), 212-224. <https://doi.org/10.31113/jia.v18i2.808>
- Utami, P. (2023). Transformasi Administrasi Publik : Inovasi dan Adaptasi Menuju Efisiensi dan Pelayanan Publik Berkualitas. *PAPATUNG: Jurnal Ilmu Administrasi Publik, Pemerintahan dan Politik*, 6(2), 1-9. <https://doi.org/10.54783/japp.v6i2.726>
- Henriyani, E. (2020). Peran Pemimpin Visioner dalam Mewujudkan Inovasi Pelayanan Publik (Studi Pada Desa Majasari Kecamatan Sliyeg Kabupaten Indramayu). *Moderat: Jurnal Ilmiah Ilmu Pemerintahan*, 6(2), 436-443. <http://dx.doi.org/10.25157/moderat.v6i2.3427>
- Yaniar, D. R. (2018). Proses Inovasi Pelayanan Publik Melalui Program Door to Door System (DDS) dalam Meningkatkan Keamanan Masyarakat Kota Batu (Studi Pada Satuan Pembinaan Masyarakat Kepolisian Negara Republik Indonesia Resor Batu)[Skripsi]. Skripsi: *Universitas Brawijaya*. Retrieved from <http://repository.ub.ac.id/165846/1/TRINANDHA%20YUDHA%20ISMOYO.pdf>
- Hardiyansyah. (2018). Kualitas Layanan Publik : Konsep, Dimensi, Indikator, dan Implementasinya. Yogyakarta : Gava Media.
- Hayat. (2017). *Manajemen Pelayanan Publik*. Depok : Rajagrafindo Persada.
- Mustofa, M., Bara, A. B., Khusaini, F., Ashari, A., Hertati, L., Mailangkay, A. B., ... & Safii, M. (2023). Metode Penelitian Kepustakaan (Library Research). Get Press Indonesia.
- Pudjiarti, E. S. (2023). *Transformasi Organisasi: Membangun Kultur Pembelajaran untuk Menghadapi Tantangan Masa Kini*. Semarang: STIEPARI Press.
- Saggaf, S., Said, M. M., & Saggaf, W. S. (2018). *Reformasi Pelayanan Publik di Negara Berkembang* (Vol. 1). Makassar: SAH MEDIA.
- Zed, M. (2008). *Metode penelitian kepustakaan*. Jakarta: Yayasan Pustaka Obor Indonesia.
- Ombudsman Republik Indonesia. (2019). *Hasil Penilaian Survei Kepatuhan Standar Pelayanan Publik*. Ombudsman Republik Indonesia. <https://ombudsman.go.id/perwakilan/news/r/pwk--hasil-penilaian-survei-kepatuhan-standar-pelayanan-publik>
- Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945.
- Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik.

Cultural Adaptation and Integration of the Vietnamese Community in Australia

Nguyen Minh Tri

Ho Chi Minh City University of Foreign Languages – Information Technology, Vietnam
trinm@huflit.edu.vn

DOI: 10.32699/resolusi.v6i2.5977

Submitted: 2023-11-28, Revised: 2023-12-18, Accepted: 2023-12-19

Abstract

The Vietnamese community in Australia has faced numerous challenges during its integration into Australian society. Starting with language barriers and cultural differences, the community has had to navigate a complex set of social, economic, and political factors to establish its position in the country. Despite these obstacles, they have maintained their cultural identity while embracing the Australian way of life. One of the most significant contributions of the Vietnamese community to Australian society has been their ability to bring about fresh perspectives and opportunities for cultural exchange. The younger generations of Vietnamese Australians, in particular, have been instrumental in highlighting the values of inclusivity and multiculturalism. They have been at the forefront of promoting cultural diversity and understanding and acceptance of different communities. Our research aims to systematically document the adaptation and integration of the Vietnamese community in Australia across different periods. We employ qualitative methods to analyse the various factors that have contributed to the success of the Vietnamese community in Australia. By doing so, we hope to provide a comprehensive understanding of the challenges and opportunities faced by the Vietnamese community during their integration into Australian society.

Keywords: cultural adaptation, cultural integration, Vietnamese community, Australia

Introduction

Australia, often referred to as the "Land Down Under" (Banting, 2003, p. 14), is celebrated for its multicultural society, which owes its richness to the diversity of its inhabitants. Among the many ethnic and cultural groups that have contributed to this mosaic, the Vietnamese community is a vivid and thriving component. A compelling narrative of resilience, cultural adaptation, and integration into the Australian way of life marks the history of the Vietnamese diaspora in Australia. The story of the Vietnamese community's journey in Australia begins with a backdrop of historical turmoil – the Vietnam War (Nathalie, 2013). Following the conclusion of this protracted conflict, Australia opened its doors to refugees seeking asylum and the promise of a new beginning. Over the years, this community has faced and overcome numerous challenges, from the initial resettlement hurdles to preserving its rich cultural heritage.

This paper delves into the multifaceted journey of the Vietnamese community in Australia, exploring the critical aspects of their adaptation and integration. By comprehensively examining historical events, government policies, cultural preservation

efforts, education, and generational shifts, we aim to shed light on the intricate tapestry of their experience in this vast and diverse nation. The significance of this study lies not only in its historical and sociological implications but also in its contemporary relevance. As the Vietnamese community in Australia continues to grow and evolve, it serves as a compelling example of how diverse cultures can coexist and flourish within the framework of a welcoming and inclusive society. The journey of the Vietnamese community is a testament to the enduring principles of multiculturalism and the ability of individuals and communities to adapt, thrive, and contribute to the ever-evolving story of Australia.

In the following sections, we will explore the historical context of Vietnamese migration to Australia, the challenges and adaptation faced by the community, the role of government support and resettlement programs, and how the Vietnamese community has preserved its cultural identity while integrating into Australian society. Additionally, we will examine the educational and professional success of Vietnamese Australians, the dynamics of generational shifts, and the role of government policies in promoting multiculturalism. Through this exploration, we aim to gain a deeper understanding of the Vietnamese community's journey in Australia and the lessons it offers for the broader context of multiculturalism and social cohesion within the nation.

Method

This study utilizes a qualitative research design to comprehensively investigate the factors contributing to the success of the Vietnamese community in Australia. A qualitative approach is preferred to provide a nuanced exploration of historical events, government policies, cultural preservation efforts, education, and generational shifts within the community. The study aims to shed light on the complex tapestry of their experiences in this diverse and vast nation. The literature review encompasses a thorough analysis of over 60 articles from reputable academic journals, books, and other scholarly sources, spanning various disciplines, including sociology, anthropology, history, cultural studies, and education. This multidimensional perspective facilitates a comprehensive understanding of the factors influencing the Vietnamese community's success in Australia.

The literature review articles are selected based on their relevance to the critical themes of historical events, government policies, cultural preservation efforts, education, and generational shifts. Priority is given to studies that provide substantive insights into the experiences of the Vietnamese community in Australia, ensuring the comprehensive coverage of factors contributing to their success. Data extraction involves systematically gathering information from the selected articles related to historical events, government policies, cultural preservation efforts, education, and generational shifts. Each article is critically reviewed to extract essential findings, employed methodologies, and research contexts. This process allows for the synthesis of diverse perspectives and the identification of overarching themes.

The synthesis of information involves categorising and organising findings from the literature to create a cohesive narrative that addresses the complex tapestry of the Vietnamese

community's experiences in Australia. Through this process, the study aims to identify patterns, disparities, and gaps in the existing literature, contributing to a more holistic understanding of the factors shaping the community's success. The comprehensive literature review methodology provides a nuanced and well-informed foundation for comprehending the historical, cultural, educational, and generational dimensions of the Vietnamese community's experiences in Australia. By synthesising insights from over 60 articles, this study aims to contribute to the existing body of knowledge and inform further research and policy development in the realm of multiculturalism and community integration.

Historical Context of Vietnamese Migration to Australia

Vietnamese migration to Australia has a historical context that spans several decades. The roots of the Vietnamese community in Australia can be traced back to one of the most tumultuous periods in Vietnam's history—the Vietnam War, which spanned from 1955 to 1975. The war was a brutal and protracted conflict that resulted in widespread devastation, loss of life, and the displacement of millions of Vietnamese people. Following the end of the Vietnam War in 1975, over two million Vietnamese left their homeland due to state repression in post-war communist Vietnam (Loretta et al., 2017).

A significant number of those fleeing the war were referred to as "boat people" due to their often perilous journeys across the South China Sea in overcrowded and unseaworthy vessels. These refugees faced extreme hardships, including the risk of piracy, shipwrecks, and treacherous conditions at sea. Their desperate attempts to escape the war's ravages brought them to the shores of Australia and other countries in the region. Many Vietnamese refugees arrived in Australia through first asylum camps, while others resettled under the Orderly Departure Program (ODP 1979–1997) (Allison et al., 2010).

The first significant wave of Vietnamese refugees arrived in Australia in the late 1970s and early 1980s. This wave of refugees, known as the Indo-Chinese 'boat people', brought about a large-scale offshore selection of refugees and eventually led to a government-organized 'orderly departure program' from Vietnam. As a result, the number of Indo-Chinese born in Australia reached 70,000 by 1982 (Loretta et al., 2017). The Australian government responded to the humanitarian crisis by actively participating in the resettlement of refugees. Many Vietnamese who found their way to Australia came from refugee camps in Southeast Asian countries, including Malaysia, Indonesia, and Thailand. Australia provided them with refuge and a chance for a fresh start. This influx of refugees had a significant impact on the Vietnamese diaspora in Australia, creating tensions between the established community and the more recent arrivals. The established community, who had been in Australia for a more extended period, had different characteristics and connections to their homeland than the newer arrivals (Ruth et al., 2018). These early refugees faced numerous challenges upon their arrival. The language barrier was one of the most significant hurdles, as many Vietnamese refugees needed more knowledge of English. Additionally, they had to adapt to a different culture and environment, starkly contrasting their homeland.

The Vietnamese diaspora in Australia is characterised by intra-group differences in origins, socio-demographic characteristics, migration experience, gender, and generation (Chi, 2021). Vietnamese Australians have developed complex relationships with Vietnam and Sydney, with water as a frequent reference point in their associations with places (Nathalie, *Years of Separation: Vietnamese Refugees and the Experience of Forced Migration after 1975*, 2019). Vietnamese professional migrants have also been the subject of little research, highlighting a gap in understanding their mobilities (Giang, 2023). The national identity of Vietnamese diasporas in Australia has been shaped by factors such as language barriers, cultural differences, and ideological conflicts. Overall, the historical context of Vietnamese migration to Australia encompasses forced migration, family separation, and the ongoing experiences of Vietnamese communities in a multicultural society.

As we delve into the subsequent sections of this paper, we will explore how the Vietnamese community adapted to their new home and preserved their cultural identity while integrating into Australian society. Their story is one of resilience and determination, which continues to be a testament to Australia's enduring principles of multiculturalism and inclusivity.

Challenges and Adaptation

Initial Settlement Experiences

A series of formidable challenges marked the initial settlement experiences of Vietnamese refugees in Australia. For many, arriving in a new and unfamiliar country was a profound and life-altering event. Leaving behind their homeland, families, and everything they had known, they embarked on a journey toward an uncertain future. The process of acclimatisation to Australian society required immense resilience and adaptability.

The initial settlement experiences of Vietnamese in Australia were shaped by factors such as class, gender, generation, regional background, and the refugee status of the migrants. The resettlement journey often began in refugee camps, where families were selected for migration based on humanitarian criteria. Vietnamese refugees and asylum seekers faced debates and resistance in the Australian government and society, with the language used to describe them reflecting pragmatism and resistance (Loretta et al., 2017). Upon their arrival in Australia, Vietnamese refugees were confronted with the complexities of building a new life, from securing housing to navigating a foreign legal and social system. The Vietnamese-Australian community also faced stigmatisation due to their association with the drug trade, particularly heroin, which resulted in high rates of incarceration and social exclusion (Stevens, 2012).

However, the established Vietnamese community in Australia, which includes recent arrivals, is well-educated and actively connected to modern Vietnam through transnational linkages (Evans, 2014). Vietnamese Australians have complex relationships with their homeland and Sydney, with water being a frequent reference point in their memories and connections to place (Allison et al., 2010). Over the past decades, the spatial distribution and

concentration of Vietnamese communities in Australia have changed, with an increasing dispersion into the broader Australian community (Coughlan, 2008). Although full of hope and opportunity, this transition was undeniably challenging and emotionally taxing.

Language Barriers and Communication Challenges

The language barrier was one of the most significant obstacles faced by the Vietnamese community in Australia. The Vietnamese community in Australia has bridged the language barrier by maintaining the Vietnamese language across generations within families (Minh et al., 2023). Additionally, Vietnamese-Australian parents have reported family language policies; 35.6% of Vietnamese-Australian families have a family language policy (Van et al., 2022) aimed at maintaining Vietnamese at home, with some using Vietnamese with the nuclear family, Vietnamese outside the nuclear family, English at home, and English outside the home as language policies (Nguyen, 2023). This effort is crucial as it helps preserve the Vietnamese language and culture within the Vietnamese-Australian community, preventing a shift towards English language dominance and home language loss (Tran, 2022). Moreover, the community's focus on preserving the Vietnamese language benefits communication, strengthens family relationships, and supports study and work in Australia (Van et al., 2022). Most Vietnamese refugees had limited or no proficiency in English, and this linguistic gap hindered effective communication and integration. Language skills were crucial for securing employment, accessing services, and participating in the broader community.

Government and community organisations recognised the importance of language acquisition and implemented English language programs to support refugees. This includes proficiency in both Vietnamese and English languages. Language proficiency is essential for effective communication and building relationships within the Vietnamese community and broader Australian society (Nguyen, 2023). Vietnamese refugees should also be able to maintain and use their Vietnamese language, as it helps preserve cultural identity, maintain bonds with relatives, and build friendships (Giang, 2023). Additionally, proficiency in English is crucial for various aspects of life, such as work, education, and media consumption (Tran, 2022). Navigating languages and cultures is essential for successful integration and adaptation in Australian society (McLeod et al., 2019). Therefore, Vietnamese refugees in Australia need to have strong linguistic skills in order to integrate into Australian society.

Cultural Differences and Cultural Shock

Cultural differences and shock also marked the Vietnamese community's journey in Australia. The contrast between their home culture and the Australian way of life was often stark. Differences in social norms, customs, and expectations presented challenges in navigating their new environment. The challenges faced by the Vietnamese community in Australia due to cultural differences include language barriers, cultural differences, and ideological conflicts (Giang, 2023). These challenges can affect the process of acculturation and integration into the Australian multicultural society (Minh et al., 2023). However, the Vietnamese diasporas have also been able to preserve and promote their traditional Vietnamese culture, contributing to forming a unique community identity (Loretta et al., 2017) (Nguyen, 2023). The Vietnamese community in Australia has developed cultural flexibility,

which has helped them adapt and integrate into the local multicultural society without losing their Vietnamese identity (Nunn, 2017). Additionally, intra-group differences in class, gender, generation, and regional background can impact the development of diaspora and community identity among Vietnamese migrants in Australia. These challenges and differences highlight the complex process of negotiating multiple national spheres and belonging for Vietnamese migrants and their descendants in Australia.

The Vietnamese community in Australia faced several challenges due to cultural differences. One of the challenges was the inability to access and utilise healthcare services, mainly dementia services, which resulted in higher levels of caregiver burden and poor knowledge of available healthcare services related to dementia (Lily et al., 2015). Another challenge was the impact of language barriers in accessing services, which hindered communication and understanding between the Vietnamese community and healthcare providers (Loretta et al., 2017). Additionally, there were tensions between recent arrivals and the established Vietnamese community, as the former were more connected to modern Vietnam and had different characteristics and experiences (Nunn, 2017). Furthermore, Vietnamese Australians had to navigate multiple competing ideas of Australia, such as ethnocultural and multicultural, which influenced their sense of national (non)belonging (Tran et al., 2015). These challenges highlight the need for culturally and linguistically appropriate healthcare services, support for family caregivers, and a nuanced understanding of national identity for Vietnamese Australians.

Cultural adaptation was a two-way process, with Vietnamese Australians and the broader Australian society changing to accommodate each other's cultural norms, which include opportunities and challenges. The challenges include language barriers, cultural differences, and ideological conflicts (Giang, 2023). These challenges can create disparities in opinion and understanding between individuals and parties (Nguyen, 2023). However, there are also opportunities for cultural adaption, integration, and the preservation and promotion of traditional Vietnamese culture within the multicultural society (Minh et al., 2023) (Kavita et al., 2022). Vietnamese community groups in Australia have formed and developed community and flexibility, contributing to preserving and promoting Vietnamese culture (Nunn, 2017). Vietnamese language is being maintained across generations in Vietnamese families in Melbourne, Australia, as it benefits communication, strengthens relationships, and supports study and work in Australia (Tran, 2022). However, recent arrivals from Vietnam are actively connected to their homeland through transnational linkages, contributing to developing a vibrant Vietnamese community in Australia (Tran et al., 2015). Acculturation among Vietnamese Australians is associated with changes in lifestyle behaviours and health status, such as increased consumption of certain foods, higher levels of physical activity, and lower prevalence of overweight, obesity, and smoking (Tran et al., 2015). The experiences of Vietnamese diasporas in the Australian multicultural society highlight both positive outcomes, such as spreading the Vietnamese cultural image, and challenges, including ideological conflicts. These findings inform policymakers and administrators about the evolving dynamics of the Vietnamese community in Australia and the need for cultural adaptation strategies. The cultural identity of the Vietnamese community in Australia is

formed and developed based on origin, economic background, education level, and direct political experience. Migration circumstances, family background, and professional education influence the process of coexistence and integration among Vietnamese communities. This dynamic interaction fostered a more prosperous and diverse Australian cultural landscape.

The trauma of War and Its Impact

The trauma of war was an enduring aspect of the Vietnamese community's resettlement journey. Vietnamese immigrants who arrived as political refugees due to the Vietnam War experienced distress and potentially traumatic experiences before, during, and after their migration processes (Nguyen, 2023). Many Vietnamese refugees faced difficult and unsafe journeys, immigrated separately from family members, and experienced feelings of loss and lack of support systems in the U.S. (Mengxue et al., 2022). The Vietnamese diasporas in Australia also faced challenges in their resettlement (Giang, 2023). The exodus of Vietnamese refugees from post-war communist Vietnam was driven by widespread state repression, and the process of resettlement under the Orderly Departure Program involved delays and complexities (Nathalie, 2019). The trauma of war and the stressful context of immigration likely contributed to the poorer health and mental health disparities experienced by Vietnamese refugees (Berna et al., 2018). Many refugees carried with them the psychological scars of the Vietnam War, including experiences of violence, loss, and displacement. These traumatic experiences could have lasting effects on mental health and emotional well-being.

Recognising the impact of trauma, support services and mental health initiatives were established to assist the Vietnamese community in addressing their psychological needs. Vietnamese adults attending Vietnamese-speaking general practices in Australia may experience psychological distress due to exposure to trauma, lack of support, and a history of mental health problems (Tiet-Hanh et al., 2018). The stigma surrounding mental illness is prevalent among Vietnamese and Asian Americans, with cultural beliefs attributing mental disorders to improper behaviour, weakness, and family disgrace (Thi et al., 2015). However, despite low English proficiency, Vietnamese Australians with psychosis show comparable or better functioning than Australian-born patients, possibly due to factors such as living with family, spirituality, and participation in community rehabilitation programs (Mai et al., 2018). Further investigation is recommended to understand the role of cultural factors and language communities' support networks in the Vietnamese Australian community's experience of mental illness. Over the years, the community has made considerable progress in healing and coping with the legacy of the war.

Government Support and Resettlement Programs

The Australian government played a pivotal role in facilitating the resettlement of Vietnamese refugees. The Special Humanitarian Program (SHP), established in 1979, allowed the Australian government to provide refuge to thousands of Vietnamese refugees. Under this program, the government prioritised humanitarian principles and aimed to help those in dire need.

The Australian government's response to humanitarian needs, mainly through the Special Humanitarian Program, has been a significant aspect of their approach. Australia has a long history of accepting refugees and displaced persons, with over 800,000 settling there since 1945 (McDougall, 2021). The Special Humanitarian Program (SHP) is an essential component of Australia's planned Humanitarian Program, with places allocated each year for refugees and others with humanitarian needs (Janet, 2015). The SHP places are shared between offshore humanitarian applicants, refugees granted onshore Protection visas, and immediate family members of visa holders already in Australia (Lewis et al., 2014). The government's focus for resettlement has been on refugees from Africa, Asia, and the Middle East (Elibritt et al., 2010). The effectiveness of Australia's humanitarian assistance has been recognised, with its response to the Horn of Africa humanitarian crisis in 2011 being commended for its speed, flexibility, and coordination efforts (Janet, 2015).

The Special Humanitarian Program (SHP) of Australia had a significant impact on the lives of Vietnamese refugees. The program provided a pathway for refugees to seek protection and resettlement in Australia (Chia, 2020). However, the program also faced criticism for its limited scope and the prioritisation of refugees who were "job ready" and had English-language skills (Rosie et al., 2022). This approach undermined the principle of resettling the most vulnerable refugees and raised concerns about the market-driven outsourcing and privatisation of Australia's refugee resettlement priorities (Martina et al., 2021). Additionally, the shift towards neoliberal imperatives of productivity and self-sufficiency in Australian refugee settlement policies further affected the experiences of Vietnamese refugees, as they were expected to participate in the labour market (Asher et al., 2019). Overall, while the SHP provided opportunities for Vietnamese refugees to find safety and rebuild their lives in Australia, it also highlighted the challenges and limitations of Australia's refugee policies.

The resettlement process included providing Vietnamese refugees with housing, language classes, and healthcare access. The resettlement program of Vietnamese in Australia has shown changes over time, with the proportion of refugees declining from almost all migrants in the period 1975-1981 to only 23% of those who arrived in 1991-1993 (Evans, 2014). Vietnamese refugees resettled in Australia for 11 years exhibited sound mental health adaptation and did not impose a burden on general or mental health services (Zachary et al., 2005). As the Vietnamese immigrants lived longer in Australia, they showed changes in health behaviours, with decreased smoking rates but increased daily exercise and consumption of takeaway foods (Kaye et al., 2001). These changes were essential in easing their transition into Australian society and promoting their integration. In addition, the fall of Saigon led to the institutionalisation of intercountry adoption in Australia, which opened the doors for other government-sanctioned adoption programs within two years (Patricia, 2012). The Vietnamese Australian community formed an enclave economy which was uniquely well-positioned as an ethnic enclave economy to take advantage of the growing demand for illicit drugs, especially heroin (Evans, 2014). By the same token, the Vietnamese Australian community faced exclusion from economic and social opportunity in its formative years. The spatial distribution and concentration of Vietnamese communities in Australia have gradually changed, with an increasing dispersion of Vietnamese Australians into the broader Australian

community over the past two decades (Coughlan, 2008). In other words, the Vietnamese community in Australia grew over the years, with refugees and their families forging new lives and contributing to Australia's cultural diversity.

Generational Shifts and Dual Identity

The Vietnamese community in Australia has experienced significant generational shifts over the decades, with the emergence of second and third generations born and raised in the country. Second and third-generation Vietnamese Australians in Australia have experiences that involve preserving and developing their cultural identity within the multicultural society. They actively maintain the Vietnamese language within their families, recognising its benefits in communication, strengthening relationships, and supporting study and work in Australia (Nguyen, 2023). These generations also face language barriers, cultural differences, and ideological conflicts, but they adapt and integrate into Australian society, spreading the Vietnamese cultural image (Giang, 2023). The experiences of these generations highlight the cultural flexibility and community formation among Vietnamese Australians, which is influenced by factors such as origin, economic background, education level, and political experience (Tran, 2022). The values of harmony and solidarity brought by Vietnamese refugees have been preserved across generations, with the younger generation embracing and practising these values as valuable resources (Minh et al., 2023). Overall, the experiences of second and third-generation Vietnamese Australians involve navigating cultural adaptation, maintaining cultural capital, and contributing to the multicultural fabric of Australian society.

The second generation, typically born to first-generation Vietnamese immigrants, often grapples with the dual identity of being Vietnamese by heritage and Australian by birth. Vietnamese Australians express their dual identity in various ways. They navigate the intercultural borderland by engaging with the interplay between the strange and the familiar in specific contexts (McKenzie, 1999). They maintain certain traditional Vietnamese cultural values and Confucian ideals while adopting behavioural characteristics from mainstream Australian culture (Thu-Huong et al., 2003). They also experience a contrast between Vietnam, remembered as an interlinked sensual and social world, and Australia, which is viewed as a harsh, spacious, empty, dry continent (Thomas, 2004). Additionally, diasporic Vietnamese cultural producers create diverse representations of Vietnam, often nostalgic, for both diasporic Vietnamese and Western audiences outside of Vietnam (Scott et al., 2010). The nature of the Vietnamese diaspora in Australia impacts their connections with the homeland, with ties to the motherland being influenced by the perception of being a victim or refugee diaspora (Ben-Moshe et al., 2016).

Having a dual identity as a Vietnamese Australian presents both challenges and benefits. On the one hand, the Vietnamese-Australian community has faced stigmatisation due to an association with the drug trade, leading to high rates of incarceration and social exclusion (Evans, 2014). On the other hand, higher degrees of acculturation among Vietnamese Australians have been associated with positive lifestyle behaviours and better

health outcomes, such as increased consumption of healthy foods, higher levels of physical activity, and lower prevalence of overweight, obesity, and type 2 diabetes (Tran et al., 2015). Additionally, the Vietnamese diaspora in Australia has created vibrant transnational linkages and connections to modern Vietnam, which can provide a sense of community and belonging for recent arrivals. However, tensions may arise between established community members and recent arrivals due to differences in education and level of connection to Vietnam (Ben-Moshe et al., 2016). They have been raised in a multicultural environment, which has led to the development of a unique cultural identity that combines elements of their parents' Vietnamese culture and the Australian culture they experience daily. This dual identity can present opportunities and challenges as they navigate their roles in their families and the broader society.

For the second and third generations of Vietnamese Australians, striking a balance between their Vietnamese heritage and Australian culture is a multifaceted journey. Vietnamese-Australians balance their Vietnamese heritage and Australian culture by navigating multiple national spheres and negotiating their sense of belonging. They engage in a dynamic and dialogic process of negotiating competing ideas of Australia as ethnocultural and multicultural (Ben-Moshe et al., 2016). The Vietnamese diaspora in Australia is characterised by intra-group differences in origins, socio-demographic characteristics, and migration experiences, which impact the development of diaspora and community identity (Loretta et al., 2017). Vietnamese-Australians maintain ties to their homeland through language proficiency, use, and maintenance, with Vietnamese being their most proficient language used in various social contexts (Nunn, 2017). The impact of being perceived as a victim or refugee diaspora influences their connections with the homeland (McLeod et al., 2019). The generational shifts within the Vietnamese diaspora in Australia also shape their connections with their Vietnamese heritage and Australian culture (Maki et al., 2020).

Vietnamese-Australians may be fluent in English and have grown up with Western cultural influences. However, they also maintain strong connections to their Vietnamese roots through traditions, values, and family ties. Vietnamese-Australians balance their Vietnamese heritage and Australian culture by navigating their bilingual/bicultural identity, utilising English as a tool for communication, and maintaining a strong sense of ethnicity. They perceive themselves as unbalanced bilinguals with more excellent proficiency in English than in Vietnamese (Sharynne et al., 2023). However, they still maintain a solid connection to their Vietnamese heritage, internalising the idea of "being culturally Vietnamese" and expressing it through language portraits (Dam, 2023). Vietnamese-Australians also affiliate themselves with Australian-ness through lived experiences, while their connection to Vietnam is influenced by factors such as birthplace, ethnicity, and plans (Minh et al., 2023). They form a unique cultural identity within the Australian multicultural society, preserving and promoting traditional Vietnamese culture while adapting and integrating into the local community (Giang, 2023). This balance is influenced by language barriers, cultural differences, and ideological conflicts, which can both facilitate and hinder their integration (Nguyen, 2023). This balance often extends to choices in dress, food, and social customs, creating a rich tapestry of cultural integration. The process of negotiating these dual identities

can be complex. It requires an understanding and appreciation of both cultures and the ability to adapt to various situations. The Vietnamese community in Australia has been instrumental in providing support and guidance to these younger generations as they navigate the intricate terrain of cultural identity.

Generational shifts within the Vietnamese community have influenced the internal dynamics and played a role in cultural exchange within and outside the community. The younger generations often serve as bridges between the Vietnamese community and the broader Australian society. They bring elements of their heritage into mainstream Australian culture through music, food, fashion, and art, thereby enriching the nation's multicultural landscape. Conversely, they engage with Australian culture in various ways, fostering cross-cultural understanding and appreciation. This cultural exchange extends to educational institutions, workplaces, and social settings, contributing to the integration of the Vietnamese community into the broader Australian society.

Navigating the Cultural Crossroads

The preceding sections that explore the experiences of the Vietnamese community in Australia offer a wealth of valuable insights into the intricacies of cultural adaptation and integration in a multicultural framework. This discussion delves into critical themes by examining historical contexts, challenges encountered, and the community's dynamic response to these challenges.

First, multiculturalism as a driving force. Multiculturalism has been a cornerstone of Australia's society and has been integral in shaping the integration trajectory of the Vietnamese community. Through initiatives like the Special Humanitarian Program, Australia has demonstrated its unwavering commitment to providing a safe haven for those escaping conflict and promoting a society that values and embraces cultural diversity. This guiding principle has allowed the Vietnamese community to retain its cultural identity while fully engaging in the wider Australian social fabric.

Second, resilience in the face of challenges. The Vietnamese community encountered a range of complex challenges, particularly during their initial settlement phase. Overcoming language barriers, cultural differences, and the lasting impact of war could have posed serious obstacles to successful integration. Nevertheless, the community's remarkable resilience and determination have been instrumental in overcoming these difficulties. By establishing cultural enclaves, language programs, and mental health initiatives, the community has fostered a sense of cohesion and empowerment, enabling them to build a brighter future.

Third, the role of education in integration. Education plays a pivotal role in integrating the Vietnamese community into Australian society. Notably, the academic and professional success of second and third-generation Vietnamese Australians has propelled them to become valuable members of the broader community. Educational institutions have been instrumental in promoting cross-cultural understanding, nurturing friendships, and

dismantling stereotypes, all of which contribute to building a more interconnected and inclusive society.

Fourth, dual identity and cultural exchange. The Vietnamese community has experienced generational shifts that have led to a sophisticated comprehension of dual identity. The second and third generations, who have grown up with their parents' cultural heritage and the Australian culture, embody a dynamic interplay of traditions and contemporary values. This dual identity is a deeply ingrained aspect of the Vietnamese community. It promotes cultural exchange within the community and broader Australian society, leading to a more diverse and enriched cultural landscape.

As the Vietnamese community in Australia grows and changes, it is important to recognise opportunities for progress and development. Ongoing support for government policies that promote multiculturalism, social unity, and access to education is crucial. Encouraging initiatives that foster cross-cultural dialogue and understanding will help strengthen ties between the Vietnamese community and Australian society as a whole.

The story of the Vietnamese community in Australia is one of adaptability, strength, and successful integration. By embracing and celebrating the unique contributions of this community, Australia can continue to enhance its multicultural tapestry and uphold its commitment to inclusivity as a defining feature of its national identity.

Conclusion

The Vietnamese community in Australia arrived as refugees but has since successfully integrated into Australian society through determination, cultural preservation, and the support of the Australian government's Special Humanitarian Program. The Vietnamese community faced challenges such as language barriers, cultural differences and the trauma of war, but they adapted, learned new languages, and preserved their cultural identity. Their cultural enclaves, cuisine and festivals serve as sources of pride, bridging the gap between their heritage and Australian culture. The younger generation navigates a dual identity, adding depth to the broader Australian cultural landscape and promoting cross-cultural understanding. Government policies promoting multiculturalism and social cohesion have supported the growth of the Vietnamese community in Australia. Celebrating diversity and encouraging active participation of all cultural groups have provided a framework for inclusion and a testament to the principles of multiculturalism. The Vietnamese community's success story reaffirms that diversity is a source of strength and enrichment for any nation. As Australia continues to evolve, so does the Vietnamese community's story. Their journey is an enduring inspiration, a testament to the human spirit, and a shining example of successful cultural adaptation and integration in a diverse and inclusive society.

References

- Allison Cadzow, Denis Byrne, Heather Goodall. (2010). Vietnamese Australians and river environments in Vietnam and Sydney. *Transforming Cultures*, 5(1), 112-142. doi:10.5130/tfc.v5i1.1558
- Asher Lazarus Hirsch, Khanh Hoang, Anthea Vogl. (2019). Australia's Private Refugee Sponsorship Program: Creating Complementary Pathways Or Privatising Humanitarianism? *Refuge: Canada's Journal on Refugees*, 35(2), 109-122. doi:10.7202/1064823ar
- Banting, E. (2003). *Australia-The People*. Crabtree Publishing Company.
- Ben-Moshe, D., Pyke, J., Kirpitchenko, L. (2016). The Vietnamese diaspora in Australia: identity and transnational behaviour. *Diaspora Studies*, 9(2), 112-127. doi:10.1080/09739572.2016.1183891
- Berna M. Torr, Eileen T. Walsh. (2018). Does the Refugee Experience Overshadow the Effect of SES? An Examination of Self-Reported Health Among Older Vietnamese Refugees. *Race and Social Problems*, 10, 259-271. doi:10.1007/s12552-018-9240-6
- Chi, H. N. (2021). Reasons for migration among Vietnamese professional migrants in Australia. *Migration for Development*, 11(3), 1127-1143. doi:10.1080/21632324.2021.1872835
- Chia, J. (2020). Timeline of Australia's Refugee and Humanitarian Program.
- Coughlan, J. E. (2008). The changing spatial distribution and concentration of Australia's Chinese and Vietnamese communities: An analysis of 1986-2006 Australian population census data. *Journal of Population Research*, 25(2), 161-182. Retrieved from <http://www.jstor.org/stable/41110906>
- Dam, H. T. (2023). Visualising Third Culture Kids' identity through language portraits: the case of Vietnamese sojourner children in Australia. *Journal of Multilingual and Multicultural Development*. doi:10.1080/01434632.2023.2225488
- Elibritt Karlsen, Janet Phillips, Elsa Koleth. (2010). Seeking asylum: Australia's humanitarian response to a global challenge. *Commonwealth of Australia*. Retrieved from library.bsl.org.au
- Evans, R. (2014). Applying the theory of resource curse to disadvantaged migrant communities and criminal offending: Vietnamese Australians and the heroin trade as a case study. *Citizenship and Globalisation Research Paper Series*, 5(1), 1-28. Retrieved from <https://hdl.handle.net/10536/DRO/DU:30064748>
- Giang, N. M. (2023). The cultural adaption and integration of diasporas: a qualitative study of the Vietnamese community in Australia. *Journal of Social transformation and Education*, 4(1), 1-9. doi:10.54480/jste.v4i1.56
- Janet, P. (2015). *Australia's Humanitarian Program: a quick guide to the statistics since 1947*. Parliament of Australia.
- Kavita Thapliyal, Mahendra Joshi. (2022). Cross-Cultural Management: Opportunities and Challenges. In *Integrating New Technologies in International Business* (p. 23). Apple Academic Press.

- Kaye Brock, Elizabeth Lockwood, Rosemary Cant, Margaret Bermingham, Hoang Tran-Dinh. (2001). An Investigation of Health Behavior Change in Vietnamese-Born Individuals Living in Sydney, Australia. *Ethnicity & Disease*, 11(3), 385-390. Retrieved from <http://www.jstor.org/stable/45410281>
- Lewis, Sida., Hugo, Slim., Karen, Ovington., Deborah, Clifton., Joyce, Njagi., Anais, Resseguier., Shams, Tazi. (2014). Australia's response to the Horn of Africa humanitarian crisis.
- Lily Dongxia Xiao, Lesley Habel, Anita De Bellis. (2015). Received Challenges in Dementia Care by Vietnamese Family Caregivers and Care Workers in South Australia. *Journal of Cross-Cultural Gerontology*, 30, 333-352. doi:10.1007/s10823-015-9264-y
- Loretta Baldassar, Joanne Pyke, Danny Ben-Moshe. (2017). The Vietnamese in Australia: diaspora identity, intra-group tensions, transnational ties and 'victim' status. *Journal of Ethnic and Migration Studies*, 43(6), 937-955. doi:10.1080/1369183X.2016.1274565
- Mai Do, McCleary, J., Nguyen, D., Winfrey, K. (2018). 2047 Mental illness public stigma, culture, and acculturation among Vietnamese Americans. *Journal of Clinical and Translational Science*, 2(1), 17-19. doi:10.1017/cts.2018.93
- Maki Meyer, Farida Fozdar. (2020). Complex but ordinary: intercultural negotiations among mixed families in Australia. *Journal of Family Studies*, 28(4), 1504-1526. doi:10.1080/13229400.2020.1844039
- Martina Boese, John Van Kooy, Dina Bowman. (2021). 'Now I'm just like anyone else in the community': Work, Welfare, and Community Expectations of Refugees in Australia. *Journal of Refugee Studies*, 34(4), 4072-4091. doi:<https://doi.org/10.1093/jrs/feaa080>
- McDougall, D. (2021). Australia's humanitarian response to disasters in the South Pacific. *Asian Journal of Comparative Politics*, 6(3), 202-220. doi:10.1177/20578911211019249
- McKenzie, P. (1999). Swimming in and out of Focus: Second Contact, Vietnamese Migrant Others and Australian Selves. *The Australian Journal of Anthropology*, 10(3), 271-287.
- McLeod, Sharynne, Sarah Verdon, Cen Wang, Van H. Tran. (2019). Language Proficiency, Use, and Maintenance among People with Vietnamese Heritage Living in Australia. *Journal of Monolingual and Bilingual Speech*, 1(1), 55-79. doi:10.1558/JMBS.10973
- Mengxue Sun , Duyen Tran, Anna Bach, Uyen Ngo, Tiffany Tran, Thuy Do, Oanh L. Meyer. (2022). Impact of War and Resettlement on Vietnamese Families Facing Dementia: A Qualitative Study. *Clinical Gerontologist*, 45(4), 798-807. doi:10.1080/07317115.2022.2071661
- Minh Giang Nguyen, Thuy Van Nguyen. (2023). Vietnamese cultural identity view from the cultural adaption and integration of the Vietnamese community in Australia. *Journal of Social Transformation and Education*, 4(1), 10-20. doi:10.54480/jste.v4i1.58
- Nathalie, H. C. (2013). War and Diaspora: The Memories of South Vietnamese Soldiers. *Journal of Intercultural Studies*, 34(6), 697-713. doi:10.1080/07256868.2013.846895
- Nathalie, H. C. (2019). Years of Separation: Vietnamese Refugees and the Experience of Forced Migration after 1975. In *Remembering Migration: Oral Histories and Heritage in Australia* (pp. 123-139). Palgrave Macmillan, Cham: Springer. doi:10.1007/978-3-030-17751-5_9

- Nguyen, M. G. (2023). Looking back on the Development of Vietnamese Community in Australia. *RA journal of applied research*, 9(1), 7-11. doi:10.47191/rajar/v9i1.02
- Nunn, C. (2017). Negotiating national (non)belongings: Vietnamese Australians in ethno/multicultural Australia. *Identities-global Studies in Culture and Power*, 24(2), 216-235. doi:10.1080/1070289X.2015.1096273
- Patricia, F. (2012). Operation Babylift: advancing intercountry adoption into Australia. *Journal of Australian Studies*, 36(4), 445-458. doi:10.1080/14443058.2012.727845
- Rosie Evans, Sally Baker, Tamara Wood. (2022). Expanding durable solutions for refugees: possibilities for developing education pathways in Australia. *Australian Journal of Human Rights*, 28(2-3), 308-328. doi:10.1080/1323238X.2022.2131506
- Ruth Balint, Zora Simic. (2018). Histories of Migrants and Refugees in Australia. *Australian Historical Studies*, 49(3), 378-409. doi:10.1080/1031461X.2018.1479438
- Scott Brook, Caitlin Nunn. (2010). Vietnamese Return Narratives in Australian Public Culture. *Amerasia Journal*, 36(2), 17-32. doi:10.17953/amer.36.2.yt642ptumt2099x0
- Sharynne McLeod, Sarah Verdon, Kate Margetson, Van H. Tran, Cen Wang, Ben Pham, Lily To, Kylie Huynh. (2023). Multilingual Speech Acquisition by Vietnamese-English-Speaking Children and Adult Family Members. *Journal of Speech, Language, and Hearing Research*, 66(7), 2184-2229. doi:10.1044/2023_JSLHR-21-00669
- Stevens, R. (2012). Political Debates on Asylum Seekers during the Fraser Government, 1977-1982. *Australian Journal of Politics and History*, 58(4), 526-541. doi:10.1111/J.1467-8497.2012.01651.X
- Thi Nguyen, Sarah Dennis, Huy An, Sanjyot Vagholkar, Siaw Teng Liaw. (2015). Psychological distress among Vietnamese adults attending Vietnamese-speaking general practices in South Western Sydney: prevalence and associations. *Australian Journal of Primary Health*, 22(4), 354-359. doi:10.1071/PY14145
- Thomas, M. (2004). Vietnamese in Australia. In *Encyclopedia of diasporas: Immigrant and refugee cultures around the world* (pp. 1141-1149). United States of America: Springer. doi:10.1007/978-0-387-29904-4_116
- Thu-Huong, Nguyen., Brian, King., Lindsay, W, Turner. (2003). Travel behavior and migrant cultures: the vietnamese in Australia. *Tourism Culture & Communication*, 4(2), 95-107. doi:10.3727/109830403108750849
- Tiet-Hanh Dao-Tran, Charrlotte Seib, Lee Jones, Debra Anderson. (2018). A cross-cultural comparison of health-related quality of life and its associated factors among older women in Vietnam and Australia. *BMC Research Notes* volume, 11, 147. doi:10.1186/s13104-018-3282-0
- Tran, D. T., Jorm, L., Johnson, M., Bambrick, H., Lujic, S. (2015). Effects of acculturation on lifestyle and health status among older Vietnam-born Australians. *Asia-Pacific Journal of Public Health*, 27(2), 2259-2274. doi:10.1177/1010539513491419
- Tran, G. C. (2022). The Cultural Capital of Migrants and Language Maintenance across Generations: Vietnamese Families in Australia. *Sociological Focus*, 56(1), 81-96. doi:10.1080/00380237.2022.2154295

- Van Tran, Sarah Verdon, Sharynne McLeod, Cen Wang. (2022). Family Language Policies of Vietnamese–Australian Families. *Journal of child science*, 12(1), 67-78. doi:10.1055/s-0042-1743490
- Zachary Steel, D. Silove, T. Chey, A. Bauman, T. Phan, T. Phan. (2005). Mental disorders, disability and health service use amongst Vietnamese refugees and the host Australian population. *Acta Psychiatrica Scandinavica*, 111(4), 300-309. doi:10.1111/j.1600-0447.2004.00458.x

Etika Politik Generasi Milenial Menjelang Pemilu 2024

Munadi

Fakultas Komunikasi Sosial dan Politik, Universitas Sains Al-Qur'an
amunadi11@yahoo.com

DOI: 10.32699/resolusi.v6i2.6056

Submitted: 2023-12-06, Revised: 2023-12-20, Accepted: 2023-12-20

Abstrak

Pemilihan umum 2024 di Indonesia diperkirakan akan ditandai oleh partisipasi dominan generasi milenial dan Gen Z. Generasi ini menunjukkan perilaku politik yang berbeda karena kritis dan terbuka terhadap informasi politik. Hal ini dipengaruhi oleh budaya digital yang berkembang pesat. Pergeseran ini menekankan relevansi etika politik sebagai fondasi kunci bagi kedewasaan politik, terutama di kalangan milenial. Dalam konteks pemilu, pilihan yang berbeda menuntut fokus sentral pada etika politik, dengan penekanan pada saling menghormati. Oleh karena itu, langkah-langkah preventif sangat diperlukan untuk memastikan keadilan dan integritas demokratis pemilu 2024. Menggunakan studi literatur dan analisis kualitatif, penelitian ini mengusulkan tindakan tertarget: peningkatan pendidikan politik milenial, penekanan media pada pelaporan politik yang faktual untuk mengurangi risiko disinformasi, dan partisipasi aktif milenial untuk meningkatkan representasi demokratis. Rekomendasi penelitian ini didasarkan pada pemahaman menyeluruh tentang proses pemilihan umum, menekankan pentingnya perilaku politik etis bagi partisipasi berkomitmen dan bertanggung jawab generasi milenial dalam membentuk masa depan demokratis Indonesia.

Kata kunci: generasi milenial, etika politik, pemilu 2024, pendidikan politik, faktualitas media

Pendahuluan

Dalam konteks pemilihan umum, partisipasi publik sangat penting dalam menegaskan prinsip-prinsip demokrasi. Proses pemilihan umum berfungsi sebagai sarana untuk mewujudkan kedaulatan rakyat dan pemilihan pemimpin yang aspiratif, berkualitas, dan bertanggung jawab (Wardhani, 2018). Penting untuk diakui bahwa dalam negara demokrasi, pemilihan umum memiliki arti penting sebagai sarana untuk menyalurkan hak-hak politik dan memastikan partisipasi publik dalam kehidupan politik (Febriyanto & Firman, 2023). Partisipasi masyarakat dalam pemilihan legislatif, misalnya, memainkan peran penting dalam membentuk lanskap politik suatu wilayah (Arniti, 2020). Faktor-faktor yang mempengaruhi probabilitas pelaksanaan hak politik dalam pemilihan presiden termasuk keterlibatan masyarakat dalam kehidupan politik, memungkinkan mereka menentukan pembuat kebijakan mereka (Anderson & Kuswanto, 2021). Selain itu, partisipasi politik masyarakat dalam pemilihan lokal dipengaruhi oleh kesadaran dan kepercayaan mereka terhadap pemerintah, serta pengetahuan mereka tentang politik (Hemafitria dkk., 2021).

Dalam konteks pemilihan umum, perilaku etis para aktor politik dan kepatuhan pada etika politik sangat penting. Etika politik dipandang sebagai bentuk kepatuhan pada prinsip moral, mencerminkan komitmen seorang politisi pada perilaku etis, yang penting untuk pemeliharaan kepercayaan publik dan integritas proses pemilihan umum (Febriyanto & Dewi,

2021). Lebih jauh lagi, komunikasi politik memainkan peran penting dalam meningkatkan partisipasi pemilih, karena berfungsi sebagai sarana untuk melibatkan dan memobilisasi pemilih, sehingga berkontribusi pada promosi praktik pemungutan suara yang etis dan informatif (Sa'ban dkk., 2020). Selain itu, partisipasi masyarakat dalam pemilihan lokal dianggap sebagai aspek penting dari masyarakat yang demokratis, mencerminkan karakteristik modernisasi politik dan menekankan pentingnya keterlibatan politik dalam kerangka demokrasi (Hemafitria dkk., 2021). Lebih lanjut, proses demokrasi, partai politik, dan pemilihan pemimpin daerah saling terkait, menyoroti pentingnya perilaku etis dan integritas politik dalam proses pemilihan umum (Sulaeman, 2017).

Etika politik memainkan peran penting dalam memastikan integritas proses pemilihan umum dan promosi perilaku etis di antara aktor politik. Komunikasi politik, partisipasi masyarakat, dan proses demokrasi semuanya dipengaruhi oleh perilaku etis para aktor politik, menggarisbawahi pentingnya menegakkan etika politik dalam konteks pemilihan umum. Perilaku etis dan integritas politik penting untuk memupuk kepercayaan publik, mempromosikan praktik pemungutan suara yang informatif, dan memajukan cita-cita demokratis dari proses pemilihan umum.

Bagaimana dengan etika politik pemilih (masyarakat), terutama generasi milenial? Perilaku etis pemilih milenial dalam pemilihan umum dipengaruhi oleh berbagai faktor, termasuk keterlibatan mereka dengan media sosial, komunikasi politik, dan literasi dalam masalah politik. Studi telah menunjukkan bahwa budaya politik pemilih milenial, khususnya dalam konteks pemilihan lokal, dibentuk oleh penggunaan teknologi instan dan canggih mereka, seperti platform media sosial, untuk terlibat dalam wacana politik dan mengekspresikan pendapat mereka (Fauzi, 2023).

Era pasca-reformasi telah menyaksikan perubahan signifikan dalam cara generasi milenial memanfaatkan internet dan media sosial untuk mengekspresikan pendapat politik mereka, mencerminkan rasa kebebasan dan ekspresi yang meningkat di antara kelompok demografi ini (Susanto & Irwansyah, 2021). Selain itu, preferensi terhadap media sosial di kalangan pemilih milenial telah diamati secara signifikan memengaruhi pengetahuan mereka tentang calon legislatif, menunjukkan pengaruh platform digital terhadap kesadaran politik dan pengambilan keputusan mereka (Febriani, 2020). Penggunaan media sosial berbasis internet sebagai alat komunikasi politik telah menjadi fenomena yang menonjol dalam membentuk perilaku politik pemilih milenial, khususnya dalam konteks pemilihan lokal (Komariah & Kartini, 2019). Selain itu, upaya untuk meningkatkan literasi politik di kalangan kaum muda melalui komunikasi media telah menjadi instrumen penting dalam mempromosikan partisipasi politik yang berpengetahuan dan etis di kalangan demografi milenial (Nugraha et al., 2021). Lalu yang menjadi pertanyaan adalah bagaimana etika politik generasi milenial dalam pemilu 2024? Terutama ketika Indonesia mengadakan pemilu ditahun tersebut. Apa upaya yang perlu diantisipasi untuk menghadapi pemilih yang cenderung terbuka terhadap arus informasi tersebut?

Metode

Dalam penelitian ini, metode kualitatif dengan data pustaka digunakan untuk menganalisis etika politik generasi milenial dalam pemilu 2024. Metode ini dipilih karena penelitian ini bertujuan untuk memberikan gambaran yang mendalam dan holistik tentang fenomena sosial yang diteliti.

Penelitian ini dilakukan dengan langkah-langkah berikut. Tahap awal, peneliti melakukan studi literatur untuk mengkaji teori dan konsep yang relevan dengan penelitian ini. Studi literatur dilakukan dengan membaca buku, jurnal, artikel, atau dokumen lainnya yang membahas tentang etika politik, generasi milenial, dan pemilu. Berdasarkan hasil studi literatur, peneliti merumuskan definisi operasional dari variabel-variabel yang akan diteliti. Misalnya, definisi operasional dari variabel "etika politik" adalah seperangkat nilai dan norma yang mengatur perilaku para pelaku politik dalam menjalankan aktivitas politiknya.

Peneliti kemudian mengumpulkan data pustaka dari berbagai sumber, seperti buku, jurnal, artikel, atau dokumen lainnya. Data pustaka tersebut dikumpulkan dengan menggunakan teknik pencarian literatur yang relevan, seperti pencarian menggunakan kata kunci, pencarian berdasarkan topik, atau pencarian berdasarkan penulis. Data pustaka yang telah terkumpul kemudian dianalisis secara kualitatif. Analisis kualitatif dilakukan dengan menggunakan teknik analisis tematik, analisis naratif, atau analisis diskursif. Hasil analisis data pustaka kemudian digunakan untuk menjawab rumusan masalah penelitian.

Pola Perilaku Politik di Dunia Maya

Transformasi politik di Indonesia tidak terlepas dari peran media massa. Media massa memiliki peran penting dalam membangun pemahaman masyarakat hingga perilaku politiknya. Dalam merespons perubahan politik pasca Orde Baru, media massa menyajikan informasi yang beragam dan cenderung independen. Hal ini mendorong masyarakat untuk lebih kritis dalam menyikapi isu-isu politik.

Perubahan perilaku politik masyarakat juga dipengaruhi oleh faktor kulturalisasi. Generasi milenial, yang tumbuh dan berkembang di era digital, memiliki pandangan politik yang berbeda dengan generasi sebelumnya. Generasi milenial lebih kritis dan terbuka terhadap informasi politik. Media massa juga memainkan peran penting dalam komunikasi politik. Kampanye politik tidak bisa terlepas dari pengaruh media massa, baik media cetak maupun elektronik.

Sebuah penelitian yang dilakukan oleh LSI Denny JA pada bulan Oktober-November 2023 menunjukkan bahwa generasi milenial lebih tertarik dengan branding yang ekspresif dan menggemaskan. Hal ini terbukti dari hasil survei yang menunjukkan bahwa suara untuk salah satu peserta pemilu meningkat dari 36,9% menjadi 41,6% setelah peserta tersebut menggunakan branding yang menggemaskan.

Anggota Komisi Pemilihan Umum (KPU) August Mellaz menyatakan bahwa 55-60% pemilih dalam Pemilu 2024 didominasi oleh generasi milenial dan Gen Z. Oleh karena itu,

generasi muda perlu memahami visi misi para calon peserta pemilu sebelum menentukan pilihannya.

Pola perilaku politik pada media massa terbukti berubah dengan generasi milenial sebagai pelaku utama. Berbeda dengan pemilu 2019 lalu yang diwarnai dengan konten berita hoaks dan politik identitas, pemilu 2024 diprediksi akan lebih terbuka dan reaktif terhadap perubahan. Hal ini disebabkan oleh generasi milenial yang tumbuh di tengah perubahan politik besar-besaran di Indonesia.

Generasi milenial cenderung lebih terbuka dalam memandang politik maupun ekonomi, serta reaktif terhadap segala perubahan yang terjadi di sekeliling mereka. Oleh karena itu, memahami latar belakang dan aspirasi generasi milenial menjadi kunci kemenangan dalam Pemilu 2024. Dengan demikian, generasi milenial memiliki pengaruh yang signifikan terhadap hasil Pemilu 2024. Preferensi pemilu yang bergeser dari pemilu sebelumnya kemungkinan besar disebabkan oleh perubahan pola perilaku politik generasi milenial.

Relevansi dengan Etika

Dalam konteks teori etika, penting untuk mempertimbangkan teori etika normatif seperti utilitarianisme, deontologi, dan teori berbasis hak. Teori-teori ini menyediakan kerangka kerja untuk mengevaluasi tindakan manusia berdasarkan norma atau aturan yang telah ditetapkan (Riduwan & Andayani, 2018). Selain itu, manifestasi teori psikoanalisis dalam etika bisnis dan dampaknya terhadap kegagalan etika telah diteliti, menunjukkan relevansi teori psikologis dalam memahami perilaku etis (Amalia & Hamidah, 2023).

Menurut Jimly Asshiddiqie, pemimpin yang baik adalah panutan yang mampu diteladani oleh masyarakat. Dalam Pemilu 2024, kita harus memilih pemimpin yang memiliki kualitas yang dapat ditiru. Selain itu, Jimly juga berpendapat bahwa ilmu tata negara harus direkonstruksi menjadi ilmu tata bangsa yang tidak hanya mencakup hukum tata negara, tetapi juga etika.

Pemilihan umum merupakan proses pemilihan pemimpin dalam negara republik Indonesia yang dilakukan setiap lima tahun sekali. Pada masa menjelang pemilu, publik selalu hangat membahas mengenai calon-calon pemimpin yang akan memimpin negara. Pemilu 2024 yang didominasi oleh pemilih dari generasi milenial menjadi sesuatu yang menarik karena perubahan pola-pola dalam berpolitik.

Perubahan pola ini didukung oleh teknologi yang mampu mempresentasikan situasi politik terkini dengan cepat dan responsif. Hal ini memungkinkan masyarakat untuk bebas dan terbuka dalam menyampaikan argumennya untuk menanggapi isu-isu politik. Namun, Pemilu 2019 menjadi tolak ukur pembelajaran karena banyaknya argumen yang memecah belah masyarakat dengan ujaran kebencian dan konten hoaks.

Oleh karena itu, segala sikap yang dituangkan dalam berpolitik perlu ditinjau dari segi etika. Etika dalam berpolitik menjadi hal yang sangat penting untuk menunjukkan

kedewasaan kita dalam berpolitik, terutama pada generasi milenial. Dalam pemilu, tentunya terjadi perbedaan dalam menentukan pilihan pemimpin yang diharapkan. Perbedaan ini menjadikan etika politik menjadi hal yang sentral karena penting untuk bisa saling menghormati satu sama lain.

Menurut data yang dihimpun oleh Narasi News Room melalui konten Instagramnya, sebanyak lebih dari enam ribu akun menyukai salah satu konten yang berisi gagasan salah seorang calon presiden yang disampaikan dalam acara Indonesia Millennial and Gen-Z Summit 2023 pada tanggal 24 November 2023. Gagasan tersebut membahas tentang sulitnya lowongan pekerjaan yang akan dihadapi oleh generasi mendatang. Konten tersebut menggunakan hipotesis bahwa jika lowongan pekerjaan semakin sulit, maka angka pengangguran di Indonesia akan meningkat.

Namun, para responden konten tersebut justru menguji kembali gagasan tersebut dengan praktiknya. Hal ini menunjukkan bahwa generasi milenial sudah bersikap sesuai dengan seharusnya, yaitu mengkorelasikan antara teori dan praktik. Dewasa ini, relevansi teori etika dalam kehidupan bermasyarakat sudah mulai berubah, tetapi belum secara masif. Masih banyak narasi-narasi kebencian yang muncul dari berbagai responden di media massa. Narasi-narasi tersebut digunakan untuk menyerang kandidat lain dalam rangka mendulang suara.

Seyogyanya, gagasan yang disampaikan oleh peserta pemilu haruslah mengandung nilai-nilai akademis dan humaniora. Dalam hal ini, masyarakat, terutama generasi milenial, harus lebih aktif lagi dalam menggaungkan gagasan yang positif. Hal ini bertujuan agar perbedaan pendapat dalam perdebatan tidak mengandung ujaran kebencian.

Upaya Preventif

Pemilu merupakan momen penting dalam sebuah negara demokrasi. Media massa memiliki peran penting dalam membentuk opini dan pandangan masyarakat, terutama di kalangan generasi milenial. Oleh karena itu, diperlukan upaya preventif untuk memastikan dukungan pada pemilu 2024 tetap berjalan dengan adil dan demokratis.

Upaya preventif yang dapat dilakukan untuk mencegah perpecahan antara pihak pro dan kontra dalam pemilu adalah sebagai berikut. Pertama, pendidikan politik. Pendidikan politik penting untuk meningkatkan pemahaman generasi milenial tentang proses pemilu, berargumen secara kritis, dan mendorong partisipasi yang sadar. Dengan pendidikan politik, generasi milenial dapat memahami pentingnya pemilu dan memilih pemimpin yang tepat.

Pendidikan politik dapat dilakukan melalui berbagai jalur, baik formal maupun informal. Pendidikan formal dapat diberikan melalui kurikulum sekolah, sedangkan pendidikan informal dapat diberikan melalui berbagai lembaga pendidikan nonformal, seperti LSM, organisasi kepemudaan, dan perguruan tinggi. Pendidikan politik yang berkualitas harus mampu memberikan pemahaman yang mendalam tentang proses pemilu, mulai dari tahapan pendaftaran calon, kampanye, pemungutan suara, hingga penghitungan

suara. Selain itu, pendidikan politik juga harus mampu mendorong generasi milenial untuk berargumen secara kritis dalam menyikapi isu-isu politik.

Kedua adalah faktualitas media. Media massa yang menekankan faktualitas dapat memberikan informasi yang akurat dan obyektif. Hal ini dapat mengurangi risiko penyebaran berita palsu dan ujaran kebencian yang dapat mempengaruhi opini pemilih. Media massa memiliki peran penting dalam membentuk opini publik. Oleh karena itu, media massa perlu menerapkan prinsip-prinsip jurnalisme yang baik, seperti akurasi, obyektivitas, dan imparsialitas. Media massa juga perlu meningkatkan kesadaran masyarakat untuk menyaring informasi yang diterima dari media. Masyarakat perlu kritis terhadap informasi yang beredar, dan tidak mudah percaya pada informasi yang tidak jelas sumbernya.

Ketiga yaitu partisipasi aktif. Partisipasi aktif generasi milenial dalam pemilu dapat memberikan representasi yang lebih baik dalam proses demokrasi. Dengan partisipasi aktif, generasi milenial dapat menyuarakan aspirasinya dan ikut menentukan masa depan bangsa. Partisipasi aktif generasi milenial dalam pemilu dapat didorong melalui berbagai cara, seperti memberikan pendidikan politik, menyediakan sarana dan prasarana yang memadai, serta menciptakan iklim yang kondusif bagi partisipasi politik.

Pemerintah, masyarakat, dan media massa perlu bekerja sama untuk memastikan bahwa upaya preventif tersebut dapat berjalan dengan efektif. Dengan demikian, pemilu 2024 dapat berjalan dengan adil dan demokratis, serta dapat menghasilkan pemimpin yang berkualitas.

Penutup

Pemilu 2024 di Indonesia diprediksi akan didominasi oleh generasi milenial dan Gen Z. Generasi ini memiliki pola perilaku politik yang berbeda dengan generasi sebelumnya, yaitu lebih kritis dan terbuka terhadap informasi politik. Hal ini dipengaruhi oleh faktor kulturalisasi, di mana generasi milenial tumbuh dan berkembang di era digital.

Perubahan pola perilaku politik generasi milenial ini memiliki relevansi dengan teori etika. Etika politik menjadi hal yang penting untuk menunjukkan kedewasaan dalam berpolitik, terutama pada generasi milenial. Dalam pemilu, tentunya terjadi perbedaan dalam menentukan pilihan pemimpin yang diharapkan. Perbedaan ini menjadikan etika politik menjadi hal yang sentral karena penting untuk bisa saling menghormati satu sama lain.

Oleh karena itu, diperlukan upaya preventif untuk memastikan dukungan pada Pemilu 2024 tetap berjalan dengan adil dan demokratis, sebagaimana telah disebutkan dalam tulisan ini. Diantaranya, pemerintah perlu meningkatkan pendidikan politik untuk generasi milenial. Pendidikan politik yang berkualitas dapat memberikan pemahaman yang mendalam tentang pemilu, sehingga generasi milenial dapat berpartisipasi secara aktif dan bertanggung jawab. Kemudian, media massa perlu meningkatkan faktualitas pemberitaan politik. Media massa yang mengedepankan faktualitas dapat memberikan informasi yang akurat dan obyektif, sehingga dapat mengurangi risiko penyebaran berita palsu dan ujaran kebencian. Yang paling utama, pemerintah dan masyarakat perlu mendorong partisipasi aktif

generasi milenial dalam pemilu. Partisipasi aktif generasi milenial dapat meningkatkan kualitas demokrasi di Indonesia.

Daftar Pustaka

- Amalia, S. and Hamidah, H. (2023). Pengejawantahan teori psikoanalitik pada etika bisnis. *Nominal Barometer Riset Akuntansi Dan Manajemen*, 12(1), 32-47.
<https://doi.org/10.21831/nominal.v12i1.52825>
- An, J., Kwak, H., Posegga, O., & Jungherr, A. (2019). Political discussions in homogeneous and cross-cutting communication spaces. *Proceedings of the International Aaai Conference on Web and Social Media*, 13, 68-79.
<https://doi.org/10.1609/icwsm.v13i01.3210>
- Anderson, I. and Kuswanto, K. (2021). Analisis faktor-faktor yang mempengaruhi probabilitas pelaksanaan hak politik pada pemilihan umum presiden tahun 2019 di kota jambi (pendekatan regresi logit). *JWP (Jurnal Wacana Politik)*, 6(2), 142.
<https://doi.org/10.24198/jwp.v6i2.32242>
- Arniti, N. (2020). Partisipasi politik masyarakat dalam pemilihan umum legislatif di kota denpasar. *Jurnal Ilmiah Dinamika Sosial*, 4(2), 329.
<https://doi.org/10.38043/jids.v4i2.2496>
- Fauzi, H. (2023). Budaya politik pemilih milenial (studi kasus pilkada kabupaten solok selatan tahun 2020). *Journal of Practice Learning and Educational Development*, 3(1), 89-94. <https://doi.org/10.58737/jpled.v3i1.98>
- Febriani, N. (2020). Preferensi media sosial generasi milenial pada tingkat pengetahuan calon legislatif. *Nyimak Journal of Communication*, 4(1), 89.
<https://doi.org/10.31000/nyimak.v4i1.2225>
- Febriany, F. and Dewi, D. (2021). Nilai-nilai pancasila dan dinamika etika politik indonesia. *Jurnal Pendidikan Indonesia*, 2(4), 690-695.
<https://doi.org/10.36418/japendi.v2i4.139>
- Febriyanto, S. and Firman, M. (2023). Napak tilas pemilihan kepala daerah indonesia: korelasi negara hukum yang demokratis dan amandemen uud 1945. *Jurnal Asosiasi Pengajar Hukum Tata Negara Hukum Administrasi Negara (Japhtn-Han)*, 2(1).
<https://doi.org/10.55292/japhtnhan.v2i1.65>
- Hemafitria, H., Novianty, F., & Fitriani, F. (2021). Partisipasi politik dalam pemilihan umum kepala daerah di desa perapakan kabupaten sambas. *Jurnal Pendidikan PKN (Pancasila Dan Kewarganegaraan)*, 2(1), 37.
<https://doi.org/10.26418/jppkn.v2i1.45310>
- Hemafitria, H., Novianty, F., & Fitriani, F. (2021). Partisipasi politik dalam pemilihan umum kepala daerah di desa perapakan kabupaten sambas. *Jurnal Pendidikan PKN (Pancasila Dan Kewarganegaraan)*, 2(1), 37.
<https://doi.org/10.26418/jppkn.v2i1.45310>
- Indrawan, J., Rosa, A., Ilmar, A., & Nathanael, G. (2021). Partisipasi politik masyarakat di era politik siber. *Journal of Political Issues*, 3(1), 1-12.
<https://doi.org/10.33019/jpi.v3i1.44>

- Komariah, K. and Kartini, D. (2019). Media sosial dan budaya politik generasi milineal dalam pemilu. *Aristo*, 7(2), 228. <https://doi.org/10.24269/ars.v7i2.1608>
- Nugraha, A., Wibowo, K., & Sjoraida, D. (2021). Penyuluhan komunikasi media mengenai literasi politik bagi kalangan generasi muda di era konvergensi. *Charity*, 4(2a), 38. <https://doi.org/10.25124/charity.v4i2a.4230>
- Riduwan, A. and Andayani, A. (2018). Peran akuntansi dalam pertanggungjawaban sosio-ekologi. *Jurnal Akuntansi Multiparadigma*, 9(2). <https://doi.org/10.18202/jamal.2018.04.9012>
- Sa'ban, L., Wijaya, A., & Doli, L. (2020). Meningkatkan partisipasi pemilih melalui komunikasi politik. *Jisip Jurnal Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik*, 9(2), 90-97. <https://doi.org/10.33366/jisip.v9i2.2227>
- Sulaeman, A. (2017). Demokrasi, partai politik dan pemilihan kepala daerah. *Cosmogov*, 1(1), 12. <https://doi.org/10.24198/cosmogov.v1i1.11857>
- Supit, G. and Wuryanta, A. (2021). Media sosial sebagai media politik dalam pilkada (studi kasus pemanfaatan media sosial dalam pilkada kabupaten sukabumi 2020). *Jurnal Ilmu Komunikasi Uho Jurnal Penelitian Kajian Ilmu Komunikasi Dan Informasi*, 6(3), 314. <https://doi.org/10.52423/jikuho.v6i3.17439>
- Susanto, R. and Irwansyah, I. (2021). Media sosial, demokrasi, dan penyampaian pendapat politik milenial di era pasca-reformasi. *Lontar Jurnal Ilmu Komunikasi*, 9(1), 65-77. <https://doi.org/10.30656/lontar.v9i1.3249>
- Wardhani, P. (2018). Partisipasi politik pemilih pemula dalam pemilihan umum. *Jupiis Jurnal Pendidikan Ilmu-Ilmu Sosial*, 10(1), 57. <https://doi.org/10.24114/jupiis.v10i1.8407>

Pemindahan Ibu Kota Negara: Pembangunan Kota Inklusif dan Berkelanjutan

Sandy Ratna Puspitaningrum¹, Chotib², & Husnul Fitri Sundoko³

¹Biro Perencanaan – Sekretariat Jenderal, Kementerian Perhubungan

^{1,2,3}Kajian Pengembangan Perkotaan - Universitas Indonesia

¹sandy.salsika@gmail.com, ²chotib.m@ui.ac.id ³husnul.fitri20@ui.ac.id

DOI: 10.32699/resolusi.v6i2.6096

Submitted: 2023-12-10, Revised: 2023-12-25, Accepted: 2023-12-27

Abstrak

Pembangunan Ibu Kota Negara (IKN) direncanakan sebagai kawasan representatif bagi penyelenggaraan pemerintahan dan bentuk transformasi budaya kerja yang extraordinary. Kawasan IKN menjadi model pembangunan kota-kota masa depan Indonesia menuju Indonesia yang adil dan makmur pada tahun 2045. Namun, perencanaannya harus berdasarkan kondisi sosial dan budaya masyarakat Indonesia yang sebenarnya. Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji perencanaan pembangunan IKN yang tidak hanya mengikuti kebijakan yang sedang tren tetapi dikaji secara mendalam dari segi kebutuhan pembangunan perkotaan yang inklusif bagi masyarakat. Metode penelitian yang digunakan adalah kualitatif dan berdasarkan studi pustaka. Hasilnya menunjukkan bahwa ruang-ruang interaksi sosial, bangunan publik, dan fasilitas yang disediakan menciptakan kohesi sosial sebagai representasi kemajuan bangsa. Kriteria pembangunan IKN didasarkan pada teori bentuk kota yang baik sebagai ukuran kinerja kota berdasarkan 7 dimensi kota yang baik. Dimensi-dimensi kota menjadi kriteria pembangunan perkotaan, yang menjadi acuan dalam merumuskan perencanaan IKN agar sesuai dengan tujuan dan harapan bersama kita untuk menyajikan kota yang inklusif bagi masyarakat.

Kata kunci: pemindahan ibu kota, IKN, good city form, dimensi kota

Abstract

The development of the Nation's Capital (IKN) is planned as a representative area for the implementation of government and a form of extraordinary work culture transformation. The IKN area is a model for the development of Indonesia's future cities towards a just and prosperous Indonesia in 2045. However, planning must be based on the real social and cultural conditions of Indonesian society. This research aims to examine the planning of the development of IKN that does not only follow a fashionable policy but is deeply studied in terms of the need of inclusive urban development for society. The research method in writing is qualitative and based on library research. The results show that social interaction spaces, public buildings, and the facilities provided create social cohesion as a representation of national progress. The criteria for the development of IKN are based on the good city form theory as a measure of city performance based on 7 dimensions of a good city. The dimensions of the city become criteria for urban development, which become a reference in formulating IKN planning so that it is in line with our common goals and hopes to present an inclusive city for the people.

Keywords: capital city relocation, IKN, good city form, city dimensions

Pendahuluan

Pembangunan Ibu Kota Negara (IKN) Indonesia melalui Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2022 dengan nama Nusantara dan mengalami perubahan melalui UU Nomor 21 Tahun 2023 tentang Perubahan UU IKN dilakukan akibat kondisi Kota Jakarta yang sudah melebihi kapasitas dan mengkhawatirkan, serta unsur filosofis berupa pemerataan pembangunan dan penciptaan penyelenggaraan pemerintahan yang efisien dan efektif. Pembangunan IKN akan menjadi "engine of growth" perekonomian di Pulau Kalimantan dan sekaligus sebagai "trigger" pemerataan pembangunan di seluruh Kawasan Timur Indonesia. Pembangunan ini akan memposisikan Indonesia secara strategis dalam sistem perdagangan dunia, rantai pasok logistik, aliran investasi, dan pengembangan teknologi. IKN merupakan cermin perkembangan peradaban bangsa yang modern berupa kota yang hijau dan berkelanjutan melalui visi "Kota Dunia untuk Semua". Pembangunan IKN menjadi pemicu transformasi sosial dan budaya bangsa menuju masyarakat adil dan makmur.

Pembangunan IKN juga dilakukan untuk menciptakan penyelenggaraan pemerintah yang kondusif serta pemerataan pembangunan ke seluruh Indonesia khususnya ke Kawasan Timur Indonesia (KTI). Kepadatan penduduk dan kesenjangan sosial ekonomi yang kurang merata serta terkonsentrasi di Pulau Jawa berakibat tidak meratanya pembangunan dan kesejahteraan di Indonesia. Pemerataan ini menjadi isu yang penting karena perputaran uang negara hampir 70% berada di Jakarta, padahal luas Jakarta hanya 0,003% dari total luas daratan Indonesia (Ayundari, 2022).

Desain rencana IKN melalui konsep smart city dikembangkan dengan berbagai teknologi canggih pendukung di dalamnya. IKN yang diharapkan menjadi kota yang sangat megah sebagai simbol kemajuan bangsa dan menjadi kota terbaik di dunia. Impian untuk IKN agar menjadi kota yang paling berbahagia mengalahkan kota-kota terbaik di dunia. Hal tersebut tentu akan bertolak belakang apabila tidak melakukan elaborasi secara mendalam terhadap kondisi riil masyarakat baik secara sosial, budaya, dan perekonomian. Pembangunan IKN perlu memperhatikan aspek sosial perekonomian, aspek etik-humanis-nya, dan kesiapan SDM.

Upaya pemerintah untuk mewujudkan Indonesia maju perlu dilakukan secara transformatif. Menuju jalan kemajuan tidak hanya ditempuh dengan pendekatan simbolik berupa pembangunan infrastruktur dan kota-kota kelas dunia. Pembangunan IKN sebagai kota masa depan yang transformatif diharapkan dapat mendorong terwujudnya transformasi bangsa, yaitu transformasi berbangsa dan berbudaya, transformasi bekerja, transformasi menuju masyarakat yang maju dan cerdas berbasis teknologi, dan transformasi bermukim. Tahapan-tahapan pembangunan perlu dikaji secara mendalam berbasis kondisi masyarakat sehingga transformasi yang diharapkan dapat terwujud.

Kondisi sosial perekonomian masyarakat Indonesia pada saat ini secara fundamental masih mengalami tekanan dan sulit keluar dari jebakan middle-income trap. Skenario

pertumbuhan ekonomi dengan fluktuasi pada setiap periode (5%, 4%, dan 3%), mengakibatkan Indonesia mengalami kesulitan untuk menjadi negara dengan kategori berpendapatan tinggi pada tahun 2045. Kemiskinan yang dialami masyarakat dan kondisi kualitas SDM dengan tingkat pendidikan yang masih rendah, juga menjadi faktor penting yang perlu diperhatikan pemerintah, apabila ingin mewujudkan transformasi bangsa menuju Indonesia maju.

Upaya mendorong terwujudnya transformasi menuju masyarakat yang maju dan cerdas berbasis teknologi melalui pembangunan IKN perlu dikaji ulang. Tujuan penerapan berbagai sistem teknologi dan fasilitas science and technology park di IKN sebagai pemicu terwujudnya transformasi masyarakat cerdas berbasis teknologi, akan sulit dicapai apabila tidak mampu menciptakan terwujudnya lingkungan inovasi dan pemulihan ekosistem TIK. Meskipun pada saat ini Indonesia mengalami pertumbuhan ekonomi digital yang signifikan di Asia, namun Indonesia lebih berperan sebagai konsumen teknologi daripada penghasil teknologi.

Pembangunan IKN diharapkan dapat menjadi pemicu terwujudnya perkotaan, permukiman, dan perumahan yang inklusif sebagai wujud transformasi bermukim. Pentahapan-pentahapan pembangunan perlu dipertimbangkan secara matang sehingga kehadiran IKN tidak menjadi faktor pemicu ketimpangan pembangunan perkotaan di Pulau Kalimantan dan terjadinya segregasi ruang perkotaan. Pembangunan IKN yang eksklusif dan revolusioner dapat menciptakan terjadinya segregasi sosial dan ruang perkotaan yang berdampak kepada peningkatan ketimpangan dan disintegrasi bangsa dan gagal menciptakan kota yang transformatif secara humanistik berdasarkan falsafah hidup berbangsa dan berbudaya.

Pendekatan-pendekatan pembangunan yang dilakukan di IKN perlu dikaji tidak sekedar jargon-jargon mengikuti fashionable policy dan theoretical concept, tanpa memperhatikan permasalahan mendasar di dalamnya, dalam jangka pendek menjadi beban perekonomian negara dan jangka panjang menciptakan ketimpangan dan disintegrasi bangsa. Berdasarkan latar belakang tersebut di atas, tujuan penulisan ini adalah menganalisis bagaimana seharusnya pembangunan IKN dilakukan supaya menjadi perkotaan yang humanis dan transformatif bagi pembangunan menuju Indonesia maju, dengan menempatkan manusia dan SDM di dalamnya sebagai faktor utama.

Metode

Tulisan ini menggunakan pendekatan penelitian deskriptif kualitatif yang bersifat interpretasi dengan mengkompilasi dari banyak sumber literatur baik yang merupakan data primer maupun sekunder. Tujuannya adalah untuk memberikan masukan terhadap kebijakan pembangunan IKN. Kajian ini dilakukan bersumber dari hasil kajian penyusunan jurnal akademik, pandangan dan opini para ahli yang memiliki kompetensi, maupun laporan

hasil survei dari berbagai pihak/instansi yang kredibel. Untuk memulai interpretasi data kualitatif, pertama-tama harus dipelajari segala sesuatu dari sudut pandang objek yang diteliti. Tulisan ini memiliki peran analisis kebijakan pemindahan ibukota, yang terutama difokuskan untuk perbandingan dan evaluasi berbagai strategi alternatif. Analisis ini ditujukan bagi aktor publik sebagai upaya untuk mengatasi berbagai masalah sosial yang timbul akibat kebijakan pemindahan ibukota yang diambil.

Tulisan ini mengacu pada dimensi kota dari buku *Theory of Good City Form* yang ditulis oleh Kevin Lynch dan membangun kota yang humanis dari konsep Jane Jacobs. Bentuk dan dimensi kota yang baik menurut (Lynch, 1984) dalam bukunya *Theory of Good City Form*, apabila kota tersebut dapat memenuhi kriteria dari vitality, sense, fit, access, dan control. Tiap-tiap kriteria tersebut sesuai dengan efficiency and justice, yaitu Meta Kriteria. Bentuk kota yang baik, harus terintegrasi secara baik dengan mengandung berbagai nilai-nilai di dalamnya. Hal tersebut penting untuk menjadikan kota tersebut mampu menjaga keberlangsungannya dan hubungannya dengan kota-kota lain. Bentuk kota yang baik senantiasa bersifat terbuka, fleksibel dan adaptif terhadap perkembangan waktu.

Aspek Penting Pemindahan Ibu kota Negara

Dari hasil penelaahan terhadap kajian-kajian dan literatur yang kredibel, dapat disimpulkan bahwa aspek-aspek penting yang perlu menjadi perhatian dalam pemindahan ibukota negara adalah aspek sosio-budaya, aspek geografis, aspek geopolitik dan hankam, aspek ekonomi, teknologi dan lingkungan.

Pertama, aspek geografis. Presiden Joko Widodo menyampaikan lima faktor utama yang menjadi dasar pemilihan Kalimantan sebagai lokasi Ibu Kota Negara, yaitu: (Kominfo, 2019): (1) risiko bencana alam yang minimal. Kalimantan memiliki risiko bencana alam yang lebih rendah dibandingkan Pulau Jawa, seperti banjir, kebakaran hutan, gunung berapi, tsunami, dan tanah longsor; (2) terletak di bagian tengah Indonesia, sehingga dapat dijangkau dengan mudah dari berbagai wilayah di Indonesia; (3) berdekatan dengan kota-kota besar seperti Balikpapan dan Samarinda, sehingga dapat memanfaatkan infrastruktur dan sumber daya manusia yang sudah ada; (4) memiliki infrastruktur yang relatif lengkap, seperti jalan, bandara, dan Pelabuhan; dan (5) tersedia lahan yang luas seluas 180 ribu hektar dan dikuasai pemerintah, sehingga dapat digunakan untuk pembangunan IKN. Jika dianalisis lebih lanjut, kelima alasan tersebut lebih cenderung berbasis pada pertimbangan geografis (Purnama & Chotib, 2023).

Konsep pembangunan kota baru IKN adalah Indonesia Sentris, mencakup pembangunan nasional yang bukan hanya dipusatkan di Pulau Jawa, melainkan dapat merata di seluruh Indonesia tanpa adanya disparitas. Letak Kalimantan secara geografis berada di tengah-tengah Indonesia menjadi simbol semangat untuk mewujudkan visi

Indonesia sentris dalam pembangunan ke depan. Sebagai representasi keadilan dan mendorong percepatan pengembangan wilayah Kawasan Timur Indonesia (KTI).

Kedua, aspek ekonomi, teknologi, dan lingkungan. Pemindahan IKN Nusantara adalah upaya pemerintah untuk mendorong perekonomian yang inklusif, karena IKN menjadi magnet pertumbuhan ekonomi baru yang akan menyebar ke luar dari Pulau Jawa. Dengan pemindahan Ibu Kota Negara ke provinsi yang memiliki konektivitas baik dengan provinsi lain, potensi untuk meningkatkan arus perdagangan di lebih dari 50% wilayah Indonesia dapat terwujud. Selain itu, tindakan ini diharapkan dapat mengurangi kesenjangan antar wilayah dengan memperluas skala perdagangan di luar Pulau Jawa. Ini akan menciptakan peluang investasi di Ibu Kota Negara dan provinsi sekitarnya, serta menghasilkan diversifikasi ekonomi yang mendorong pertumbuhan nilai tambah pada sektor non-tradisional di berbagai provinsi diluar Pulau Jawa.

Pada aspek teknologi dan lingkungan, pemerintah berkeinginan agar pembangunan IKN diarahkan pada konsep modern yang mengintegrasikan teknologi canggih dan berwawasan lingkungan. Pembangunan ibu kota baru diharapkan dapat menjadi pelopor dalam efisiensi energi, inovasi dan kreativitas yang mendukung keberlanjutan lingkungan. IKN akan mengusung gaya hidup rendah karbon yang efisien, fokus pada transportasi umum, menciptakan lingkungan perkotaan yang mendukung pejalan kaki, dan menjaga kelestarian alam. Mampu berkelanjutan dalam segala aspek, mulai dari metode konstruksi berkelanjutan, desain yang lebih hemat energi, pemanfaatan sumber energi terbarukan dalam sistem jaringan, hingga manajemen sampah yang berkelanjutan.

Ketiga, aspek sosiologi dan budaya. Bappenas melakukan penelitian menyeluruh mengenai gaya hidup dan kondisi kehidupan masyarakat setempat, melibatkan aspek-aspek sosial-budaya dan sosial-ekonomi yang membentuk identitas dan pola kehidupan mereka. Mereka menganalisis potensi masalah dan konsekuensi negatif yang dapat timbul akibat relokasi dan adanya IKN terhadap masyarakat setempat. Pemerintah merumuskan prinsip-prinsip panduan kebijakan sosial dalam rangka pembangunan IKN. IKN sebagai kota metropolitan diperkirakan akan meningkatkan peluang usaha dan pekerjaan, namun juga berpotensi menjadi pemicu konflik sosial dan kerawanan antar kelompok etnis. Pemindahan IKN diharapkan dapat memperkuat ketahanan ekologi, ekonomi, sosial, dan budaya masyarakat Kalimantan, sambil mencegah terpinggirkannya masyarakat lokal oleh pendatang. Pemindahan ASN ini diproyeksikan akan melibatkan keluarga dan pelaku ekonomi lainnya, dengan perkiraan jumlah mencapai 1,5 juta orang mendiami kawasan tersebut di masa depan. Harapan masyarakat adalah terwujudnya Pencapaian kesetaraan dalam kehidupan sehingga seluruh masyarakat Kalimantan dan, secara lebih umum, Indonesia dapat menikmati manfaat pembangunan IKN.

Pembangunan IKN: Kota Masa Depan Transformatif

Membangun ibu kota baru sebagai embrio kehidupan berbangsa dan bernegara secara transformatif tahap demi tahap tanpa meninggalkan akar budaya dan kehidupan berbangsa. Ibu kota baru dikembangkan dengan mempertimbangkan kondisi real kehidupan berbangsa secara transformatif menuju cita-cita kehidupan masa depan yang diinginkan. Beberapa prinsip transformasi yang dimaksud yaitu: transformasi bekerja, transformasi berbangsa dan berbudaya, transformasi menuju masyarakat yang maju dan cerdas berbasis teknologi, dan transformasi bermukim.

Pembangunan IKN diharapkan dapat meningkatkan budaya kerja aparatur pemerintah dengan sistem pengawasan yang terintegrasi. Perpindahan ibu kota diharapkan dapat merubah cara bekerja dan sistem bekerja yang selama ini kurang produktif menjadi lebih cepat, mengayomi, dan melayani. Nilai-nilai dasar Pancasila, kegotong-royongan, kejujuran, etos kerja, sikap toleransi, menjaga kehormatan dan martabat harus menjadi landasan budaya kerja. Ego sektoral yang membudaya dalam bekerja antar kementerian dan instansi menjadi penghambat bagi terwujudnya rencana besar bersama kehidupan bernegara. Transformasi bekerja harus dikembangkan berdasarkan nilai-nilai dasar bangsa secara bertahap berdasarkan kondisi yang ada.

Transformasi berbangsa dan berbudaya perlu didorong dalam kondisi prinsip-prinsip ideologi Pancasila sebagai landasan negara dan perspektif kehidupan, menjadi kurang diperhatikan oleh masyarakat Indonesia. Penggunaan Pancasila sebagai pedoman dalam kehidupan politik dan sosial mengalami penurunan signifikan sejalan dengan pengaruh yang semakin kuat dari arus globalisasi serta paham-paham radikalisme serta ideologi lainnya yang semakin berpengaruh terhadap cara berpikir dan perilaku masyarakat Indonesia (Siswanto, 2017). Pembangunan fasilitas ruang-ruang yang mencerminkan budaya nusantara di panggung nasional, lambang-lambang kemajuan bangsa yang menjadi perhatian bagi dunia, ruang publik, dan sarana edukasi perlu diwujudkan di kawasan IKN. Ibu kota negara sebagai bentuk transformasi berbangsa dan berbudaya jangan hanya di peruntukkan untuk kelompok dan golongan tertentu. IKN harus memperhatikan aksesibilitas yang seluas-luasnya bagi seluruh masyarakat tanpa terkecuali dengan tetap memperhatikan pertahanan dan keamanan nasional.

Transformasi menuju masyarakat yang maju dan cerdas merupakan agenda utama pengembangan IKN. Beberapa fasilitas yang akan dikembangkan adalah: (1) Science and technology district berupa fasilitas technology park, indonesia's center of excellence, nerves center and innovation center, dan lainnya; (2) Infrastruktur masa depan yang cerdas berupa autonomous car and logistic, infrastruktur terintegrasi dengan dukungan teknologi, cable car, logistic tunnel, drone delivery, dan lainnya; dan (3) Green and smart mobility berupa data gathering sensor, mobility command center, dan future mobility and system.

Transformasi bermukim yang akan dikembangkan di kawasan IKN perlu mengedepankan pendekatan smart living. Mewujudkan compact living yang terintegrasi dengan sistem transportasi perlu dikembangkan dengan tetap memperhatikan kondisi masyarakat.

Perlunya Pendekatan Humanistik yang Inklusif dan Transformatif

Secara konsep dan pendekatan, pembangunan IKN sudah berupaya melakukan elaborasi tematik berdasarkan kondisi geografis dan falsafah Bangsa Indonesia yaitu Pancasila. Konsep futuristik yang ditawarkan juga sebagai bentuk semangat kemajuan bangsa di masa depan yang akan menjadi percontohan pembangunan kota-kota di Indonesia. Namun yang perlu diperhatikan adalah belum adanya kajian pendekatan pentahapan pelaksanaan pembangunan secara transformatif. Kondisi sosial dan budaya bangsa Indonesia harus menjadi penentu pentahapan pembangunan yang harus dilakukan. Pembangunan IKN dengan berbagai mimpi futuristik yang ditawarkan tanpa memperhatikan transformasi sosial, budaya, ekonomi akan memberikan dampak negatif yang luar biasa. Fasilitas yang disediakan akan tidak efektif apabila tidak didasarkan pada perubahan sosial, budaya, dan perekonomian secara transformatif.

Kegagalan pembangunan ibukota di negara negara lainnya perlu dijadikan rujukan, khususnya yang mengalami kegagalan secara mendasar. Salah satu yang menjadi simbol kegagalan pembangunan ibukota baru adalah Negara Brazil pada saat pemindahan pusat pemerintahan dari Rio de Janeiro ke Brasilia. Keputusan pemindahan ke Brasilia semakin memperparah keadaan ekonomi di Brazil dan menimbulkan banyak permasalahan setelah beberapa tahun (Kelly, 2020). Pembangunan Brasilia mengalami kegagalan karena mengabaikan prinsip pembangunan kota dari sisi humanistik. Mendesain ibu kota baru yang penekanannya untuk mobil, bangunan, tapi mengabaikan sisi kemanusiaannya, akan mengalami berbagai permasalahan di kemudian hari. Lingkungan hunian bukan menjadi pertimbangan utama perencanaan grand desain dan pentahapan pembangunan Brasilia. Kehidupan di ibukota baru tidak menjadi perhatian dan titik berat gagasan perencanaan. Namun Brasilia di desain lebih kepada faktor bangunan, infrastruktur, dan fasilitas-fasilitas lainnya. Faktor humanistik cenderung diabaikan dan komunitas yang seharusnya menjadi pemilik kota tidak terbentuk sehingga kota gagal bertumbuh dan berkembang sesuai dengan yang dicita-citakan.

Pengembangan IKN dengan tujuan menciptakan kawasan kebanggaan melebihi kawasan-kawasan ibukota lainnya di negara lain harus dikembalikan kepada tujuan awalnya. Ibu Kota negara di pindahkan karena memiliki 3 (tiga) misi utama, yaitu (1) Daya dukung dan daya tampung Kota Jakarta yang sudah melebihi kapasitas untuk menciptakan penyelenggaraan pemerintah yang kondusif; (2) Pemerataan pembangunan ke seluruh Indonesia; dan (3) Transformasi Bangsa. Untuk itu pembangunan ibukota seharusnya

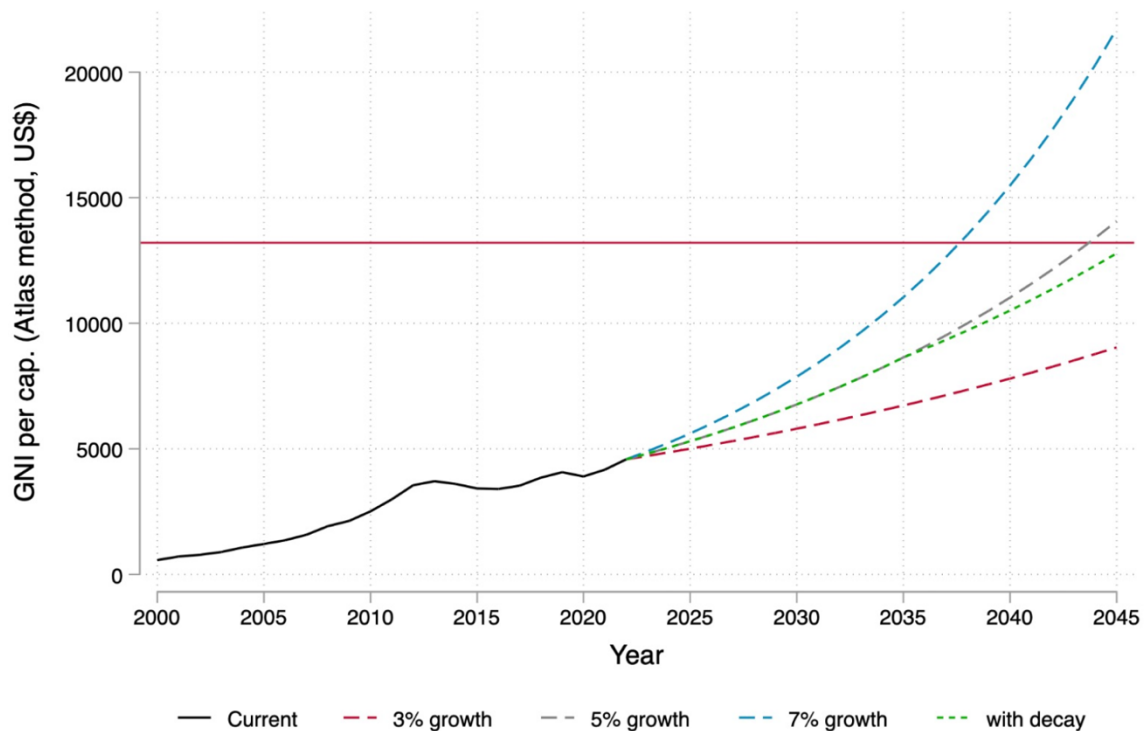
diintegrasikan dengan kebijakan-kebijakan aspek lainnya bukan hanya sekedar menjadi “proyek mercusuar” dengan mengabaikan urgensi kebijakan-kebijakan lainnya.

Menuju Indonesia Maju secara Transformatif

Menuju jalan kemajuan tidak hanya ditempuh dengan pendekatan simbolik berupa pembangunan infrastruktur dan kota-kota kelas dunia. Jalan kemajuan perlu memperhatikan kondisi perekonomian masyarakat. Indonesia dapat terperangkap pada middle income trap. Berdasarkan analisis negara lain apabila dibandingkan dengan Indonesia, menunjukkan Indonesia kurang mencapai kriteria yang diperlukan dan cukup untuk mencapai status negara yang tinggi pendapatannya, misalnya yang dialami oleh Cina, Brasil, Thailand, Korea Selatan, dan Malaysia pada masa awal mencapai kategori Pendapatan Menengah Atas.

Penting bagi pemerintah untuk memusatkan perhatian pada pembangunan kelas menengah yang tangguh dan inovatif, mengingat peran kelas menengah sebagai penggerak utama pembangunan jangka panjang. Alih-alih terfokus pada aspirasi menjadi negara maju, disarankan agar pemerintah lebih berfokus pada upaya mengatasi kemiskinan, mengurangi ketidaksetaraan, mempromosikan kesempatan yang setara, dan membangun kelas menengah yang kokoh, tahan lama, dan inovatif menjadi fokus utama. Secara historis, pertumbuhan ekonomi Indonesia pada tahun 2000 sampai dengan tahun 2018 hanya mencapai 5,3%, sedangkan pertumbuhan ekonomi pada periode 1980 sampai dengan tahun 1996 mencapai 6,4%, yang ditandai oleh kemajuan pada sektor industri manufaktur dan terjadinya liberalisasi ekonomi. Pertumbuhan ekonomi pada periode 1968 sampai dengan tahun 1979 mencapai 7,5% (Hidayat et al., 2018). Sesuai data historis pertumbuhan ekonomi Indonesia, dapat disimpulkan bahwa Indonesia akan mengalami kesulitan dalam meningkatkan angka pertumbuhannya seperti pada masa tahun 1968-1996, dengan angka pertumbuhan 6% - 7,5%.

Gambar 1: Proyeksi GNI Per-Capita Indonesia pada tahun 2023-2045



Sumber: (Nuryakin et al., 2023)

Catatan:

- * Dengan proyeksi penurunan, pertumbuhan ekonomi diantisipasi mencapai 5% hingga tahun 2035, diikuti pertumbuhan sebesar 4% dari tahun 2035 sampai 2040, serta pertumbuhan ekonomi 2041 sampai 2045.
- * Bank Dunia mengelompokkan negara-negara berdasarkan Pendapatan Nasional Bruto (GNI) per kapita:
 1. Lower Income Countries (LIC) sebagai kategori negara berpendapatan rendah : < US \$ 1,136
 2. Lower Middle-Income Countries (LMIC) sebagai kategori negara berpendapatan menengah bawah : US \$ 1,136 – US \$ 4,445
 3. Upper Middle-Income Countries (UMIC) sebagai negara berpendapatan menengah atas: < US \$ 4,446 - 13,385
 4. High Income Countries (HIC) sebagai negara berpendapatan tinggi; > US \$ 13,846.

Nuryakin et al., 2023, menggambarkan berbagai macam skenario dan proyeksi pertumbuhan ekonomi Indonesia untuk mencapai status negara berpendapatan tinggi. Dengan asumsi bahwa Pendapatan Nasional Bruto per kapita untuk negara berpendapatan tinggi sebesar US\$13.846 pada tahun 2023 dan pertumbuhan Pendapatan Nasional Bruto per

kapita sekitar 5% per tahun (sebanding dengan pertumbuhan ekonomi sebesar 6%), Indonesia diproyeksikan dapat mencapai status negara berpendapatan tinggi pada tahun 2044. Indonesia akan mencapai kategori negara berpendapatan tinggi pada tahun 2038, jika pertumbuhan GNI per kapita mencapai 7% per tahun, meskipun hal itu dianggap sulit untuk dicapai. Skenario pertumbuhan dengan fluktuasi pada setiap periode (5%, 4%, dan 3%), Indonesia kemungkinan besar tidak dapat menembus status HIC pada tahun 2045. Pengalaman negara-negara lain menunjukkan bahwa rata-rata pertumbuhan pendapatan sejak melewati batas negara berpendapatan menengah atas (UMIC) hingga tahun 2022 yaitu Cina 6,7%, Thailand 2,18%, Malaysia 2,94%, Korea Selatan 4,59%, dan Brasil 1,13%.

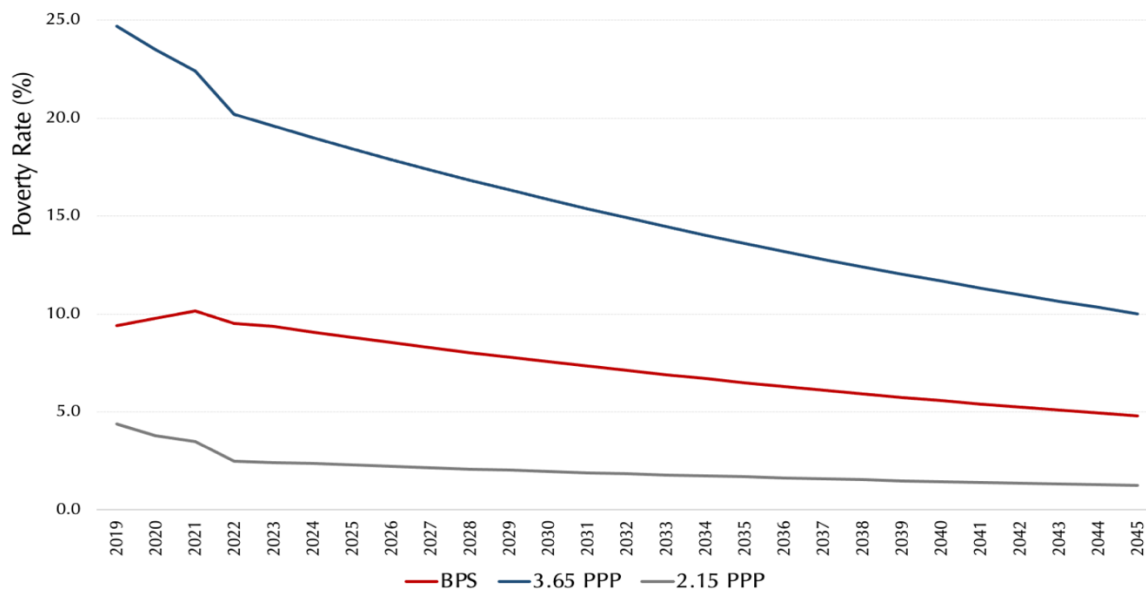
Mimpi Kemajuan di Tengah Kemiskinan

Skenario menuju Indonesia Emas 2045 banyak berfokus pada upaya mencapai status negara berpendapatan tinggi, namun terlupakan aspek yang sangat penting dalam pembangunan, yaitu meningkatkan taraf hidup dan kondisi kehidupan masyarakat kategori miskin serta mewujudkan pemerataan pembangunan. Pada tahun 2023, tingkat kemiskinan mencapai 9,36% (BPS, 2023), angka ini tidak mengalami perubahan yang signifikan selama 10 tahun terakhir bila dibandingkan pada tahun 2014 yang sebesar 11,25%.

Menurut (Nuryakin et al., 2023) gambar 2 menggambarkan bahwa sulit untuk mencapai angka 0% kemiskinan di Indonesia pada tahun 2045 (ukuran kemiskinan BPS (US\$ 2,15) maupun Bank Dunia (US\$ 3,65)). Upaya penurunan tingkat kemiskinan di Indonesia mengalami stagnasi akibat sebagian besar di antaranya merupakan masyarakat dengan kategori miskin kronis. Dalam penelitian yang dilakukan pada rumah tangga, sekitar 22,5% RT miskin pada tahun 1993 masih dalam kondisi miskin hingga tahun 2014. Fenomena kemiskinan yang dinamis dan tingkat kerentanan rumah tangga di Indonesia membuat pencapaian impian untuk mencapai tingkat kemiskinan 0% menjadi suatu tantangan yang sulit untuk direalisasikan.

Obsesi berlebihan terhadap pembangunan IKN dan perubahan arah kebijakan penyaluran sumber daya untuk mewujudkan impian Indonesia menjadi negara kaya pada tahun 2045 akan meningkatkan pertumbuhan ekonomi Indonesia melalui investasi yang cukup besar pada sektor padat modal, bukan padat karya yang lebih banyak menyerap tenaga kerja. Tingginya pertumbuhan ekonomi tidak selalu berdampak pada pengurangan kemiskinan secara signifikan, terutama jika sektor-sektor yang menjadi motor pertumbuhan tidak melibatkan secara aktif kelompok miskin dan rentan.

Gambar 2: Proyeksi Kemiskinan tahun 2024-2045



Sumber: (Nuryakin et al., 2023)

Kesiapan SDM untuk Menyambut Kemajuan

Dalam buku laporan white paper dari LPEM FEB UI (Nuryakin et al., 2023) menyampaikan bahwa sejak pertengahan tahun 2000-an, pemerintah telah melakukan perubahan kebijakan sektor pendidikan, dari sekedar peningkatan akses pendidikan menuju peningkatan akses terhadap pendidikan yang berkualitas. Walaupun telah diimplementasikan berbagai kebijakan dan meningkatnya anggaran Pendidikan setiap tahunnya, namun hasil yang dicapai belum sepenuhnya sesuai harapan. Sejak tahun 2000, Indonesia telah bersungguh-sungguh terlibat dalam Program for International Student Assessment (PISA) untuk mengukur pencapaian perkembangan kualitas pendidikan di Indonesia setiap tahunnya dan melihat perbandingannya dengan negara lain. Namun hasil yang dicapai belum optimal, pada kategori kemampuan membaca yang menunjukkan tren positif, mengalami penurunan seperti pada tahun 2018. Pada kategori kemampuan matematika dan sains juga mengalami stagnasi selama duapuluh tahun terakhir. Apalagi diperparah dengan terjadinya pandemi COVID-19, pada tahun 2022 pun akan mengalami penurunan lebih lanjut

Kualitas pendidikan di Indonesia sangat rendah dan juga mengalami ketidaksetaraan yang signifikan antar daerah. Siswa kelas 9 (tingkat 3 SMP) hanya dapat memberi jawaban sekitar 35,6% soal matematika yang paling dasar. Hanya sekitar 28-40% siswa berusia 15 tahun dapat mencapai tingkat kemampuan matematika yang minimal. Pemerataan

pendidikan juga masih belum optimal bila merujuk hasil ujian nasional pada tahun 2017, prestasi siswa SMP Jawa Tengah (Brebes) Sumatera Utara (Labuhan Batu Selatan), mengalami keterlambatan lebih dari 2 tahun jika dibandingkan dengan siswa SMP di Jawa Timur (Jombang dan Banyuwangi). Demikian halnya dengan prestasi siswa SMP Sulawesi Tengah (Donggala) bila dibandingkan dengan siswa SMP di Kota Malang mengalami keterlambatan lebih dari 5 Tahun.

Pada tingkatan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD), Indonesia masih terkendala dengan rendahnya partisipasi anak), khususnya pada kelompok usia 0-2 tahun (dalam Taman Penitipan Anak (TPA) sebesar 0,9%, kelompok usia 3-4 tahun sebesar 21 %, dan kelompok usia 5-6 tahun kategori pendidikan pra-sekolah sekitar 73%. Investasi Indonesia di dalam Taman Pendidikan Anak (TPA) dan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) masih dianggap kurang memadai. Indonesia termasuk negara yang mengalokasikan dana terendah pada sektor pendidikan usia dini, jika dibandingkan dengan negara-negara OECD. Alokasi anggaran untuk sektor kesehatan, pendidikan, dan ekonomi kreatif di Indonesia hanya sekitar 0,04% (seharusnya 1% sesuai rekomendasi OECD) dari total Produk Domestik Bruto pada tahun 2020.

Demikian halnya pada sector Kesehatan belum optimal dalam memberikan pelayanan Kesehatan bagi masyarakat. Kondisi sumber daya dan infrastruktur kesehatan di Indonesia menunjukkan tingkat keragaman yang mencolok. Hanya 48,9% puskesmas yang memiliki sembilan jenis tenaga kesehatan (nakes) yang sesuai dengan standar pada tahun 2021. Transformasi sosial, ekonomi, dan budaya masih mengalami tantangan berat secara struktural (Nuryakin et al., 2023).

Ekosistem TIK Indonesia dan Ketimpangan Pembangunan Perkotaan

Dalam (Nuryakin et al., 2023) menyampaikan bahwa Indonesia termasuk sebagai negara yang cukup signifikan di wilayah ASEAN mengalami pertumbuhan ekonomi digital. Berdasarkan kajian yang dirilis e-Conomy SEA pada tahun 2020, ekonomi digital Indonesia mengalami pertumbuhan sebesar 22% dengan transaksi mencapai USD 77 miliar. Proyeksi tahun 2025 menunjukkan bahwa sektor e-commerce Indonesia diharapkan mampu mencapai transaksi sebesar USD 95 miliar dan tumbuh sebesar 17% (Compounded annual growth rate (CAGR. Meskipun pertumbuhan ini memberikan indikasi optimisme terhadap kemajuan ekonomi nasional, perlu diingat bahwa kalkulasi ini tidak mencerminkan peningkatan nilai tambah hanya berdasarkan pada angka penjualan.

Pada aspek infrastruktur jaringan, kecepatan unduh internet di Indonesia masuk dalam kategori rendah di ASEAN, berdasarkan laporan Ookla, kecepatan unduh internet di Indonesia hanya mencapai 20,17 Mbps (Bestari, 2023). Daya saing digital Indonesia masih sangat rendah, menempati peringkat 51 dari 63 negara, masih jauh dibawah Thailand dan Malaysia (peringkat ke-31 dan peringkat ke-40). Indonesia juga masih mengalami

permasalahan pada isu perlindungan data dan keuangan digital. Keadaan geografis juga menjadi kendala kemajuan ekonomi digital di Indonesia yang berkarakteristik kepulauan. Hal ini mengakibatkan adanya disparitas tingkat digitalisasi di berbagai daerah, rendahnya keterampilan digital, dan kurangnya inovasi di kalangan pelaku industri. Berbagai masalah ini berkontribusi pada Indonesia yang lebih berperan sebagai konsumen teknologi daripada penghasil teknologi.

Pembangunan technology park telah menjadi a fashionable policy dan secara prinsip tidak selalu berorientasi kepada fasilitas. Belajar dari pengembangan kawasan-kawasan serupa di luar negeri, pengembangan technology park cenderung mengalami kegagalan akibat kawasan tidak berhasil menciptakan inovasi-inovasi baru yang bersumber dari lingkungan inovasi yang sejati. Peran universitas sebagai pencetak inovator-inovator secara integratif dengan kawasan harus menjadi prasyarat terwujudnya technology park yang berkelanjutan.

Mengutip dari buku *Technopoles of the World* karya dari (Castells, 1994), Sophia-Antipolis, di dekat Nice, adalah contoh klasik dari "A Technopolis" bahkan sebagai "The European Smart Site". Sophia Antipolis pada awalnya adalah usaha swasta yang diambil alih oleh Negara pada akhir 1970an dengan peningkatan Investasi hingga tujuh kali lipat antara tahun 1982 dan 1989. Sophia-Antipolis sukses di satu tingkat karena berhasil membuat kawasan yang berkembang dan cenderung prestige dengan harga lahan dan harga sewa yang tinggi, diisi perusahaan-perusahaan besar, tetapi sejauh ini ia belum berhasil menciptakan lingkungan inovasi yang sejati. Berbeda dengan "Cambridge phenomenon" yang berkembang dan telah sejajar dengan Silicon Valley, dan menjadi citra atau simbol dunia inovatif di seluruh dunia. Cambridge phenomenon menjadi menarik adalah bahwa kejadian itu terjadi di tempat yang agak tidak terduga. Cambridge terletak 50 mil (80 kilometer) utara-utara-timur London, di East Anglia: wilayah yang hingga tahun 1960-an, dianggap sebagai pedesaan terpencil, tetapi tiba-tiba menjadi wilayah dengan pertumbuhan tercepat Inggris. Keberhasilan kawasan ini berkembang akibat terwujudnya hubungan kawasan dengan universitas yang ada disana sebagai pencetak inovator-inovator yang berkontribusi menciptakan lingkungan inovatif di kawasan.

Pengembangan kawasan IKN harus belajar dari pengalaman negara-negara yang telah mengembangkan kawasan yang serupa. Pembangunan fasilitas tanpa memperhatikan SDM dan lingkungan inovatif itu sendiri akan mengakibatkan kegagalan pengembangan kawasan sesuai dengan tujuan yang dicita-citakan. Penerapan autonomous dan smart logistic didalam kawasan harus memenuhi prasyarat-prasyarat yang ada sehingga rancangan desain sesuai dengan hasil yang diharapkan.

Kota baru yang berkembang didorong dua faktor utama, yaitu spekulasi tanah oleh pengembang swasta dan pemberian izin tanah yang tidak terkendali untuk pembangunan perumahan. Akibatnya, pengalihan kepemilikan tanah secara besar-besaran dari pemilik tanah sebelumnya, utamanya dari petani miskin yang terpaksa memberikan tanahnya kepada

para pengembang kota baru yang didukung oleh pemerintah pada saat itu, dengan atau tanpa rugi yang adil. Mereka kemudian harus mencari mata pencaharian baru. Pengembang bersaing menguasai lahan secara spekulatif dengan dukungan birokrasi pemerintah yang cenderung tidak transparan. Pemanfaatan lahan di pinggiran kawasan metropolitan seringkali diwarnai oleh 'konflik' antara masyarakat pemilik lahan, pengembang, serta pemerintah daerah yang berujung dengan penggusuran penduduk yang telah lama tinggal di wilayah tersebut.

Ketidakadilan yang dialami oleh Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR) masih terkendala oleh keterbatasan fiskal pemerintah dan besarnya backlog dalam kepemilikan dan penghunian tempat tinggal. MBR yang bekerja di pusat kota menghadapi tantangan untuk mendapatkan hunian di area tersebut dengan akses yang terbatas. MBR cenderung mendiami ruang-ruang minor di perkotaan, yang berada di antara perumahan eksklusif. Pilihan tempat tinggal di kawasan-kawasan tersebut diambil oleh MBR karena dekat dengan tempat kerja atau peluang mendapatkan pekerjaan, terutama pekerjaan di sektor informal. Lingkungan dan kualitas tempat tinggal dianggap tidak terlalu krusial bagi MBR, selama masih bisa mendukung kehidupan. Hak-hak kepemilikan terutama hak milik atas tanah dan bangunan dianggap kurang signifikan, yang lebih esensial bagi mereka adalah dapat tetap tinggal tanpa dipaksa meninggalkan atau digusur, sesuai dengan pandangan mereka bahwa tempat tinggal merupakan suatu fasilitas yang mendasar.

Kriteria Pembangunan IKN yang Inklusif dan Humanis

Beberapa kriteria perlu menjadi perhatian yaitu dimensi vitality, dimensi sense, dimensi fit, dimensi akses, dan dimensi control. Pertama dimensi vitality. Kinerja vitality IKN yang baru diwujudkan untuk memastikan aspek-aspek yang menunjang ketahanan manusia dalam kehidupan perkotaan dan lingkungan huniannya. Ketersediaan prasarana, sarana, dan utilitas sebagai pembentuk struktur kota harus memiliki kinerja yang handal melalui aksesibilitas dan konektivitas dengan transportasi dan mobilitas berkelanjutan, infrastruktur ICT dan cerdas, infrastruktur kawasan, dan lainnya. Menciptakan ruang fisik kota berupa zoning settlement, network, dan terintegrasi dengan struktur kota. Mewujudkan kualitas lingkungan, dan akses universal terhadap fasilitas dasar. Sesuai dengan theory of good city form, upaya-upaya tersebut merupakan bagian dari peningkatan performance dimensi IKN pada aspek vitality untuk memenuhi standar untuk hidup dan berkehidupan khususnya pada kriteria sustenance (diantaranya terkait kualitas, ketersediaan serta kecukupan air, udara, makanan, dan energi).

Kedua, dimensi sense berperan penting sebagai ukuran bentuk kota yang baik. IKN sebagai pusat pemerintahan direncanakan dengan citra Indonesia sentris. Struktur IKN di rencanakan dipadukan dengan falsafah bangsa Pancasila dan fungsi pemerintahan sebagai trias politika. Pembentukan sumbu aksis dan hubungan peran fungsi eksekutif merangkul

legislatif dan yudikatif akan meningkatkan kinerja dimensi sense kota secara kuat. Aspek sense terkait kongruen dengan merencanakan kesesuaian antara struktur ruang dan struktur bukan ruang terlihat dari harmonisasi perletakan dan integrasi masterplan yang telah direncanakan. Kinerja aspek sense pada transparency bisa diperkuat dengan merencanakan ruang-ruang interaksi sosial dan komunitas dengan tujuan terwujudnya proses sosial dan alami yang terjadi di kawasan.

Ketiga dimensi fit. IKN selayaknya juga dikembangkan dengan melihat keserasian antara perilaku dan aktivitas sehari-hari masyarakat dengan situasi dan kondisi ruang yang mewadahi aktivitas tersebut. Hal ini secara teori merupakan upaya-upaya terencana dalam meningkatkan kinerja dimensi fit perkotaan. Perencanaan ruang publik tidak selalu harus dibangun dengan spektakuler dan mewah namun yang paling penting adalah dapat dipergunakan untuk menunjang kegiatan sehari-hari dan interaksi sosial antar masyarakat. Pembagian ruang dan zonasi disesuaikan dengan fungsi dan kegiatan kawasan yang direncanakan. Zona hunian harus memperhatikan perilaku masyarakat Indonesia dan karakteristiknya. Masyarakat Indonesia yang cenderung guyub dan berkarakteristik sosial yang tinggi dengan tradisi dan budaya serta keagamaan harus terwadahi dalam perencanaan ruang dan zonasinya. Masyarakat Indonesia dengan adat ketimuran sangat menjunjung nilai-nilai agama serta budaya dan harus memperhatikan hirarki ruang-ruang private dan publik. Masyarakat Indonesia cenderung sering mengadakan acara-acara bersama seperti pengajian, ibadah, pesta adat perlu di wadahi dalam rencana ruang khususnya hunian.

Masyarakat Indonesia juga memiliki sosialisasi yang tinggi antar tetangga dan cenderung hidup guyub satu dengan yang lainnya. Pemisahan secara jelas antar kelompok masyarakat akan merusak tatanan budaya dan tradisi yang telah bertahan berabad-abad. Masyarakat kita juga memiliki sifat gotong-royong dan sering bercengkerama sebagai bentuk interaksi sosial baik formal maupun non formal. IKN sebagai representasi seluruh budaya seoptimal mungkin harus mampu menjawab kebutuhan pelestarian dan peningkatan budaya dan karakteristik masyarakat Indonesia.

Keempat, dimensi access pada pembangunan IKN merupakan aspek yang sangat vital yang warganya memperoleh akses yang sangat mudah di segala bidang pekerjaan, pendidikan, transportasi, dan arus informasi. Transportasi dan telekomunikasi merupakan asset sentral daerah perkotaan sebagai bentuk ukuran. Kemudahan akses masyarakat terhadap seluruh layanan merupakan bentuk kinerja dimensi akses. IKN sebagai suatu transformasi kehidupan berbangsa dan berbudaya akan menekankan kepada kemudahan akses terhadap seluruh fasilitas dan layanan yang tersedia. Pengembangan sistem transportasi dan mobilitas cerdas yang berkelanjutan, sistem jaringan jalan yang terintegrasi, konektivitas darat, laut dan udara, pengembangan kota cerdas dan kemudahan akses informasi, dan kemudahan layanan lainnya menjadi upaya-upaya peningkatan kinerja access ibu kota negara baru.

Kelima dimensi control. Suatu kota dapat dikatakan baik, apabila memiliki pengontrolan yang pasti, responsif, serasi dengan penghuninya (baik untuk konteks waktu saat ini, maupun yang akan datang), dan sesuai dengan struktur permasalahan yang ada di lokasi tersebut. Ukuran-ukuran yang menentukan dan mempengaruhi suatu pengontrolan, bergantung pada konteks sosial & lingkungan dari tiap-tiap permukiman. Hal ini terjadi melalui proses pembinaan pada pelaksanaan good governance pada tingkat kota. Proses itu terjadi dipengaruhi oleh kondisi lingkungan strategis dan budaya masyarakat yang menciptakan kondisi perkembangan good governance dapat terjadi dengan baik. Faktor leadership sangat menentukan kinerja dimensi control dapat terwujud dengan melakukan pengontrolan secara cermat dan efektif dalam menentukan suatu penegasan, penyesuaian, toleransi dan adaptasi.

Apabila pengontrolan tidak cermat, maka yang akan terjadi adalah melemahnya fungsi kontrol, dan berdampak pada terjadinya sejumlah penyimpangan atas sejumlah aturan dan norma yang telah ditetapkan. Hal-hal tersebut juga terkait erat dengan peran dari pangkat, jabatan, kekuatan dan pengaruh sejumlah pihak di dalam suatu lokasi tertentu. Selain peningkatan SDM, dimensi control juga di dukung oleh sistem teknologi dan komunikasi dalam mendukung peningkatan pengontrolan yang responsif dalam menyediakan layanan bagi masyarakat. Penyediaan layanan sistem terpusat dengan dukungan data gathering sensor, mobility command center, integrated system, dan lainnya akan meningkatkan dimensi pengontrolan pada berbagai akses.

Selain itu, perlu juga prinsip efisiensi dan justice perlu dipertimbangkan. Efisiensi adalah suatu ukuran standar keseimbangan yang menghubungkan tingkat keberhasilan pada beberapa kinerja tertentu dengan suatu kegagalan pada beberapa kinerja yang lain. Efisiensi juga dapat diartikan sebagai suatu keseimbangan antara sesuatu yang dikeluarkan. Tolak ukurnya bisa bermacam-macam, diantaranya adalah terkait korelasi antara biaya dengan nilai-nilai tertentu. Efisiensi juga berhubungan dengan persoalan lingkungan, penggunaan dan pengolahan energi, sumber-sumber materi, kinerja politik, dan dampak-dampak serta sejumlah manfaat terkait suatu kondisi psikologi tertentu. Untuk menjaga agar prinsip efisiensi dapat berjalan dengan baik, maka diperlukan suatu instrumen untuk melindunginya. Instrumen tersebut adalah nilai keadilan. Nilai tersebut terkait erat dengan persoalan keseimbangan & persamaan hak maupun kewajiban bagi tiap-tiap orang, terkait hubungannya didalam suatu masyarakat atau antar kelompok masyarakat. Pada prakteknya, keadilan juga terkait dengan penentuan batas-batas kebebasan dalam bertindak dan penegakan hukum dalam menjaga hak individu, kelompok dan kepentingan. Pengembangan kota cerdas, smart governance and society, infrastruktur cerdas, kerakyatan cerdas melalui pelibatan masyarakat dan transparansi pembangunan, lingkungan cerdas melalui energi baru terbarukan, waste management system, serta bangunan cerdas merupakan upaya-upaya sistematis dalam peningkatan kinerja dimensi efficiency dan justice.

Pembangunan IKN untuk Masyarakat

Pengembangan IKN yang berorientasi hanya kepada kelompok masyarakat kelas atas dan para aparatur pemerintahan pusat akan menciptakan kota yang eksklusif dan cenderung menimbulkan ketimpangan baru. Kehadiran IKN di Kalimantan harus menjadi tempat tumbuh kembangnya seluruh lapisan masyarakat tanpa terkecuali menuju masyarakat yang maju dan cerdas. Mengembangkan sekat-sekat sosial dan golongan pada kawasan tertentu sangat bertentangan dengan Pancasila dan UUD 1945. Kota yang eksklusif akan cenderung tidak berkembang dan hanya menjadi tempat bekerja pada saat-saat hari kerja.

Transformasi bermukim perlu di kaji secara komprehensif untuk merumuskan tahapan pembangunannya dan dampak-dampak yang ditimbulkan. Pembangunan inklusif menggambarkan respon terhadap pendekatan pembangunan yang hanya berfokus pada pertumbuhan ekonomi semata, yang cenderung menguntungkan kelompok elit dan mengabaikan kepentingan kelompok miskin, marjinal, dan minoritas (Eka Noor, 2018). Hal ini mengakibatkan ketidaksejahteraan dalam akses pelayanan, penurunan kualitas pembangunan manusia, dan dapat menciptakan eksklusi sosial serta menyebabkan gejala disintegrasi bangsa dalam jangka panjang. Pengembangan hunian yang berpagar dengan sistem akses green fingers di kawasan akan berdampak kepada pengkotak-kotakan dan segregasi ruang dan sosial. Pembangunan ruang sosial dan terintegrasi hanya untuk sekelompok masyarakat akan menciptakan kecemburuan sosial dan berkembangnya faham radikalisme akibat rasa ketidakadilan. Mengelompokkan hunian ASN tanpa berinteraksi dengan masyarakat akan mereduksi sifat pelayanan dari aparatur itu sendiri. Mengkotak-kotak hunian berdasarkan jabatan akan berdampak kepada segregasi sosial dan mengurangi kohesi sosial.

Perlu menciptakan ruang-ruang sosial dan pejalan kaki tidak hanya secara fisik namun mampu menciptakan komunitas perkotaan yang berperan dalam menghidupkan kota. Komunitas berperan dalam pembangunan kota, bukan hanya sekedar objek dalam pembangunan. "Cities have the capability of providing something for everybody, only when they are created by everybody". - Jane Jacob (Erland, 2021). Jane Jacobs, seorang jurnalis Amerika Serikat, mengingatkan kita bahwa kota seharusnya dibangun untuk memberikan manfaat sebesar-besarnya bagi semua warganya dan sebagai ruang partisipasi bagi semua pihak dalam proses pembangunannya. Pembangunan IKN dilakukan seharusnya disusun berdasarkan rencana pengalokasian ruang untuk setiap kegiatan sebagai scenario untuk mencapai tujuan kota yang inklusif, adaptif, layak huni, dan berkelanjutan.

Perencanaan dan desain kota yang terlalu mengandalkan pertimbangan teknis dan matematis cenderung menciptakan lingkungan kehidupan yang kering, tidak bersifat manusiawi, dan kehilangan identitas. Pendekatan perencanaan dan desain kota yang "humanistik" menekankan penekanan pada modal sosial yang sudah ada. Jacobs menggambarkan konsep ini saat mengungkapkan bahwa kepadatan jaringan sosial yang tinggi di permukiman urban yang lebih tua, bersamaan dengan keberagaman penggunaan

lahan dapat dianggap sebagai modal sosial yang mendukung tingkat keamanan umum (Purwanto, 2012).

Pembangunan hunian di IKN harus juga representasi dari harapan bangsa serta perwujudan norma hukum yang berlaku. Pancasila merupakan dasar norma hukum paling dasar khususnya pada sila kelima “Keadilan Sosial Bagi Seluruh Rakyat Indonesia” dan sila kedua “Kemanusiaan yang Adil dan Beradab”, yang peraturan terkait perumahan rakyat harus mempertimbangkan hak dan kepentingan rakyat Indonesia, termasuk mereka yang dari kalangan atas, menengah keatas, menengah kebawah dan dari masyarakat berpenghasilan rendah. Hal tersebut harus dilakukan secara adil dan merata, terutama dalam penyediaan tempat tinggal yang memenuhi standar kelayakan dan kesehatan.

Menurut (Doxiadis, 1968) dalam teori permukiman dideskripsikan bahwa permukiman adalah sistem yang terdiri dari lima elemen, yaitu: alam, manusia, masyarakat, lingkungan dan jaringan. Pengembangan IKN tidak bisa diartikan secara sempit sebagai kawasan modern dengan fasilitas-fasilitas mewah, namun juga sebagai wadah transformasi masyarakat dari kondisi saat ini menjadi masyarakat yang maju dan cerdas.

Kesimpulan

Pengembangan IKN merupakan pekerjaan besar pemerintah yang bertujuan untuk peningkatan kinerja pemerintah melalui transformasi budaya kerja dan penyediaan fasilitas yang representatif bagi pelaksanaan kegiatan pemerintahan. Pemindahan IKN merupakan bentuk pemerataan pembangunan yang cenderung terkonsentrasi di Pulau Jawa. Konsep Pemindahan IKN yang dirancang oleh pemerintah, berkolaborasi dengan para pakar dan ahli, telah merumuskan konsep pendekatan ibu kota negara menyesuaikan dengan harapan dan cita-cita besar bangsa untuk mewujudkan kota masa depan yang menjadi model percontohan pengembangan perkotaan di Indonesia di masa depan.

Namun, konsep pengembangan yang dirumuskan masih terlalu fokus kepada pengembangan kawasan secara fisik dan cenderung dangkal dalam melakukan elaborasi terhadap isu dan permasalahan yang ada. Kita perlu mendukung pengembangan IKN dengan harapan terwujudnya suatu kawasan yang modern, dengan dukungan fasilitas berbasis teknologi mutakhir sebagai representasi kemajuan bangsa di mata dunia dan regional. Namun, grand desain kawasan tidak boleh mengesampingkan prinsip dasar dan tujuan pemindahan ibukota negara sebagai cita-cita besar berbangsa dan bernegara. Pembangunan IKN perlu dilakukan sebagai bentuk transformasi bernegara dan berbudaya secara bertahap sesuai dengan kondisi sosial, budaya, dan perekonomian bangsa.

Pembangunan IKN secara transformatif merupakan perwujudan pengembangan kawasan dengan menempatkan manusia sebagai faktor utama. Pengembangan IKN perlu dilakukan secara humanistik tanpa mengabaikan perlunya dukungan infrastruktur cerdas,

hunian yang cerdas, dan penerapan teknologi termutakhir. Pengembangan IKN sebagai antithesis dari perkembangan kota-kota di Indonesia yang berkembang cenderung menciptakan segregasi ruang dan sosial. Kota-kota berkembang dengan dipengaruhi globalisasi dan arus modal yang sangat kuat sehingga menciptakan kesenjangan antar masyarakat semakin dalam. Pengembangan IKN perlu dikembangkan secara inklusif tanpa membedakan kelompok dan golongan, baik yang miskin maupun kaya.

IKN sebagai representasi kemajuan bangsa harus memperhatikan kondisi riil masyarakat yang mayoritas masih hidup dalam kemiskinan dan terbelakang. IKN harus bisa diakses semua kelompok untuk bertransformasi bersama-sama menuju masyarakat yang cerdas dan maju. Transformasi bernegara dan berbudaya perlu diwadahi di kawasan IKN untuk menciptakan kemakmuran dan kemajuan bersama. IKN yang menjadi model masa depan pengembangan kota-kota di Indonesia perlu berorientasi kepada inklusifitas sebagai wadah menuju transformasi bersama menuju kepada kemajuan. Model pembangunan IKN akan diadopsi di seluruh kota-kota di Indonesia secara transformatif menuju cita-cita kemajuan bangsa menuju 2045. Indikatornya cukup jelas, apakah pembangunan IKN dapat menjadi model pembangunan perkotaan yang inklusif bagi kemajuan bangsa untuk diadopsi bagi kota-kota lainnya. IKN yang eksklusif hanya akan membebani anggaran pemerintah secara jangka pendek dan menciptakan kesenjangan pada jangka panjang yang berdampak kepada disintegrasi dan kerawanan sosial lainnya.

Pemodelan hunian sebagai unsur utama pembentukan kota dan menjadi faktor pembentuk kemajuan kota perlu dikaji lebih mendalam sehingga dapat menjadi model dan diadopsi sebagai pengembangan lingkungan hunian di kota-kota seluruh nusantara. Pembangunan perkotaan dan lingkungan hunian yang cenderung mengalami segregasi dan ketimpangan menjadi pekerjaan rumah yang cukup berat di masa mendatang. Pengembangan hunian di kawasan inti IKN dan di kawasan penyangga lainnya perlu menjadi perhatian kita bersama karena akan berpengaruh kepada keberlanjutan perkembangan kota tersebut. Perlu dilakukan kajian yang komprehensif transformasi bermukim berdasarkan kondisi riil masyarakat dan perkembangan kehidupan berbangsa serta bernegara secara jangka panjang

Daftar Pustaka

- Ayundari. (2022). *Urgensi Pemindahan Ibu Kota Negara*. Kemenkeu. Diakses dari <https://www.djkn.kemenkeu.go.id/kanwil-kalbar/baca-artikel/14671/Urgensi-Pemindahan-Ibu-Kota-Negara.html>
- Bestari, N. P. (2023). *Internet Indonesia Paling Lelet di Asia Tenggara*. CNBC Indonesia. Diakses dari <https://www.cnbcindonesia.com/tech/20230328065744-37-424983/internet-indonesia-paling-lelet-di-asia-tenggara>

- BPS. (2022). *Jumlah Kendaraan Bermotor Menurut Jenis Kendaraan (unit) di Provinsi DKI Jakarta 2020-2022*. BPS Provinsi DKI Jakarta. Diakses dari <https://jakarta.bps.go.id/indicator/17/786/1/jumlah-kendaraan-bermotor-menurut-jenis-kendaraan-unit-di-provinsi-dki-jakarta.html>
- BPS. (2023). *Profil Kemiskinan di Indonesia Maret 2023*. BPS. Diakses dari <https://www.bps.go.id/id/pressrelease/2023/07/17/2016/profil-kemiskinan-di-indonesia-maret-2023.html>
- Castells, M. (1994). *Technopoles of the World: The Making of 21st Century Industrial Complexes*. Routledge & CRC Press.
- Doxiadis, K. A. (1968). *Ekistics: an introduction to the science of human settlements*. (No Title).
- Eka Noor, Y. (2018). *Membangun Kota Inklusif, Meraih Kenyamanan Tinggal bagi Warga – Lembaga Ombudsman DIY*. Diakses dari <https://ombudsman.jogjaprov.go.id/membangun-kota-inklusif-meraih-kenyamanan-tinggal-bagi-warga/>
- Erland, A. K. (2021). *Humans of Urbanism: Jane Jacobs*. Medium. Diakses dari <https://medium.com/the-urban-condition/humans-of-urbanism-jane-jacobs-bd34380992ec>
- Hidayat, M. F., Saputro, A. N., & Maula, B. F. (2018). *Diagnosis Pertumbuhan Indonesia: Prioritas Strategi untuk Mendorong Pertumbuhan Ekonomi*. Direktorat Perencanaan Makro dan Analisis Statistik, Kementerian PPN/Bappenas.
- Hutasoit, W. L. (2019). Analisa pemindahan ibukota negara. *DEDIKASI: Jurnal Ilmiah Sosial, Hukum, Budaya*, 39(2), 108-128. <https://doi.org/10.31293/ddk.v39i2.3989>
- IMD, W. D. C. (2023). *Peringkat Daya Saing Digital Dunia 2023 – Sekolah bisnis IMD untuk kursus manajemen dan kepemimpinan*. Diakses dari <https://www.imd.org/centers/wcc/world-competitiveness-center/rankings/world-digital-competitiveness-ranking/>
- Kelly, J. (2020). The City Sprouted. *Consilience*, (22), 73-85.
- Kemenkes. (2022). *Profil Kesehatan Indonesia 2021*. Diakses dari <https://www.kemkes.go.id/id/profil-kesehatan-indonesia-2021>
- Kominfo. (2019). *Ibu Kota Negara Pindah ke Wilayah Penajam Paser Utara dan Kutai Kartanegara*. Kementerian Komunikasi dan Informatika RI. Diakses dari <https://www.kominfo.go.id/content/detail/20899/ibu-kota-negara-pindah-ke-sebagian-penajam-paser-utara-dan-sebagian-kutai-kartanegara/0/berita>
- Kurnia, E. (2023). *Menguji Kandungan Logam Berat Air Sungai Jakarta (1)*. *kompas.id*. 22 Sep 2023. Diakses dari <https://www.kompas.id/baca/metro/2023/09/22/menguji-kandungan-logam-berat-air-sungai-jakarta-1>

- Lynch, K. (1984). *Good City Form*. MIT Press.
- Nuryakin, C., Susanti, H., Rezki, J. F., Revindo, M. D., & Dartanto, T. (2023). *White Paper Dari LPEM Bagi Indonesia: Agenda Ekonomi dan Masyarakat 2024-2029*. LPEM - FEB - UI. Diakses dari <https://www.lpem.org/id/white-paper-dari-lpem-untuk-indonesia-arrah-ekonomi-dan-masyarakat-2024-2029/>
- Purnama, S. J., & Chotib, C. (2023). Analisis kebijakan publik pemindahan ibu kota negara. *Jurnal Ekonomi Dan Kebijakan Publik*, 13(2), 153-166. <https://doi.org/10.22212/jekp.v13i2.3486>
- Purwanto, E. (2012). *Relasi Rancangan Kota dan Anarki Warga*. Institutional Repository (UNDIP-IR).
- Siswanto. (2017). *Transformasi Pancasila Dan Identitas Keindonesiaan*. Diakses dari <https://123dok.com/document/yngr5nmp-transformasi-pancasila-identitas-keindonesiaan-transformation-pancasila-indonesian-identity.html>
- Sulistyono. (2022). Kerugian Ekonomi Dan Lingkungan Sebagai Dampak Kemacetan Transportasi Kendaraan Bermotor Pengguna Bbm Fossil. *Swara Patra: Majalah Ilmiah PPSDM Migas*, 12(2), 12-21. <https://doi.org/10.37525/sp/2022-2/274>

Transformasi Komunikasi Politik: Analisis Partai Politik Baru dalam Era Digital

Supartinah

Universitas Sains Al-Qur'an Jawa Tengah di Wonosobo
supartinah.unsiq@gmail.com

DOI: 10.32699/resolusi.v6i2.5989

Submitted: 2023-11-19, Revised: 2023-12-27, Accepted: 2023-12-28

Abstrak

Kontestasi Pemilu tahun 2024 akan dihadiri oleh empat partai politik baru, diantaranya Partai Buruh, Partai Gelora, Partai PKN dan Partai Ummat. Mereka akan melakukan fungsi sebagai komunikasi politik di Era Digital yang jelas sangat berbeda dengan komunikasi politik konvensional. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk melihat bagaimana partai politik baru melakukan transformasi komunikasi politik di era digital. Metode yang dilakukan pada penelitian ini adalah metode Analisis Data Sekunder (ADS). Metode ini dilakukan dengan cara mencari sumber data sekunder dari model komunikasi yang akan dilakukan oleh partai baru tersebut untuk selanjutnya dilakukan analisis perihal bagaimana partai baru dalam beradaptasi terkait perubahan model komunikasi politik di era digital. Sumber data bersumber dari Internet, berita, buku, artikel ilmiah, website dan juga media social yang dimiliki oleh empat partai baru tersebut. Hasil dari penelitian ini menunjukkan dari keempat partai tersebut menjadi suatu keharusan dalam merubah model komunikasi politik yang konvensional menjadi model komunikasi politik yang dapat memanfaatkan digitalisasi. Hasil lain menunjukkan bahwa keempat Partai baru tersebut memanfaatkan social media sebagai sarana komunikasi politiknya dalam proses mendapatkan simpati dan kepercayaan dari masyarakat.

Kata kunci: komunikasi politik, digitalisasi, partai politik baru

Abstract

The 2024 election contestation will be attended by four new political parties, including the Labor Party, Gelora Party, PKN Party, and Ummat Party. They will function as political communication in the Digital Era, which is very different from conventional political communication. This research aims to see how new political parties transform political communication in the digital era. The method used in this research is the Secondary Data Analysis (ADS) method. This method is carried out by looking for secondary data sources from the communication model to be carried out by the new party and then analyzing how the new party adapts to changes in the political communication model in the digital era. Data sources come from the Internet, news, books, scientific articles, websites, and social media owned by the four new parties. The results of this study show that the four parties have become necessary in changing the conventional political communication model to a political communication model that can take advantage of digitalization. Other results show that the four new Parties utilize social media as a means of political communication to gain public sympathy and trust.

Keywords: political communication, digitalization, new political parties

Pendahuluan

Pemilihan umum merupakan pertarungan antara partai-partai politik yang bersaing memperebutkan suara rakyat. Partai politik menggunakan berbagai cara untuk memenangkan suara dalam pemilihan umum. Berbagai persiapan dilakukan dengan serangkaian strategi yang berhasil dikembangkan sejalan dengan visi dan misi partai. Strategi dalam komunikasi politik sendiri merupakan serangkaian keputusan kondisional saat ini mengenai tindakan yang akan dilakukan untuk mencapai tujuan politik di masa depan (Novitasari et al., 2019). Agar dapat dukungan masyarakat, partai politik harus mampu meramu komunikasi dengan baik, sehingga masyarakat terpengaruh dan menentukan pilihannya ke salah satu partai (Laila et al., 2021).

Era digital telah membawa perubahan mendasar pada berbagai aspek kehidupan manusia, dan salah satu perubahan yang paling terlihat adalah dalam dunia politik. Derasnya arus internet dengan disertai kemudahan dan kenyamanan yang ditawarkannya telah mengubah model komunikasi masyarakat Indonesia (Nofiard, 2022). Selain itu di Indonesia, perihalan kemajuan teknologi informasi juga telah memainkan peran penting dalam mentransformasi komunikasi politik. Sejalan dengan tuntutan Revolusi Industri 4.0 yang mengharuskan masyarakat serba digital, masyarakat Indonesia sudah mulai beradaptasi dengan kebutuhan tersebut.

Jika melihat kondisi saat sekarang ini, perilaku masyarakat Indonesia telah berubah dalam hal aktivitas ekonomi, sosial, kebudayaan, dan politik sebagai akibat dari perubahan mode komunikasi ini. Perhatian yang besar yang ditunjukkan oleh masyarakat Indonesia terhadap Internet dalam aktivitas politik memberikan inspirasi bagi politisi nasional untuk mengembangkan komunikasi politik di dunia digital (Nofiard, 2022). Dengan membagikan informasi, kebebasan membuat ruang digital menjadi tempat yang baik bagi politisi untuk menyampaikan kepentingannya dan meningkatkan kepercayaan publik. Media dan ruang digital akan memungkinkan pergerakan politik yang diperlukan oleh partai politik (Bachini et al., 2022).

Salah satu elemen penting dalam kehidupan politik adalah komunikasi politik. Melalui komunikasi politik, partai politik dapat menyampaikan pesan politiknya kepada masyarakat dan mendapatkan dukungan mereka. Dalam era digital, komunikasi politik mengalami transformasi yang signifikan. Pada kenyataannya era digital yang difasilitasi oleh internet mampu memberikan dampak yang cukup besar terhadap perpolitikan di beberapa negara. Salah satu contoh yakni 'kebangkitan Dunia Arab' atau yang lebih dikenal dengan Arab Spring tahun 2010. Dalam peristiwa itu, Internet terutama media sosial terbukti memfasilitasi mobilisasi massa untuk menumbangkan rezim otoriter di Tunisia, Mesir, Bahrain, Turki, dan lain sebagainya (Khamis, 2013). Di Asia, salah satu contoh kesuksesan media sosial dalam memfasilitasi gerakan kolektif di antaranya terjadi di Hongkong. Gerakan sosial yang disebut Gerakan Payung (*Umbrella Movement*) dilakukan setengah juta pelajar menuntut demokrasi di Hongkong kepada Beijing (Druzin & Li, 2015). Sementara itu, di Amerika Serikat, kemenangan Obama 2007-2008 membuktikan efektifitas Internet dalam memfasilitasi

komunikasi politik antara elite dengan sipil yang salah satunya menjadi penentu kemenangan calon presiden dari ras marginal di Amerika yakni kulit hitam (Edge, 2010).

Fenomena yang terjadi merupakan salah satu dampak nyata bagaimana transformasi komunikasi politik yang telah terjadi di era digital saat sekarang ini. Ruang digital telah masuk secara dalam terhadap proses politik yang ada di Indonesia, tidak terkecuali bagaimana aktivitas komunikasi politik dalam membuat citra di ruang digital agar lebih dikenal dan mendapat simpati dari masyarakat. Saat ini transformasi komunikasi politik di era digital juga mengalami dinamika perubahan yang menarik untuk terus dikaji, karena karakter media baru dalam hal ini internet yang menentukan perubahan pola komunikasi politik diantaranya langsung (*direct*), murah (*low cost*), kecepatan (*speed*), interaktif, desentralisasi yang mendekonstruksi komunikasi politik yang semula satu arah menjadi dua arah, *top down* menjadi *bottom up* dan elitis menjadi non-elitis (Hasfi, 2019). Komunikasi politik di era digital juga dipengaruhi oleh penentuan Bahasa, karena Bahasa memiliki fungsi khusus dalam komunikasi politik: bahasa digunakan untuk mengkomunikasikan dan mengomentari masalah politik, tetapi di atas semua itu, bahasa bertujuan untuk membujuk dan memenangkan pendukung politik (Mikołajczyk & Aptacy, 2023)

Bagi Indonesia yang akan menyelenggarakan pemilu tahun 2024 mendatang, komunikasi politik menjadi hal yang akan menentukan untuk mendapatkan suara dari masyarakat (Suryadi et al., 2021). Sebelumnya, aktivitas komunikasi politik membutuhkan banyak medium untuk menyampaikan pesan politik. Namun, saat ini, media digital telah menjadi lebih dari sekedar kemajuan dalam proses pelaksanaan komunikasi politik. Saat ini komunikasi politik yang memanfaatkan media digital berfungsi sebagai tempat utama dimana para aktor politik bersaing untuk mendapatkan sebanyak mungkin dukungan suara. Selain itu, media digital juga berfungsi sebagai tempat yang mudah diakses masyarakat untuk berbagi informasi dan komunikasi politik.

Melihat kondisi dan fenomena yang ada saat sekarang ini, sudah saatnya tokoh politik dan partai politik harus mampu memanfaatkan sarana komunikasi politik yang baru dengan memanfaatkan digitalisasi yang ada. Peserta yang masif, partai dan penyelenggara yang luar biasa banyak, partai baru yang dan pendukungnya yang sangat banyak hingga ekosistem politik domestik pendukung yang besar, menyebabkan adanya proses ekonomi yang berputar di antara para pihak (Barokah et al., 2022).

Partai-partai baru kembali muncul di Indonesia, dan mereka akan turut berpartisipasi dalam pemilihan umum tahun 2024. Berikut data partai baru yang ikut dalam kontestasi pemilu tahun 2024 mendatang pada table 1.

Table 1. Daftar Partai baru dalam Pemilu 2024

Partai Politik	Resmi terbentuk	Ketua Partai	Nomor Urut Pemilu 2024
Partai Buruh	5 Oktober 2021	Said Iqbal	6
Partai Gelombang rakyat Indonesia (Gelora)	28 Oktober 2019	Anis Matta	7
Partai Kebangkitan nasional (PKN)	28 Oktober 2021	Anas Urbaningrum	9
Partai Ummat	29 April 2021	Ridho Rahmadi	24

Sumber: Diolah peneliti dari berbagai sumber di Internet, 2023

Tabel 1 diatas menunjukkan partai baru yang akan mengikuti pemilu tahun 2024 nanti. Peneliti merangkum dari beberapa sumber yang kredibel dan dapat dipercaya di Internet. Peneliti juga membatasi perihal definisi Partai Baru adalah Partai yang baru mengikuti Pemilu atau baru kembali lagi untuk mengikuti Pemilu 2024 nanti. Terkhusus untuk Partai Buruh sebenarnya bukan partai baru, karena tahun 1999 telah mengikuti Pemilu dengan nama partai “Partai Buruh Nasional” dan resmi didirikan pada 28 Agustus 1998. Kemudian, dalam pemilu 2004, partai ini berubah nama menjadi “Partai Buruh Sosial Demokrat” dengan nomor urut 2. Pada pemilu 2009, partai ini kembali mengikuti kontestasi pemilu yang ada di Indonesia. Setelah absen dari pemilu pada 2014 dan 2019, Partai ini kembali berkiprah dalam politik nasional melalui deklarasi hasil kongres yang digelar pada tanggal 4-5 Oktober 2021 di Jakarta dan sepakat untuk mendaftarkan diri mengikuti Pemilu tahun 2024 dengan nama “Partai Buruh” (Sari, 2023). Berbeda dengan partai Gelora, Partai PKN dan Partai Ummat, yang benar-benar baru pertama kali mengikuti pemilu 2024 nanti. Batasan definisi Partai baru yang dilakukan penulis merujuk bagaimana nantinya partai tersebut melakukan transformasi komunikasi politik bagi setiap partainya di era digital dalam menghadapi pemilu 2024 yang sudah pasti berbeda dengan than-tahun sebelumnya jika sudah pernah mengikuti pemilu pada periode tertentu.

Pada dasarnya, partai politik baru memiliki taktik dan pendekatan unik untuk menarik simpati masyarakat sekaligus menggerakkan perubahan untuk menghapus kekecewaan dan kebosanan masyarakat terhadap partai politik yang dianggap korup dan manipulatif. Jika ini dapat dicapai, partai baru akan memiliki peluang lebih besar untuk mengumpulkan suara dan memperoleh kepercayaan publik. Jika mereka tidak memiliki pendekatan yang tepat, partai hanya akan menjadi *staging point* dalam pemilu. Seperti yang dijelaskan dalam bukunya (Marijan, 2010) mengatakan bahwa kemunculan partai-partai politik baru di Indonesia selain didasarkan pada masyarakat yang pluralistik, yang terutama ditopang oleh demokrasi, demokrasi merupakan kondisi yang berlangsung dan berkelanjutan.

Munculnya partai-partai politik baru di era disrupsi menuntut parpol menyesuaikan strategi branding politic-nya dengan era ini (Barokah et al., 2022). Partai Politik harus sepenuhnya memanfaatkan dunia maya sebagai platform untuk mempromosikan partai mereka melalui media sosial. Ini berpotensi menyebabkan perang media sosial di antara partai politik. Berbagai jenis situs media sosial, juga dikenal sebagai "medsos", tidak

diragukan lagi akan memanas dan bergejolak. Karena itu, di era disrupsi saat ini, media sosial mulai digunakan sebagai alat komunikasi politik oleh para elit, terutama partai politik baru.

Strategi komunikasi politik yang tepat di era digital merupakan salah satu bentuk transformasi komunikasi politik yang ada bagi setiap partai politik yang akan mengikuti pemilu 2024 nanti. Terutama partai politik yang baru, karena mereka akan lebih masif dalam melakukan pengenalan kepada masyarakat dan untuk dapat merebut suara dari masyarakat yang mana sudah memiliki preferensi kepada partai yang sudah lama eksis di Indonesia. Perlu upaya-upaya yang keras dan cerdas bagi setiap partai yang baru dalam branding partainya dan juga mendapatkan simpati dari masyarakat.

Ada beberapa alasan yang menurut peneliti menarik dalam mengkaji permasalahan ini, diantaranya: (1) Perubahan Lanskap Politik: Selama era komputer dan internet, cara masyarakat berpartisipasi dalam politik telah berubah. Komunikasi politik sekarang mencakup platform online seperti media sosial, situs web, dan aplikasi pesan, daripada pertemuan tatap muka atau iklan di media konvensional. Jika partai politik baru menyadari perubahan ini, mereka dapat memperoleh dukungan dan mempengaruhi pemilih; (2) Partisipasi masyarakat: Penggunaan teknologi digital membuat masyarakat lebih terlibat dalam proses politik. Melalui media sosial, mereka memiliki kemampuan untuk menyuarakan pendapat mereka, menyebarkan informasi, dan berpartisipasi dalam perdebatan politik. Pertanyaan penting adalah bagaimana partai politik baru menghadapi tantangan dan peluang ini; (3) Kompetisi politik yang kKeras: Indonesia memiliki kompetisi politik yang ketat di mana partai politik berlomba-lomba untuk mendapatkan dukungan pemilih. Partai politik baru harus memahami dan memanfaatkan alat-alat digital dengan cermat untuk mendapatkan keunggulan kompetitif di tengah persaingan saat ini; (4) Dampak sosial dan politik: Kehidupan politik dan sosial masyarakat sangat dipengaruhi oleh cara komunikasi politik berubah di era digital. Ini termasuk cara pemilih mendapatkan informasi, cara masalah politik berkembang, dan cara masyarakat terlibat dalam pengambilan keputusan politik. Penelitian ini dapat memberikan pemahaman yang bermanfaat tentang perubahan ini.

Maka dari itu, penelitian ini bertujuan untuk menyelidiki bagaimana partai politik baru di Indonesia beradaptasi dan memanfaatkan media sosial dan teknologi digital dalam komunikasi politik mereka, serta bagaimana perubahan ini memengaruhi pola interaksi antara partai politik dan pemilih. Melalui pemahaman mendalam tentang transformasi komunikasi politik dalam era digital, penelitian ini akan memberikan wawasan yang berharga tentang dinamika politik di Indonesia dan mungkin juga di negara-negara sejenis. Hasil penelitian ini juga diharapkan dapat bermanfaat bagi partai politik baru dalam mengembangkan strategi komunikasi politik mereka di era digital saat ini.

Tinjauan Pustaka

Sebagai suatu negara yang menggunakan sistem demokrasi, merupakan sebuah keniscayaan tanpa adanya kehadiran partai politik. Secara definisi partai politik adalah suatu

kelompok yang terorganisir, yang anggota-anggotanya mempunyai orientasi, nilai-nilai, dan cita-cita yang sama, tujuannya untuk memperoleh kekuasaan politik dan merebut kedudukan politik dengan cara konstitusional (Budiardjo, 2008). Selain itu Fungsi partai politik juga terdiri dari beberapa, diantaranya: sebagai sarana komunikasi politik, sebagai sarana sosialisasi politik, sebagai sarana rekrutmen politik, sebagai sarana pengatur konflik. Sebagai partai politik yang baru, sarana komunikasi politik harus bisa diatur sedemikian rupa agar mampu membuat masyarakat percaya dan yakin.

Komunikasi politik biasanya melibatkan percakapan politik atau pesan verbal atau non-verbal yang dapat memengaruhi baik individu maupun pemerintah yang tergabung dalam sistem politik. Berdasarkan definisi yang dijelaskan oleh Dahlan dalam (Cangara, 2016) komunikasi politik merupakan bidang atau disiplin yang menelaah perilaku dan kegiatan komunikasi yang bersifat politik, mempunyai akibat politik, atau berpengaruh terhadap perilaku politik.

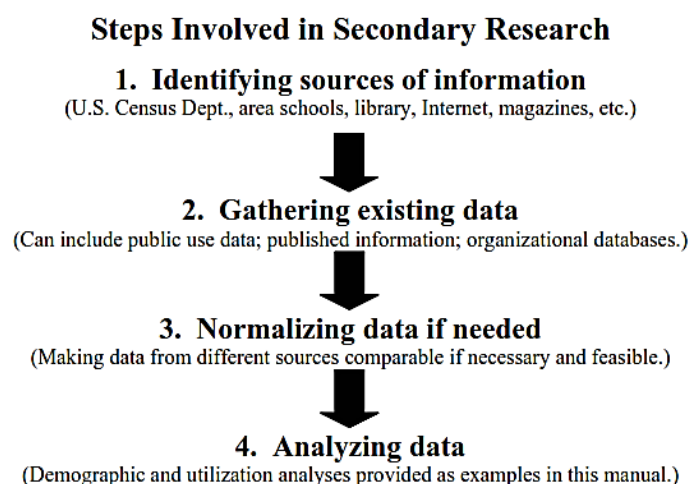
Seperti yang dijelaskan oleh R. M. Perloff dalam (Mufti, 2012) mendefinisikan komunikasi politik sebagai proses yang mendorong pemimpin, media, dan warga negara bangsa bertukar dan menyerap makna pesan yang berhubungan dengan kebijakan publik. Komunikasi politik menurut McNair (Cangara, 2016) memiliki lima fungsi dasar yakni: (1) Memberi tahu masyarakat tentang peristiwa yang terjadi di lingkungan mereka. Untuk alasan ini, media komunikasi diharapkan memiliki kemampuan untuk mengamati dan mengawasi peristiwa yang terjadi dalam masyarakat; (2) Mendidik masyarakat terhadap arti dan signifikansi fakta yang ada. Para jurnalis diharapkan melihat fakta yang ada, sehingga berusaha membuat liputan yang objektif (*objective reporting*) yang bisa mendidik masyarakat atas realitas fakta tersebut; (3) Menempatkan diri sebagai platform untuk menampung masalah politik sehingga mereka dapat menjadi wacana yang membentuk pendapat publik dan mengembalikan pendapat tersebut kepada masyarakat; (4) Membuat publikasi yang ditujukan kepada lembaga politik dan pemerintah; (5) Media politik berfungsi sebagai saluran advokasi dalam masyarakat demokratis, membantu media massa memahami kebijakan dan program lembaga politik.

Metode

Metode yang dilakukan adalah Metode Analisis Data Sekunder (ADS) atau terkadang disebut singkat dengan Metode Penelitian Sekunder. Secara definisi ADS adalah pendekatan penelitian yang digunakan untuk memeriksa data yang telah dikumpulkan atau sudah tersedia sebelumnya (Andrews et al., 2015). Analisis Data sekunder merupakan suatu strategi penelitian yang memanfaatkan data kuantitatif ataupun kualitatif yang sudah ada untuk menemukan permasalahan baru atau menguji hasil penelitian terdahulu (Heaton, 2011). Manfaat dari data sekunder selain lebih efisien waktu juga dengan menggunakan teknik analisis mendalam yang tepat untuk mendapatkan informasi yang diinginkan dari tubuh materi atau data yang sudah matang yang dikumpulkan dari organisasi atau lembaga, serta dari internet.

Metode analisis data sekunder tersebut mencakup dua proses pokok, yaitu mengumpulkan banyak data dan menganalisis sekian banyak data tersebut. Namun agar penelitian tidak menyimpang dan tujuan awalnya, peneliti harus merumuskan tujuan penelitian dan desain penelitian terlebih dahulu, sehingga data yang dikumpulkan bisa terinventarisir dengan baik. Untuk lebih jelasnya, rumusan langkah-langkah penelitian analisis data sekunder (Fondation, 2010) dapat dilihat pada gambar 1 berikut :

Gambar 1. Langkah-langkah dalam penelitian Analisis data Sekunder



Sumber : www.wallacefoundation.org, diunduh September 2023)

Berdasarkan pada Gambar 1 di atas, langkah-langkah penelitian data sekunder adalah sebagai berikut: (1) Menentukan (mencari-temukan) sumber data atau informasi (misalnya, jurnal penelitian, badan pusat statistik, data administrasi lembaga, internet, situs web resmi atau sosial media, dll.). Penelitian ini banyak mengambil sumber data dari berita online dan juga website resmi dari partai politik baru tersebut, selain itu juga mengambil data dari sosial media masing-masing partai tersebut, untuk melihat bagaimana aktivitas yang dilakukan dalam komunikasi digital untuk mendapatkan suara dan kepercayaan dari masyarakat sebagai partai baru ; (2) Mengumpulkan data yang sudah tersedia (dalam bentuk "dokumen"). Data yang dikumpulkan dijadikan satu subjek dalam penelitian terkait komunikasi digital yang dilakukan oleh partai politik baru ; (3) Menormalisasikan data jika diperlukan dan memungkinkan (misalnya, menggabungkan data dari berbagai sumber). Jika digabungkan beberapa data dilakukan jika adanya kemiripan informasi yang didapatkan dari sumber tersebut ; (4) Menganalisis data (misalnya menghitung, mentabulasi, memetakan data kuantitatif, atau membandingkan berbagai peraturan dan menelaahnya). Menganalisis dengan analisis deskriptif kualitatif yang dilakukan dari sumber yang telah dikumpulkan baik dari berita online, website resmi partai politik baru tersebut, dan sosial media yang dimilikinya. Untuk terakhir dilakukan penarikan kesimpulan setelah melakukan analisis mendalam.

Meskipun fleksibel dan dapat digunakan dalam berbagai cara, analisis data sekunder juga merupakan latihan empiris dengan langkah-langkah prosedural dan evaluatif, seperti halnya dalam mengumpulkan dan mengevaluasi data primer. Penelitian analisis data sekunder itu bisa dimulai dari pertanyaan penelitian, bisa dimulai dari menelaah data serempak dengan terusmenerus membuat pertanyaan penelitian.

Partai Politik Baru pada Pemilu 2024

Munculnya partai politik baru dalam kontestasi pemilu yang terjadi di Indonesia setiap lima tahun sekali merupakan salah satu konsekuensi dalam sistem demokrasi dalam suatu negara. Negara Indonesia yang menganut model multi partai dalam setiap pemilu memberikan kesempatan yang sama bagi masyarakat Indonesia yang hendak melakukan aktualisasi politik dengan berbagai pendekatan ideologi yang ada dalam bentuk partai politik. Selain itu juga didorong oleh perkembangan pola pikir masyarakat tentang pilihannya terutama partai politik yang akan terus berubah-ubah seiring pemilihan umum berlangsung (Barokah et al., 2022). Karena keadaan saat ini, akan mudah untuk membentuk *positioning* dan segmentasi partai politik baru.

Seperti yang sudah dijelaskan oleh Harmel dalam (Novitasari et al., 2019), Secara umum partai-partai baru ini muncul dalam tiga cara yang berbeda. Pertama, partai baru muncul sebagai konsekuensi penggabungan dua atau lebih partai yang didirikan. Kedua, partai-partai baru terbentuk sebagai akibat dari perpecahan internal. Ketiga, partai baru muncul sebagai partai yang benar-benar baru, tidak terkait dengan partai lain. Menurut (Marijan, 2010), kemunculan partai-partai baru selain dilatari dengan pluralistik dan majemuk masyarakatnya, juga karena didorong pertama, demokrasi merupakan kondisi yang masih dalam berproses. Sistem pemilu serta sistem kepartaian di Indonesia masih belum sepenuhnya baku dan masih mencari bentuk ideal. Kedua, belum adanya aturan yang ketat dalam pemilu (*electoral rules*), mengenai masuknya partai baru dalam pemilu, seperti aturan bagi partai-partai yang tidak lolos *threshold* atau ambang batas parlemen dan kemudian berubah wajah menjadi partai baru untuk bisa mengikuti pemilu berikutnya. Ketiga, suara pemilih belum terikat kuat dengan partai-partai yang sudah ada, sehingga masih memungkinkan pemilih untuk berpindah dan menemukan partai yang dianggap merepresentasi kepentingan pemilih.

Kemunculan partai politik baru bukan menjadi fenomena pertama kali sejak Era Reformasi. Setelah runtuh rezim otoriter pada tahun 1998, salah satu upaya untuk dapat menyambut rezim tersebut adalah dengan adanya pendirian partai politik (Hanafi, 2018). Munculnya partai politik merupakan aktualisasi dari beragamnya aliran atau pandangan politik yang melatarbelakanginya (Shofia & Alamsyafi, 2019). Dengan selalu bertambahnya partisipasi partai baru dalam setiap penyelenggaraan pemilu, terjadi kompetisi pemilu yang ketat karena partai bersaing untuk mendapatkan kepercayaan dan suara dari masyarakat.

Menjelang penyelenggaraan Pemilu tahun 2024 nanti, beberapa partai politik melakukan langkah persiapan dan menyusun strategi sebagai bentuk persiapan ikut serta

dalam Pemilu tersebut. Partai lama seperti PDIP, PKB, NasDem, Demokrat, Golkar, PAN, PPP, Gerindra, dan PKS adalah hanya beberapa partai politik yang telah lama dan sudah memiliki kursi di parlemen, selain itu pemilu 2024 juga akan melihat partisipasi partai baru yang mencoba mendapatkan suara dan duduk di parlemen. Partai Gelora, Partai Kebangkitan Nusantara (PKN), dan Partai Buruh adalah beberapa partai baru yang muncul dan mencoba mendapatkan suara dari masyarakat. Mereka tidak hanya akan bersaing dengan partai-partai lama yang telah menduduki parlemen, tetapi juga dengan partai-partai yang pada Pemilu 2019 tidak dapat menembus *parliamentary threshold* 4% di parlemen.

Beberapa partai politik baru yang akan mencoba bersaing dengan partai politik lainnya pada pemilu 2024 nanti dapat dilihat pada tabel 2 berikut ;

Tabel 2. Partai Poltik Baru pada Pemilu 2024

No. Urut	Partai Politik	Logo Partai	Profil Singkat
6	Partai Buruh		Partai ini resmi didirikan kembali pada tanggal 5 Oktober 2021. Jika dilihat sejarahnya ini bukan partai politik baru karena pada pemilu 1999 juga ikut berpartisipasi dengan nama Partai Buruh Nasional. Namun pada Pemilu 2014 dan 2019 tidka ikut serta dalam Pemilu. Partai ini kembali berkiprah dalam politik nasional melalui deklarasi hasil kongres yang digelar pada tanggal 4-5 Oktober 2021 di Jakarta dan resmi menjadi Partai Peserta Pemilu 2024. Ketua Umum Partai Buruh saat ini adalah Said Aqil.
7	Partai Gelombang rakyat Indonesia (Gelora)		Partai Gelora bermula dari Gerakan Arah Baru Indonesia (Garbi) yang didirikan oleh Anis Matta dan Fahri Hamzah. Garbi mendeklarasikan sebagai organisasi masyarakat (ormas) pada 14 Oktober 2018 di Sumatera Selatan. Ormas tersebut berkembang dengan hadirnya kader dan pengurus. Selanjutnya, mereka mendeklarasikan pendirian Partai Gelora Indonesia pada 28 Oktober 2019. Ketua Umum Partai Gelora saat ini adalah Anis Matta.
9	Partai Kebangkitan nasional (PKN)		Partai ini sebelumnya bernama Partai Karya Perjuangan yang terdaftar pada 2008 berdasarkan keputusan Menteri Hukum dan HAM RI. Partai itu kemudian dideklarasikan ulang dengan nama baru Partai Kebangkitan Nusantara (PKN) di Jakarta pada 28 Oktober 2021. Ideologi partai berlandaskan pada filosofi nasional resmi Indonesia. Ketua Umum dari Partai PKN ini adalah Anas Urbaningrum.

24	Partai Ummat		Pada tanggal 6 April 2022, Partai Ummat didirikan oleh Prof. H. Muhammad Amien Rais, M.A., Ph.D., setelah terjadi perpecahan di Partai Amanat Nasional (PAN) yang dipimpin sebelumnya oleh Amien Rais. Partai Ummat memiliki landasan ideologis yang berakar pada Islam Rahmatan Lil Alamin. Partai ini mengutamakan kaderisasi yang terbuka dan mandiri, serta berkomitmen untuk menerapkan nilai-nilai Al-Quran dan As-Sunnah dalam upaya menegakkan keadilan dan melawan kezaliman. Partai Ummat secara resmi didirikan pada tanggal 24 April 2021 dan mendapatkan legalitas pendiriannya melalui Surat Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia pada tanggal 20 Oktober 2021. Ketua umum partai UMMAT adalah Ridho Rahmadi.
----	--------------	---	--

Sumber : data diolah peneliti, 2023

Partai yang ada pada tabel 2 diatas merupakan Partai yang baru yang akan mengikuti pemilu tahun 2024 nanti, karena sebelumnya tahun 2019 belum mengikuti kontestasi pemilu yang ada di Indonesia. Jika dilihat dari sejarahnya, beberapa Partai diatas sebenarnya bukan murni partai politik baru yang ada di Indonesia. Karena beberapa partai tersebut merupakan perubahan dari partai-partai dulu yang pernah mengikuti pemilu namun tidak eksis lagi sehingga dilakukan beberapa perubahan nama hingga pengurus. Konflik dalam internal parpol menjadikan salah satu faktor lahirnya partai baru yang ada di Indonesia (Barokah et al., 2022). Hal tersebut dapat terlihat dari banyaknya tokoh-tokoh partai politik yang dulu eksis namun saat ini menjadi ketua umum partai politik yang baru dan akan mengikuti kontestasi pemilu 2024 nanti.

Jika kita melihat sejarah penyelenggaraan pemilu-pemilu sebelumnya, peluang Partai Baru untuk menembus parlemen terbilang cukup sulit. Pada pemilu tahun 2019 yang lalu, tidak ada satupun partai politik baru yang bisa melewati *parliamentary threshold* 4% dan memiliki kursi di parlemen. Pada pemilu 2024 nanti, melihat hasil survei dari Charta Politika dan Poltracking Indonesia, partai abru rata-rata hanya memiliki elektabilitas dibawah 1%. Artinya masih perlu upaya dan kerja keras agar Partai poltik baru ini mendapatkan suara dari masyarakat dan mendapatkan kursi di parlemen.

Komunikasi Politik Era Digital

Komunikasi politik adalah komponen penting dari proses demokrasi dan sangat bergantung padanya. Internet sebagai media baru telah membawa dampak dari praktik percakapan politik yang mencakup komunikasi yang dimediasi oleh dunia maya dan diskusi yang berlangsung di ruang nyata. Selain itu, Proses demokrasi membutuhkan forum untuk konfirmasi dan pertukaran informasi, wacana publik, diskusi, dan partisipasi warga negara dalam pengambilan keputusan politik. Karena pada hakekatnya Proses demokrasi sangat bergantung pada komunikasi politik (Lubis et al., 2022).

Sebagai contoh, dalam proses komunikasi politik di Indonesia, media seringkali dianggap sebagai ruang publik yang memberikan ruang bebas kepada publik untuk menyuarakan pendapatnya salah satunya adalah media digital. Media digital membuka ruang komunikasi dan partisipasi politik dengan meningkatkan kemungkinan interaksi antara elemen penting didalamnya yakni partai dan institusi negara yang disebut sebagai elite dan warga negara atau nonelite (Hia & Siahaan, 2021). Saat sekarang ini komunikasi massa merupakan sumber utama dari pesan-pesan politik yang dipertimbangkan menyusun strategi politik masing-masing partai atau actor politik. Dalam hal ini peran media digital merupakan bagian yang terpenting dalam merancang strategi untuk membangun kepercayaan dari masyarakat (Suryadi et al., 2021). Untuk itu perlunya merancang konsep yang matang dalam penyampaian pesan yang hendak disampaikan kepada masyarakat melalui media digital.

Secara substansi dalam komunikasi strategis, dalam tahap perencanaan diperlukan pencarian data awal atau melakukan riset menjadi dasar pertimbangan, untuk menentukan tahapan yang dilakukan supaya tujuan bisa tercapai (Laila et al., 2021). Dua elemen penting yang digunakan dalam tahapan perencanaan komunikasi strategis dalam merumuskan strategi pesan digunakan untuk mencapai tujuan tahapan ini. Faktor-faktor ini adalah: (1) tujuan apa yang harus dicapai, yang berarti ada banyak tujuan yang dapat dicapai melalui program kampanye; dan (2) daya tarik komunikator, yang dapat memikat dan mempengaruhi minat publik. Maka dari itu pesan komunikasi politik harus mudah diakses oleh publik karena solusi paling sederhana selalu dipilih dan tidak membutuhkan banyak sumber daya atau dana. Era digitalisasi saat sekarang ini mampu menjawab segala tantangan dan hambatan dalam berkomunikasi secara personal maupun komunikasi massa yang jumlahnya jauh lebih banyak (Blouquet et al., 2022).

Adanya Internet akan memudahkan dalam berkomunikasi langsung antara publik (citizen) dengan elite yang semula harus dimediasi oleh institusi pers. Masyarakat yang aktif menggunakan internet masuk dalam golongan masyarakat jaringan (*network society*) yang membangun jaringan antar tak terbatas yang tidak dapat disensor dengan mudah oleh sesama masyarakat lainnya (Hasfi, 2019). Jaringan itu bisa berupa jaringan informasi, jaringan warga sipil, jaringan perusahaan, dll. Seperti yang dijelaskan oleh (Vedel, 2003) bahwasanya ada keterkaitan tentang bagaimana *Information Communication Technology* (ICTs) dalam hal ini Internet memberikan efek pada komunikasi politik. Hal tersebut dapat dilihat dari table 3 berikut;

Tabel 3. Dampak ICT dalam proses Komunikasi Politik

Perangkat ICT	Keuntungan Potensial	Permasalahan
Murah	1) Mudah memproduksi Pesan 2) Pesan tidak terbatas untuk public (citizens)	Terlalu banyak informasi
Langsung (Sender Receiver)	Komunikasi Langsung	1) Riskan terjadi propaganda. 2) Kurangnya mediator yang bisa memainkan peran penting.
Penerima Terseleksi	1) Bisa Menarget Komunikasikan 2) Komunikasi kelompok khusus	Isu Privasi
Kecepatan	1) Mengupdate dengan cepat dan frekuentatif 2) Memperluas jangkauan pencarian informasi	1) Biaya system 2) Push button decisionmaking
Interaktif Terdesentralisasi	1) Interaksi langsung 2) Kemungkinan membuat sistem komunikasi yang independen	1) Isu Privasi 2) Ruang publik yang terfragmentasi 3) Regulasi yang sulit

Sumber: (Vedel, 2003) dalam (Hasfi, 2019)

Pada table 3 diatas menunjukkan bahwasanya adanya perkembangan teknologi dan juga perubahan era menjadi digitalisasi seperti saat sekarang ini memberikan perubahan yang cukup drastis dalam komunikasi politik yang ada. Karena dengan adanya internet dan era digital saat sekarang ini para actor politik dan juga partai politik mampu mengurangi biaya produksi kampanye yang dilakukannya. Karena dengan hanya membuat media social seperti *Facebook*, *Instagram*, *Aplikasi X* (dulu *Twitter*), dan *Tiktok* bisa menjadi media komunikasi yang cukup efektif dalam menjangkau masyarakat saat ini.

Sebagai partai politik baru, sudah saatnya melihat kondisi seperti ini, karena kontestasi pemilu 2024 ini sangat erat dengan pemanfaatan teknologi. Hal tersebut dikarenakan Sebagian besar masyarakat yang sebagai peserta pemilu adalah kelompok Millenial dan Gen Z, yang mana mereka adalah generasi yang sangat dekat dengan digitalisasi aktivitas kehidupan. Kampanye digital menjadi salah satu factor kunci dalam strategi mendapatkan perhatian masyarakat (Pérez-Castaños & Ruiloba-Núñez, 2023), karena sebagai partai baru masih perlu kerja keras dalam melakukan Branding dan menarik hati masyarakat.

Setiap partai politik memiliki cara dan model yang berbeda-beda dalam menjalankan komunikasi politiknya (Jumadi & Silviani, 2020), hal tersebut disesuaikan dengan sasaran kelompok masyarakat yang hendak didekatinya. Era saat sekarang ini menuntut setiap partai politik, tidak hanya partai politik baru saja untuk mampu beradaptasi dengan pola komunikasi yang baru. Komunikasi politik era digital menjadi salah satu solusi atas kejenuhan masyarakat dengan model atau pola komunikasi yang lama. Peran internet dan social media menjadi sangat sentral sebagai salah satu sarana bagi masing-masing partai menjalankan fungsi komunikasi politik yang ada.

Kesimpulan

Kontestasi Pemilu di Indonesia tahun 2024 nanti akan menghadirkan beberapa partai baru yang akan ikut berpartisipasi. Beberapa Partai Baru tersebut adalah Partai Buruh, Partai Gelombang rakyat Indonesia (Gelora), Partai Kebangkita Nasional (PKN) dan Partai Ummat. Total ada empat Partai Politik baru yang akan mengikuti pemilu tahun 2024 nanti, meskipun pada kenyataannya untuk tokoh dan actor dari partai baru tersebut sudah tidak asing lagi dalam kontestasi perpolitikan di Indonesia. Partai politik baru memiliki tugas yang lebih berat dari partai politik lainnya, dikarenakan harus membuat branding yang baik agar lebih dikenal dan masyarakat percaya akan eksistensi dari partai baru tersebut. Selain itu tantangan yang tidak kalah pentingnya adalah transformasi komunikasi politik di era digital seperti saat sekarang ini.

Partai Politik baru harus siap beradaptasi dengan perkembangan zaman saat sekarang ini. Model komunikasi di Era Digital menuntut semua pihak harus bisa mengambil peran dan memanfaatkan momentum menjelang penyelenggaraan Pemilu tahun 2024 nanti. Partai Politik Baru harus bisa memanfaatkan kondisi serba digital saat ini dalam menjalankan komunikasi politik. Hal tersebut dikarenakan karakter media baru ini sebagai sarana komunikasi politik, khususnya internet, menentukan perubahan dalam cara komunikasi politik. Ini mengubah komunikasi politik menjadi langsung, murah, cepat, interaktif, dan desentralisasi. Ini mengubah komunikasi politik yang sebelumnya satu arah menjadi dua arah, dari atas ke bawah, dan dari elit ke non-elitis. Transformasi komunikasi politik merupakan sebuah keniscayaan bagi partai politik baru yang akan mengikuti pemilu tahun 2024 nanti, karena ini adalah momen awal bagi partai baru untuk menjaga eksistensinya dalam kontestasi politik di Indonesia mendatang.

Daftar Pustaka

- Andrews, L., Higgins, A., Andrews, M. W., & Lalor, J. G. (2015). Classic Grounded Theory to Analyse Secondary Data: Reality and Reflections. *The Grounded Theory Review* (2012), 11(1), 11–26. <https://groundedtheoryreview.com/2012/06/01/classic-grounded-theory-to-analyse-secondary-data-reality-and-reflections/>
- Bachini, N., Rosa, K. C. G., Costa, A. L. V., & Silva, R. N. de F. (2022). Comunicação Política no Ambiente Digital: Uma Análise das Campanhas Eleitorais Municipais de 2020 no Facebook. *Opinião Pública*, 28(3), 750–786. <https://doi.org/10.1590/1807-01912022283750>
- Barokah, F., Maryanah, T., Darmastuti, A., & Hertanto, H. (2022). Disrupsi Politik: Peluang dan Tantangan Partai Politik Baru Jelang Pemilu 2024. *Nakhoda: Jurnal Ilmu Pemerintahan*, 21(1), 1–13. <https://doi.org/10.35967/njip.v21i1.273>
- Blouquet, C., Borucki, I., & Höhne, B. (2022). Digitalization in Candidate Selection Support and Resistance Within Established Political Parties in Germany. *Frontiers in Political Science*, 4, 1–14. <https://doi.org/10.3389/fpos.2022.815513>

- Budiardjo, M. (2008). *Dasar-Dasar Ilmu Politik*. Gramedia Pustaka Utama.
https://books.google.co.id/books?id=_dZ247rCydIC&printsec=frontcover&hl=id#v=onepage&q&f=false
- Cangara, H. (2016). *Komunikasi Politik Konsep Teori dan Strategi*. Rajawali Press.
<https://opac.perpusnas.go.id/DetailOpac.aspx?id=968657>
- Druzin, B. H., & Li, J. (2015). The Power of the Keystroke: Is Social Media the Radical Democratizing Force We've Been Led to Believe it is? *Harvard Human Rights Journal*, 305(2001), 1–6.
https://scholar.archive.org/work/4xexurd3jnc3fgxsga4fv6atdu/access/wayback/http://harvardhrj.com/wp-content/uploads/2015/02/Druzin_Li_HRJ_02-10-15.pdf
- Edge, T. (2010). Southern Strategy 2.0: Conservatives, White Voters, and the Election of Barack Obama. *Journal of Black Studies*, 40(3), 426–444.
<http://www.jstor.org/stable/40648600>
- Fondation, T. W. (2010). *Workbook B: Conducting Secondary Research*.
<https://www.wallacefoundation.org/knowledge-center/documents/workbook-b-secondary-research.pdf>
- Hanafi, R. I. (2018). Kemunculan Dan Tantangan Partai Politik Baru Pada Pemilu 2019. *Jurnal Penelitian Politik*, 15(02). <https://doi.org/https://doi.org/10.14203/jpp.v15i2.761>
- Hasfi, N. (2019). Komunikasi Politik di Era Digital. *POLITIKA: Jurnal Ilmu Politik*, 10(1), 93–111. <https://doi.org/10.14710/politika.10.1.2019.93-111>
- Heaton, J. (2011). *Reworking Qualitative Data*. SAGE Publications Ltd.
<https://doi.org/https://doi.org/10.4135/9781849209878>
- Hia, E. fransiska, & Siahaan, C. (2021). Komunikasi Politik di Era Digital. *HUMANITECH: Jurnal Ilmiah Humatitech*, 1(1), 6–18. <https://doi.org/10.14710/politika.10.1.2019.93-111>
- Jumadi, H., & Silviani, I. (2020). Peranan Komunikasi Politik Partai Keadilan Sejahtera dalam Mempertahankan Kepercayaan Publik di Daerah Pilihan III Kota Medan. *Jurnal Ilmiah Ilmu Komunikasi*, 5(1), 44–61.
<http://jurnal.darmaagung.ac.id/index.php/socialopinion/article/view/580>
- Khamis, S. (2013). “Cyberactivism” in the Arab Spring: what social media can and cannot do. *International Affairs Forum*, 4, 104–106.
<https://doi.org/10.1080/23258020.2013.824258>
- Laila, A. F., Muslimin, K., & Hakim, L. (2021). Taktik Komunikasi Politik Partai Nasdem dalam Memenangkan Pemilu Legislatif 2019. *Journal of Communication Studies*, 1(2), 137–153. <https://doi.org/10.37680/jcs.v1i2.1149>
- Lubis, I. A. R., Ramdan, A. T. M., & Wiryany, D. (2022). Politik Digital: Manifestasi Komunikasi di Era Digital. *Jurnal Lensa Mutiara Komunikasi*, 6(1), 193–206.
<https://doi.org/10.51544/jlmk.v6i1.3064>
- Marijan, K. (2010). *Sistem Politik Indonesia: Konsolidasi Demokrasi Pasca-Orde Baru* (Ed.1, Cet.). Kencana Prenada Media Group.
<https://opac.perpusnas.go.id/DetailOpac.aspx?id=918041>
- Mikołajczyk, B., & Aptacy, J. (2023). Gendern in der Politik Weibliche Personenbezeich-

- nungen in Deutschen und Polnischen Partei-Tweets. *Central and Eastern European Online Library*, 33(1), 51–83. <https://doi.org/10.18778/2196-8403.2022.04>
- Mufti, M. (2012). *Teori-Teori Politik*. Pustaka Media.
https://scholar.google.co.id/citations?view_op=view_citation&hl=id&user=deTW3hwAAAAJ&citation_for_view=deTW3hwAAAAJ:u-x6o8ySG0sC
- Nofiard, F. (2022). Komunikasi Politik Digital di Indonesia. *Al-Hiwar : Jurnal Ilmu Dan Teknik Dakwah*, 10(2), 31–40. <https://doi.org/10.18592/al-hiwar.v10i2.7548>
- Novitasari, D., Rosihan, A., & Virgiana, B. (2019). Komunikasi Politik Partai Baru di Kabupaten Ogan Komering Ulu Tahun 2019. *Jurnal Ilmu Komunikasi Dan Bisnis*, 5(1), 96–109.
- Pérez-Castaños, S., & Ruiloba-Núñez, J. M. (2023). Once More, with Feeling! Digital Campaigns and Emotional Candidacies in X in Andalusia and Castilla y León. *Social Sciences*, 12(9), 1–16. <https://doi.org/10.3390/socsci12090504>
- Sari, A. M. (2023). *Partai Buruh: Sejarah, Visi Misi, dan Makna Logo*. Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara. <https://fahum.umsu.ac.id/partai-buruh-sejarah-visi-misi-dan-makna-logo/>
- Shofia, N., & Alamsyafi, M. Z. (2019). Eksistensi Partai Politik di Indonesia. *Mimbar Yustitia*, 3(1), 60–74. <http://e-jurnal.unisda.ac.id/index.php/mimbar/article/view/1854>
- Suryadi, K., Sukmayadi, V., & Anggraeni, N. S. (2021). Strategi Komunikasi Politik Digital Partai Politik Baru (Studi Kasus pada Partai Solidaritas Indonesia). In *MAKNA : Jurnal Kajian Komunikasi, Bahasa dan Budaya* (Vol. 8, Issue 1). Universitas Pendidikan Indonesia.
- Vedel, T. (2003). *Political Communication in New Era: Political Communication in The Edge of Internet (Chapter 3)*. Routledge.
<https://doi.org/https://doi.org/10.4324/9780203986592>

From State-Centric to Security Complexes: A Review of Regional Security Complex Theory in International Relations

Shafiullah Farzayee

Independence Reseacher - Kabul

farzayee.shafiullah1@gmail.com

DOI: 10.32699/resolusi.v6i2.4560

Submitted: 2023-09-27, Revised: 2023-12-25, Accepted: 2023-12-28

Abstract

Regional Security Complex Theory (RSCT) has gained prominence as a valuable framework for analyzing the complex interplay of security interactions within and across regions. This literature review comprehensively examines the theoretical underpinnings, historical development, applications, empirical validation, and future directions of RSCT. RSCT offers a holistic approach that transcends traditional state-centric perspectives, encompassing non-state actors, sub-regional dynamics, and geographical factors in shaping security landscapes. It has been successfully applied to analyze regional security complexes in diverse regions, including Europe, Asia, the Middle East, and Africa. Empirical studies have supported the validity of RSCT, but further rigorous testing is needed to refine the theory and enhance its predictive power. As the global security landscape evolves, RSCT remains an essential tool for understanding and anticipating the intricate dynamics of regional and global security challenges. This paper proposes that the future research should focus on refining RSCT's conceptual framework, exploring interactions between RSCs, examining the role of non-state actors and regional institutions, and integrating RSCT with other theoretical frameworks in international relations.

Keywords: regional security complex, security interdependence, power, international relations theory

Introduction

The concept of security in international relations has evolved to encompass a wide array of issues, including non-traditional security threats, power dynamics, environmental security, human security, and gendered perspectives. In the post-Cold War era, the understanding of security has expanded to include various risks such as pandemics, organized crime, global warming, failed states, terrorism, poverty, and nuclear proliferation (Aradau et al., 2008). This expansion reflects a shift from traditional state-centric security to a more comprehensive approach that considers non-traditional security threats (Yuan, 2022). Furthermore, the concept of security is closely linked to power structures within the international system, with dominant understandings and practices of international security normalizing specific social relations and reinforcing existing power structures (Pratt, 2013). This highlights the interconnectedness of security with broader social and political dynamics.

The traditional understanding of security, dominated by the United States and characterized by Realism and State-centrism, has been subject to reevaluation due to significant transformations in the international environment and world politics (Yuan, 2022). This reevaluation has led to the exploration of alternative concepts such as "comprehensive security," which seeks to reconstruct security in the context of international relations (Arifi, 2016). Additionally, the concept of security community has been proposed as a middle ground between different strands of international relations theory, bridging the gap between moral philosophy and security studies (Koschut, 2014).

In the context of international relations, security is not solely confined to military or state-centric concerns. It encompasses environmental security, human security, and gendered perspectives on security. The relationship between climate change and security has been a subject of exploration, with scholars suggesting that climate change constitutes a significant security issue (McDonald, 2018). Moreover, feminist perspectives have highlighted the gendered nature of security, emphasizing the marginalization of women in security studies and the interconnectedness of security with political economy and everyday livelihoods (O'Sullivan, 2020; Prügl & Joshi, 2021; Dora, 2021).

The evolving nature of security in international relations has also prompted a reexamination of theoretical traditions. While realism has traditionally dominated the study and practice of international relations, liberalism has made important contributions to the understanding of international security and the role of military power (Silverstone, 2021). This reflects the multidimensional nature of security, which encompasses not only military aspects but also political, economic, and social dimensions.

The traditional approaches to security studies, particularly state-centric and realist perspectives, have been subject to significant critique due to their limitations in addressing contemporary security challenges. These traditional approaches have been criticized for their narrow focus on state actors as the primary referent object of security, as well as their emphasis on military power and the use of force as the primary means of addressing security concerns Browning & McDonald (2011)Fusiek, 2020; Hama, 2017).

State-centric and realist perspectives have been faulted for their failure to adapt to the changing nature of security threats, particularly in the context of globalization and the increasing influence of non-state actors such as multinational corporations, non-governmental organizations, and international movements (Samier, 2019). The narrow focus on state actors has been deemed inadequate in addressing the complex

and interconnected nature of contemporary security challenges, which often transcend national borders and involve a multitude of actors (Hama, 2017; Samier, 2019).

Furthermore, the realist paradigm of national security, which has traditionally dominated the academic debate, has been criticized for promoting a military and state-centric approach to security, thereby neglecting non-traditional security threats such as environmental degradation, human insecurities, and societal vulnerabilities (Fusiek, 2020; Akinrinde et al., 2021). This narrow focus on military and state-centric approaches has been deemed insufficient in addressing the diverse and multifaceted nature of contemporary security challenges.

Additionally, traditional realists have been criticized for their resistance to broadening the security agenda, with concerns that widening the concept of security beyond traditional military concerns would lead to incoherence in both scholarship and state policy (Hameiri & Jones, 2012). This resistance to broadening the security agenda has been seen as a limitation in addressing non-traditional security threats and in recognizing the interconnectedness of security with broader social, economic, and environmental issues.

The Regional Security Complex Theory (RSCT) has significantly contributed to the analysis of regional security dynamics. RSCT provides a theoretical and conceptual framework for understanding the structure and dynamics of regional security, particularly in the post-Cold War era Buzan & Wæver (2003). It traces the history of each regional security complex back to its beginnings, offering a comprehensive understanding of the security dynamics within specific regions (Bell & Wolf, 2023). The theory emphasizes the interdependence between security and resource dynamics among actors within a regional conflict system, highlighting the links between conflicts in a regional context (Geburu et al., 2023). Furthermore, RSCT has been applied to various regional contexts, such as the Lake Chad region, the Persian Gulf, North America, and West Africa, demonstrating its versatility and applicability in diverse geopolitical settings (Kilroy et al., 2017; Bala & Tar, 2021; Mohee, 2023). The theory has also been utilized to analyze the impact of the Israeli-Iranian cyberwar on Arab regional security, highlighting its relevance in understanding contemporary security challenges, including cyber threats.

Moreover, RSCT has been instrumental in analyzing the security implications of geopolitical shifts, such as the China-Iran Comprehensive Strategic Partnership and the Indo-Pacific regional security architecture, providing insights into the evolving security dynamics and power relations within these regions (Manh, 2022; Maiangwa, 2016). Additionally, the theory has been used to assess the responses of regional

organizations, such as the Economic Community of West African States (ECOWAS), to emerging security threats, underscoring its utility in evaluating regional cooperation and security initiatives (Mohapatra, 2013).

The application of RSCT has extended beyond traditional security concerns to encompass non-traditional security issues, such as migration and its impact on the security of Central Asia, demonstrating the theory's adaptability to a wide range of security challenges (Sarwar & Siraj, 2021). Furthermore, RSCT has been utilized to analyze the complexities of regional peace processes, such as the Afghan peace process, shedding light on the intricate regional dynamics and the role of external actors in conflict resolution efforts. From this background, how has RSCT been applied to analyze regional security dynamics in different geopolitical contexts, and what insights have been gained from these applications?

Theoretical Foundations of RSCT

The Regional Security Complex Theory (RSCT) is underpinned by several key concepts and theoretical foundations that shape its analytical framework for understanding regional security dynamics. These concepts and foundations provide the theoretical basis for comprehending the structure, interactions, and security dynamics within regional security complexes.

One of the fundamental theoretical underpinnings of RSCT is the concept of security complexes, which emphasizes the interconnectedness of security relations among states within a specific region. This concept, as proposed by Buzan and Wæver (2003), highlights the radical diversity of security dynamics in different parts of the world and forms the basis for understanding how security is constructed and maintained within regional contexts.

Additionally, the theory draws on the concept of interdependence, both internal and external, as a fundamental aspect of regional security dynamics (Martens et al., 2011). This notion underscores the mutual reliance and interactions among states and actors within a regional security complex, shaping the security environment and influencing the dynamics of conflict and cooperation.

Moreover, RSCT incorporates the idea of securitization, which refers to the process through which certain issues or actors are constructed as existential security threats, thereby legitimizing extraordinary measures to address them (Doll, 2021). This concept is crucial for understanding how security issues are framed and addressed within regional contexts, shedding light on the dynamics of threat perception and response.

Furthermore, the theory is informed by the concept of regional cooperation and conflict complexes, which elucidates the patterns of cooperation and conflict within and between regional security complexes (Silve & Verdier, 2018). This concept provides insights into the contagion of conflicts and the potential for cooperation among states within a regional security complex.

The RSCT model also broadens the definition of security, redefining the security dilemma among historical rivals and highlighting prospects for enhancing cooperation and peace in the region. This expanded understanding of security encompasses non-traditional security issues and emphasizes the potential for regional cooperation to address multifaceted security challenges.

The role of security interdependence, securitization, and geographical clustering in shaping regional security complexes (RSCs) is a multifaceted and complex phenomenon that draws on various theoretical and empirical insights. The theoretical foundations of RSCT provide a framework for understanding the interplay of these factors in shaping regional security dynamics.

Firstly, security interdependence plays a crucial role in shaping RSCs by fostering complex security relationships among states within a specific region. The concept of security interdependence emphasizes the mutual reliance and interactions among states, leading to shared security concerns and cooperative security initiatives (Silve & Verdier, 2018). This interdependence is intensified within geographical clusters, where states are more deeply interconnected in terms of security and economic relations, leading to a distinct pattern of security interdependence within RSCs.

Secondly, securitization, as a key concept in RSCT, influences the dynamics of RSCs by framing certain issues or actors as existential security threats, thereby legitimizing extraordinary measures to address them. The process of securitization within RSCs shapes the security agenda and responses, contributing to the construction of regional security complexes and the delineation of security boundaries within specific geographical clusters.

Geographical clustering also plays a significant role in shaping RSCs by creating patterns of regionally based security clusters, where security and economic interdependence are markedly deeper among states within the clusters than those outside of them. Geographical proximity produces a distinct pattern of security interdependence and shapes the security dynamics within RSCs, influencing the formation of security alliances and the emergence of security dilemmas (Juma, 2022).

Furthermore, the geographical clustering of security dynamics within RSCs is influenced by the division of labor, economic agglomeration, and the concentration of security resources and capabilities within specific geographical clusters (Maskell, 2001). This concentration of security-related activities and resources contributes to the formation of distinct security clusters and the intensification of security interdependence within RSCs.

The distinction between securitizing and securitized actors in Regional Security Complexes (RSCs) is essential for understanding the dynamics of security within a specific region. The securitization process, as conceptualized in the Regional Security Complex Theory (RSCT), involves the identification of security threats and the authorization of extraordinary measures to address these threats. In this context, securitizing actors and securitized actors play distinct roles in shaping the security dynamics within RSCs.

Securitizing actors are those entities or actors that frame specific issues or actors as existential security threats, thereby seeking to legitimize extraordinary measures to address these threats. These actors have the agency to define what constitutes a security issue and to mobilize support for securitizing moves, thereby influencing the security agenda within a regional context. Securitizing actors may include states, regional organizations, or influential non-state actors that possess the power to shape the discourse and policies related to security within RSCs.

On the other hand, securitized actors are those entities or issues that are constructed as security threats through the securitization process. These actors or issues are portrayed as posing existential risks to the security of the region, leading to their treatment as exceptional and requiring urgent measures to address. Securitized actors may include minority groups, neighboring states, non-state actors, or specific policy areas that are securitized by the actions of securitizing actors within RSCs.

The distinction between securitizing and securitized actors is crucial for understanding the power dynamics, threat perceptions, and policy responses within RSCs. It sheds light on the processes through which security issues are constructed, the actors involved in shaping the security discourse, and the implications of securitization for regional stability and cooperation. By analyzing the roles of securitizing and securitized actors, scholars and policymakers can gain insights into the mechanisms through which security concerns are elevated to the level of existential threats and the impact of these processes on regional security dynamics.

Evolution and Development of RSCT

The Regional Security Complex Theory (RSCT) has undergone significant development since its inception by Barry Buzan and Ole Waever. The theory has evolved through refinement, expansion, and application to various regional contexts, contributing to its current advanced state.

The historical development of RSCT can be traced back to foundational works such as Buzan and Waever's "Regions and Powers" (2003), which laid the groundwork for understanding regional security dynamics in the post-Cold War era. This seminal work provided a comprehensive analysis of the structure and dynamics of regional security complexes, emphasizing the interdependence and power relations within specific regions Buzan & Wæver (2003).

The concept of securitization, a key component of RSCT, has been further developed and advanced through scholarly contributions such as "Words, Images, Enemies: Securitization and International Politics" by Williams (2003) and "Securitization and the Construction of Security" by McDonald (2008). These works have deepened the understanding of how issues are framed as security threats and the implications of securitization for regional security dynamics.

Ole Waever's contributions to the concept of securitization, as evidenced in "Securitization and Desecuritization" (1995), have played a pivotal role in advancing the theoretical foundations of RSCT. Waever's work has expanded the understanding of securitization processes and their impact on regional security complexes, contributing to the theory's development (Dümen, 2022).

The application of RSCT to various regional contexts has further advanced the theory, as seen in works such as "The impact of the Middle East and Gulf states' involvement on the Horn of Africa's peace and security: Applying regional security complex theory" by (Geburu et al., 2023). This application has demonstrated the versatility and adaptability of RSCT in analyzing security dynamics in diverse geopolitical settings (Geburu et al., 2023).

Moreover, the theoretical framework of RSCT has been integrated into broader discussions on securitization, as evidenced in works such as "Finding the Weakest Link in the Interdependent Security Chain Using the Analytic Hierarchy Process" by (Pan et al., 2015). This integration has contributed to the interdisciplinary relevance and applicability of RSCT in understanding security interdependence and complex security chains (Pan et al., 2015).

The Regional Security Complex Theory (RSCT) has made significant contributions to the study of regional security dynamics. One of its key contributions is the conceptualization of security interdependence within specific regions, emphasizing the interconnectedness of security relations among states. This has provided a nuanced understanding of the complex security dynamics and power relations within regional contexts (Buzan & Wæver, 2003).

Moreover, RSCT has contributed to the analysis of securitization processes, shedding light on how issues are framed as security threats and the implications of securitization for regional security dynamics. This has deepened the understanding of the construction of security boundaries and the impact of securitization on regional stability and cooperation (Buzan & Wæver, 2003).

Additionally, RSCT has been instrumental in analyzing the role of geographical clustering in shaping regional security complexes, highlighting the patterns of security

interdependence and the concentration of security resources within specific geographical clusters. This has provided insights into the distinct security dynamics within different regions and the implications for regional security architectures (Buzan & Wæver, 2003).

However, RSCT has also faced criticisms over time. One of the criticisms is the theory's limited applicability to non-traditional security challenges, such as environmental security and human security. Critics argue that RSCT's focus on state-centric security dynamics may overlook the broader range of security issues that affect regions, thereby limiting its explanatory power (Mabee, 2003).

Ongoing debates within RSCT revolve around the theory's adaptability to contemporary security challenges, including cyberwarfare, terrorism, and non-state actors. Scholars are exploring ways to integrate non-traditional security issues into the RSCT framework, aiming to broaden its applicability and relevance to current security dynamics (Mohee, 2023).

Furthermore, there is a debate regarding the role of regional organizations and sub-regional security cooperation within the RSCT framework. Scholars are examining the impact of regional organizations on security dynamics and the potential for enhanced cooperation to address regional security challenges, contributing to the ongoing refinement of RSCT (Kangdim et al., 2022).

Moreover, ongoing refinements within RSCT include efforts to incorporate historical and cultural factors into the analysis of regional security complexes. This involves examining the historical context of security interdependence and the impact of cultural dynamics on regional security architectures, contributing to a more comprehensive understanding of regional security dynamics (Juma, 2022).

RSCT has made significant contributions to the study of regional security dynamics, particularly in conceptualizing security interdependence, securitization processes, and geographical clustering. However, ongoing debates and refinements within RSCT are focused on enhancing its adaptability to contemporary security challenges, integrating non-traditional security issues, and incorporating historical and cultural factors into the analysis of regional security complexes.

Applications of RSCT to Various Regions

RSCT has been applied to diverse regions, including Europe, Asia, the Middle East, and Africa. The theory has been used to analyze various regional security issues, such as the impact of the Middle East and Gulf states' involvement on the Horn of Africa's peace and security (Gebru et al., 2023), the Boko Haram insurgency in Nigeria (Kangdim et al., 2022), and the security dynamics in Southeastern Europe (Málnásky, 2021). Additionally, RSCT has been employed to explain Vietnam's perception and response to the emerging Indo-Pacific regional security architecture (Manh, 2022). Furthermore, it has been used to analyze the

impact of the Israeli-Iranian cyberwar on Arab regional security, highlighting the operation of security dynamics at a regional level among certain groups of states (Mohee, 2023).

In Africa, RSCT has been applied to understand the continent's security dynamics, particularly in the context of regional security complexes, enmity, and amity among states (Solomon, 2015). It has also been used to analyze the Southern African Development Community's experience in security integration and the impact of small arms proliferation on national and regional security (Hammerstad, 2005). Moreover, RSCT has been employed to examine the East African Community's approach to regional integration and cooperation (Juma, 2022).

In Asia, RSCT has been utilized to explain the security dilemma and military competition in the Asia Pacific region, particularly in the context of China's rise and its impact on regional security dynamics (Liff & Ikenberry, 2014). It has also been applied to assess the role of the BRICS countries in Asian affairs and their potential contributions to regional security (Niu, 2015).

It seems that the theory has been widely used to analyze security dynamics in various regions. However, its application is not without challenges and limitations. Buzan and Wæver (2003) highlighted the radical diversity of security dynamics in different parts of the world, indicating that the theory's applicability may vary across regions. In the Middle East, for example, the involvement of non-Arab state actors and non-state actors has posed challenges to the application of RSCT in understanding security subcomplexes. Similarly, in the Eastern Mediterranean, the reliance on unilateral actions and limited quasi-alliances has complicated the application of RSCT to regional maritime security.

In Africa, the weakness of state institutions and the prevalence of small arms proliferation have presented challenges to the effective application of RSCT in understanding security integration and national/regional security implications. Additionally, the complexities of inter-state security arrangements and the functional-structural weaknesses of core state institutions have added layers of complexity to the application of RSCT in electoral management and non-traditional security contexts in the East African region.

In the context of the Indo-Pacific region, the quest for regional hegemony and the dependency of small nations on the regional hegemony of major powers have raised questions about the applicability of RSCT in understanding security dynamics. Furthermore, the geopolitical implications of the 2011 uprisings in the Arab Middle East have highlighted the limitations of RSCT in capturing the long-lasting changes in regional security dynamics.

Moreover, the theory's relevance in understanding the dynamics of proxy wars, such as the US-Iran proxy war in the Middle East, has been questioned due to the unprecedented characteristics of new phenomena that pose challenges to states within individual regional security complexes.

Empirical investigations dedicated to testing and validating the theoretical tenets of Regional Security Complex Theory (RSCT) have shed light on both the strengths and

weaknesses of the theory. These studies provide valuable insights into the applicability and limitations of RSCT in diverse regional contexts.

RSCT has demonstrated its utility in analyzing sub-regional security cooperation, as exemplified by its application to the Boko Haram insurgency in Nigeria (Kangdim et al., 2022). The theory has also been instrumental in measuring the impact of specific events, such as the Israeli-Iranian cyberwar, on regional security (Mohee, 2023), highlighting its relevance in understanding contemporary security dynamics.

Furthermore, RSCT has effectively been employed to analyze evolving security complexes and their implications, providing a framework for comprehending the changing nature of regional security dynamics (China-Iran Comprehensive Strategic Partnership: An Evolving New Security Complex and its Implications, 2023). Moreover, the theory has been successfully utilized to understand regional security sub-complexes, particularly in Southeastern Europe, offering a valuable perspective for examining interdependence within regional relations (Málnásky, 2021). Additionally, RSCT has proven useful in analyzing security pressures in the Indo-Pacific region, demonstrating its relevance in deciphering the complex security dynamics in the region (Manh, 2022).

While RSCT has exhibited strengths, empirical studies have also highlighted certain limitations. Some investigations may encounter challenges in operationalizing the theoretical propositions of RSCT, particularly when quantifying the intricate and multifaceted nature of regional security dynamics. Additionally, the theory's applicability may vary across different regional contexts, necessitating nuanced application based on specific regional dynamics and characteristics. Furthermore, RSCT may face limitations in capturing the full complexity of security interactions, particularly in regions with unique geopolitical and historical factors that may not fully align with the theory's propositions.

Future Directions of RSCT Research

Recent developments in international relations highlight several emerging trends and potential areas for further research within the framework of Regional Security Complex Theory (RSCT). Firstly, the increasing significance of cybersecurity demands exploration, investigating how cyber threats and digital technologies influence security dynamics within regional complexes. Secondly, the impact of environmental challenges, such as climate change, on regional security configurations requires thorough analysis to understand the evolving landscape. Additionally, the role of non-state actors, including transnational corporations and NGOs, in shaping regional security complexes presents a burgeoning area for investigation. Finally, the intersection of human security concerns and societal dynamics, such as migration and demographic changes, deserves attention as it influences the broader regional security discourse.

In refining the application of RSCT, incorporating innovative methodological approaches and theoretical extensions is paramount. Quantitative methods can be integrated

to analyze large-scale data, identifying patterns and assessing the impact of various factors on the stability or transformation of regional security relations. Agent-based modeling offers a dynamic simulation of individual actors within security complexes, capturing micro-level interactions that contribute to macro-level dynamics. Narrative analysis can be employed to dissect how discourses and narratives shape security identities within regions, shedding light on competing narratives and their influence on threat perceptions. A mixed-methods approach, combining qualitative and quantitative methods, provides a comprehensive understanding of the multi-dimensional aspects of regional security complexes.

To enhance the explanatory power of RSCT, integrating it with other theoretical frameworks in international relations is essential. Constructivism offers a valuable synergy by incorporating ideational factors, norms, and identities into the analysis of regional security complexes. Critical security studies perspectives can contribute insights into power relations, discourses of security, and the impact of global structures on regional security dynamics. A synthesis of RSCT with realist perspectives allows for a nuanced understanding of how state power and material capabilities interact with social constructions of security within regions. Furthermore, incorporating global governance theories helps explore the role of international institutions in shaping regional security complexes. Lastly, applying network theory to analyze the interconnectedness of states and non-state actors within regional security complexes offers insights into the structure and resilience of these regional security architectures.

By delving into these emerging trends, methodological approaches, and theoretical integrations, researchers can enrich the application of RSCT and advance our understanding of the complex dynamics within regional security in the contemporary international landscape. RSCT has also emerged as a valuable framework for analyzing the intricate dynamics of security interactions within and across regions. While RSCT has gained significant traction, there remains ample room for further research to refine the theory and deepen our understanding of regional security phenomena.

Conducting comparative analyses of different regional security complexes can provide valuable insights into the commonalities and distinctions within security dynamics, threat perceptions, and regional cooperation (Buzan, 2011). By examining how security interactions manifest differently across regions, researchers can gain a more nuanced understanding of the factors that shape regional security landscapes.

Investigating the responses of regional organizations to emerging and recurring security threats is crucial for understanding how regional institutions adapt to evolving security challenges (Barrinha, 2013). This research could assess the capacity of regional organizations to address new security challenges and the dynamics of cooperation and conflict within regional security complexes.

Delving into the diplomatic and geopolitical roles of states within regional security complexes, particularly in the context of the Indo-Pacific region, can provide valuable insights into the interplay of power and interests (Doll, 2021). Analyzing strategic partnerships,

regional cooperation initiatives, and power dynamics can shed light on the evolving security landscape in this dynamic region.

Exploring the intersection of new regionalism and security theory can offer new perspectives on the evolving nature of regional security complexes (Amable, 2022). By examining how new regionalism influences security dynamics, researchers can assess the relevance of RSCT in the context of changing regional integration processes and the emergence of new regional mechanisms.

Further research could focus on adapting RSCT to specific regional contexts and developing conceptual frameworks that enhance the theory's applicability (Kelly, 2007). This could involve refining the theoretical propositions of RSCT to better capture the complexities of security interactions in different regions, making it a more versatile tool for analyzing regional security dynamics.

Given the increasing importance of maritime security, research could delve into the expectations and realities of regional maritime security in regions like the Eastern Mediterranean (Parasasti et al., 2023). This could involve examining the impact of security challenges, expected gains, and regional cooperation initiatives on maritime security complexes.

Investigating the role of insulator states, such as Turkey, within regional security complexes can provide valuable insights into their unique geopolitical positions and influence on security dynamics (Maiangwa, 2016). By analyzing the position of insulator states at the intersection of different security complexes, researchers can understand how they shape regional security interactions.

Focusing on exploring the interactions between different regional security complexes, particularly in regions where security interdependencies exist, can advance our understanding of the interconnectedness of security dynamics (Malik et al., 2021). This research could shed light on cooperation and conflict dynamics across adjacent or overlapping regional security complexes.

These areas of research represent just a few of the many promising avenues for further exploration within RSCT. By delving into these topics, researchers can enhance our understanding of regional security dynamics and the applicability of RSCT in diverse regional contexts. As the global security landscape continues to evolve, RSCT will remain an invaluable tool for analyzing and anticipating the complex interplay of security interactions within and across regions.

Conclusion

Regional Security Complex Theory (RSCT) has emerged as a valuable framework for analyzing the intricate dynamics of security interactions within and across regions. It offers a

holistic approach that considers not only state-centric actors but also non-state actors, sub-regional dynamics, and the interplay of geographical factors in shaping security landscapes.

By adopting a comparative perspective, RSCT provides a means to identify commonalities and differences in security dynamics across diverse regions. It has been applied to analyze regional security complexes in Europe, Asia, the Middle East, and Africa, demonstrating its adaptability to varied geopolitical contexts. RSCT's empirical validity has been bolstered by a growing body of research that has tested and validated its theoretical propositions. However, more rigorous empirical testing is needed to further refine the theory and enhance its predictive power.

As the global security landscape continues to evolve, RSCT remains an indispensable tool for analyzing and anticipating the complex interplay of security interactions within and across regions. Its ability to capture the interconnectedness of security dynamics across different regions makes it particularly relevant in an era where security challenges often transcend traditional borders.

Future research in RSCT should focus on refining the theory's conceptual framework, exploring the interactions between regional security complexes, and examining the role of non-state actors and regional institutions in shaping security dynamics. Additionally, RSCT could be integrated with other theoretical frameworks in international relations to provide a more comprehensive understanding of global security issues.

Acknowledgement

This paper is an extended version of my master thesis at Renmin University of China under the supervision of Professor Li Qingsi. I would like to express my sincere gratitude for his guidance and support throughout my thesis research. I am also grateful to the anonymous reviewers for their valuable feedback.

Reference

- Akinrinde, O., Tar, U., Babalola, D., & Osuwa, A. (2021). Human insecurities in afrika, the politics of non-refoulement and the plights of the african refugees along mexican-american borders. *Studia Politica Slovaca*, 14(1), 3-11.
<https://doi.org/10.31577/sps.2021-1.1>
- Amable, D. (2022). Theorizing the emergence of security regions: an adaptation for the regional security complex theory. *Global Studies Quarterly*, 2(4).
<https://doi.org/10.1093/isagsq/ksac065>
- Aradau, C., Lobo-Guerrero, L., & Munster, R. (2008). Security, technologies of risk, and the political: guest editors' introduction. *Security Dialogue*, 39(2-3), 147-154.
<https://doi.org/10.1177/0967010608089159>

- Arifi, D. (2016). The concept of "comprehensive security" as a draft for reconstructing security in a system of international relations. *Iliria International Review*, 1(1), 21. <https://doi.org/10.21113/iir.v1i1.197>
- Bala, B. and Tar, U. (2021). Regional cooperation in west africa: counter-terrorism and counter-insurgency. *African Security*, 14(2), 186-207. <https://doi.org/10.1080/19392206.2021.1929747>
- Barrinha, A. (2013). The ambitious insulator: revisiting turkey's position in regional security complex theory. *Mediterranean Politics*, 19(2), 165-182. <https://doi.org/10.1080/13629395.2013.799353>
- Bell, A. and Wolf, D. (2023). Decoding negotiation systems in the middle east and north africa: a framework for analysis. *Negotiation Journal*, 39(1), 71-101. <https://doi.org/10.1111/nejo.12420>
- Browning, C. and McDonald, M. (2011). The future of critical security studies: ethics and the politics of security. *European Journal of International Relations*, 19(2), 235-255. <https://doi.org/10.1177/1354066111419538>
- Buzan, B. (2003). Regional security complex theory in the post-cold war world., 140-159. https://doi.org/10.1057/9781403938794_8
- Buzan, B. (2011). The south asian security complex in a decentring world order: reconsidering regions and powers ten years on. *International Studies*, 48(1), 1-19. <https://doi.org/10.1177/002088171204800101>
- Buzan, B. and Wæver, O. (2003). Regions and powers. <https://doi.org/10.1017/cbo9780511491252>
- Buzan, B., Wæver, O., & Wilde, d. (1998). Security: a new framework for analysis. *International Journal Canada S Journal of Global Policy Analysis*, 53(4), 798. <https://doi.org/10.2307/40203739>
- Doll, L. (2021). Missing cooperation in the eastern mediterranean. *Politikon Iapss Journal of Political Science*, 50, 6-48. <https://doi.org/10.22151/politikon.50.1>
- Dora, Z. (2021). Syrian crisis, migration, women and violence from perspective of feminist security studies. *Kafkas Üniversitesi İktisadi Ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi*, 12(24), 1218-1236. <https://doi.org/10.36543/kauibfd.2021.049>
- Dümen, H. (2022). Securitization and identity: the speech acts of bashar al-assad. *Opus Toplum Araştırmaları Dergisi*, 19(50), 824-837. <https://doi.org/10.26466/opusjsr.1171798>
- Fusiek, D. (2020). Rethinking security: the limits of the traditional concept of security in a world of non-traditional threats. *Hapsc Policy Briefs Series*, 1(2), 265. <https://doi.org/10.12681/hapscpbs.26500>
- Gebru, M., Zeru, G., & Tekalign, Y. (2023). The impact of the middle east and gulf states' involvement on the horn of africa's peace and security: applying regional security complex theory. *Digest of Middle East Studies*, 32(3), 223-245. <https://doi.org/10.1111/dome.12301>
- Hama, H. (2017). State security, societal security, and human security. *Jadavpur Journal of International Relations*, 21(1), 1-19. <https://doi.org/10.1177/0973598417706591>

- Hameiri, S. and Jones, L. (2012). The politics and governance of non-traditional security1. *International Studies Quarterly*, 57(3), 462-473. <https://doi.org/10.1111/isqu.12014>
- Hammerstad, A. (2005). Domestic threats, regional solutions? the challenge of security integration in southern africa. *Review of International Studies*, 31(1), 69-87. <https://doi.org/10.1017/s0260210505006303>
- Juma, T. (2022). Amity and enmity in regional integration; the east african community (eac) experience. *International Journal of World Policy and Development Studies*, (82), 57-65. <https://doi.org/10.32861/ijwpds.82.57.65>
- Kangdim, D., YORGANCIOĞLU, C., Bulus, K., Muazu, A., & Danladi, S. (2022). The impact of the boko haram insurgency in nigeria: a multi sectoral analy. *Siyasal Journal Political Sciences*, 31(1), 157-172. <https://doi.org/10.26650/siyasal.2022.31.1054025>
- Kelly, R. (2007). Security theory in the "new regionalism". *International Studies Review*, 9(2), 197-229. <https://doi.org/10.1111/j.1468-2486.2007.00671.x>
- Kilroy, R., Sumano, A., & Hataley, T. (2017). Security inequalities in north america: reassessing regional security complex theory. *Journal of Strategic Security*, 10(4), 1-28. <https://doi.org/10.5038/1944-0472.10.4.1613>
- Koschut, S. (2014). Regional order and peaceful change: security communities as a via media in international relations theory. *Cooperation and Conflict*, 49(4), 519-535. <https://doi.org/10.1177/0010836713517570>
- Liff, A. and Ikenberry, G. (2014). Racing toward tragedy?: china's rise, military competition in the asia pacific, and the security dilemma. *International Security*, 39(2), 52-91. https://doi.org/10.1162/isec_a_00176
- Mabee, B. (2003). Security studies and the 'security state': security provision in historical context. *International Relations*, 17(2), 135-151. <https://doi.org/10.1177/00471178030172002>
- Maiangwa, B. (2016). Assessing the responses of the economic community of west african states to the recurring and emerging security threats in west africa. *Journal of Asian and African Studies*, 52(1), 103-120. <https://doi.org/10.1177/0021909615570951>
- Malik, S., Rich, E., Viswanathan, R., Cairns, B., & Fischer, C. (2011). Allosteric interactions of dna and nucleotides with s. cerevisiae rsc. *Biochemistry*, 50(37), 7881-7890. <https://doi.org/10.1021/bi200837b>
- Málnácssy, A. (2021). Turkey and its northwest borderland region: interdependence within southeastern european relations. *Foreign Policy Review*, 14(3), 85-111. <https://doi.org/10.47706/kkifpr.2021.3.85-111>
- Manh, L. (2022). Vietnam's perception and response to the emerging indo-pacific regional security architecture. *Ilomata International Journal of Social Science*, 3(1), 356-368. <https://doi.org/10.52728/ijss.v3i1.397>
- Martens, B., Crum, M., & Poist, R. (2011). Examining antecedents to supply chain security effectiveness: an exploratory study. *Journal of Business Logistics*, 32(2), 153-166. <https://doi.org/10.1111/j.2158-1592.2011.01013.x>
- Maskell, P. (2001). Towards a knowledge-based theory of the geographical cluster. *Industrial and Corporate Change*, 10(4), 921-943. <https://doi.org/10.1093/icc/10.4.921>

- McDonald, M. (2008). Securitization and the construction of security. *European Journal of International Relations*, 14(4), 563-587. <https://doi.org/10.1177/1354066108097553>
- Mohapatra, N. (2013). Migration and its impact on security of central asia. *India Quarterly a Journal of International Affairs*, 69(2), 133-157. <https://doi.org/10.1177/0974928413481883>
- Mohee, A. (2023). The impact of the israeli-iranian cyberwar on arab regional security. <https://doi.org/10.33774/apsa-2023-1vd97>
- Niu, H. (2015). Is there a role for the brics in asian affairs. *International Organisations Research Journal*, 10(2), 196-205. <https://doi.org/10.17323/1996-7845-2015-02-196>
- O'Sullivan, M. (2020). The forgotten lives: connecting gender, security, and everyday livelihoods in ukraine's conflict. *Politics & Gender*, 16(3). <https://doi.org/10.1017/s1743923x20000343>
- Pan, C., Wang, Z., & Mei, S. (2015). Finding the weakest link in the interdependent security chain using the analytic hierarchy process. *Journal of Advances in Computer Networks*, 3(4), 320-325. <https://doi.org/10.18178/jacn.2015.3.4.190>
- Parasasti, M., Warka, I., & Adriyanto, A. (2023). The urgency of the diplomatic role of the indonesian navy in supporting security stability in the indo-pacific region. *Aurelia Jurnal Penelitian Dan Pengabdian Masyarakat Indonesia*, 2(1), 321-328. <https://doi.org/10.57235/aurelia.v2i1.301>
- Pratt, N. (2013). Reconceptualizing gender, reinscribing racial-sexual boundaries in international security: the case of un security council resolution 1325 on "women, peace and security"1. *International Studies Quarterly*, 57(4), 772-783. <https://doi.org/10.1111/isqu.12032>
- Prügl, E. and Joshi, S. (2021). Productive farmers and vulnerable food securers: contradictions of gender expertise in international food security discourse. *The Journal of Peasant Studies*, 48(7), 1439-1458. <https://doi.org/10.1080/03066150.2021.1964475>
- Ruohonen, J. and Kimppa, K. (2019). Updating the wassenaar debate once again: surveillance, intrusion software, and ambiguity. *Journal of Information Technology & Politics*, 16(2), 169-186. <https://doi.org/10.1080/19331681.2019.1616646>
- Samier, E. (2019). Toward a postcolonial securities critique of higher education leadership: globalization as a recolonization in developing countries like the uae. *International Journal of Leadership in Education*, 23(6), 635-654. <https://doi.org/10.1080/13603124.2019.1591514>
- Sarwar, F. and Siraj, U. (2021). Afghan peace process: regional complexities and the role of china. *Nust Journal of International Peace and Stability*, 40-52. <https://doi.org/10.37540/njips.v4i1.78>
- Silve, A. and Verdier, T. (2018). A theory of regional conflict complexes. *Journal of Development Economics*, 133, 434-447. <https://doi.org/10.1016/j.jdeveco.2018.03.002>
- Silverstone, S. (2021). Liberal international relations theory and the military., 1-18. https://doi.org/10.1007/978-3-030-02866-4_104-1

- Solomon, H. (2015). African solutions to africa's problems? african approaches to peace, security and stability. *Scientia Militaria South African Journal of Military Studies*, 43(1). <https://doi.org/10.5787/43-1-1109>
- Williams, M. (2003). Words, images, enemies: securitization and international politics. *International Studies Quarterly*, 47(4), 511-531. <https://doi.org/10.1046/j.0020-8833.2003.00277.x>
- Xheladini, F. (2016). Regional security complex: the macedonian context. *European Journal of Multidisciplinary Studies*, 3(1), 34. <https://doi.org/10.26417/ejms.v3i1.p34-37>
- Yuan, Y. (2022). Biosecurity and human security in the post-pandemic era: from the perspective of the welsh school. *Studies in Social Science & Humanities*, 1(4), 19-26. <https://doi.org/10.56397/sssh.2022.11.03>

RESOLUSI is a scientific journal in the field of Social and Political Sciences managed by the Department of Political Science, Universitas Sains Al-Qur'an. This journal is published twice a year in June and December.

The focus topics include (but are not limited to): politics of development, elections, political communication, governance, administration and public policy, social conflict, political education, legal politics, international politics, global issues, Islam and politics, & identity politics.

This journal provides open and free access to the public. Anyone can directly access the journal content. This policy is based on principles to support broad knowledge exchange.

***RESOLUSI** adalah sebuah jurnal ilmiah dalam bidang Ilmu Sosial dan Politik yang dikelola oleh Program Studi Ilmu Politik Universitas Sains Al-Qur'an Jawa Tengah di Wonosobo. Jurnal ini diterbitkan setahun dua kali pada bulan Juni dan Desember.*

Fokus topik tulisan pada Jurnal Revolusi termasuk (namun tidak terbatas pada): politik, pemilu, komunikasi politik, pemerintahan, administrasi dan kebijakan public, konflik social, pendidikan politik, politik hukum, politik internasional, isu-isu global, islam dan politik, & politik identitas.

Jurnal ini menyediakan akses terbuka dan bebas kepada publik. Siapapun dapat langsung mengakses konten jurnal. Kebijakan ini didasarkan pada prinsip untuk mendukung pertukaran pengetahuan secara luas.

Editor in Chief:

Ahmad Anwar - Corvinus University of Budapest, Hungary

Editorial Board:

Dwian Hartomi Akta Padma Eldo (Universitas Sains Al-Qur'an, Indonesia), Reza Triarda (Universitas Brawijaya, Indonesia), & Muflih Fahmi Kaunain (Universitas Sains Al-Qur'an, Indonesia)

Reviewer:

Bayu Setyawan (Universitas Kristen Palangkaraya, Indonesia), Ehtiman Nuralizade (University of Public Service, Hungary), Irwan Abdu Nugraha (Universitas Sains Al-Qur'an, Indonesia), Md Niamot Ali (Florida Atlantic University, USA), Dian Trianita Lestari (Universitas Halu Oleo, Indonesia), Asmaji Muchtar (Universitas Sains Al-Qur'an, Indonesia), Raden Imam Al Hafis (Universitas Islam Riau, Indonesia), Muhammad Noor Ifansyah (Sekolah Tinggi Ilmu Administrasi Tabalong, Indonesia), Dwi Ardiyanti (Universitas Darussalam Gontor, Indonesia), Fadlan Muzakki (Zhejiang University, China), & Donie Kadewardana (Corvinus University of Budapest, Hungary)

Language Advisor:

Afif Suaiddi (Universitas Islam Negeri Sultan Maulana Hasanuddin Banten, Indonesia)

Technical Support:

Mahmudi (Universitas Sains Al-Qur'an, Indonesia) & Etis Egita (Universitas Sains Al-Qur'an, Indonesia)

**DEPARTMENT OF POLITICAL SCIENCE
UNIVERSITAS SAINS AL-QUR'AN**

FKSP Building - 2nd floor, Jl KH. Hasyim Asy'ari Km. 3 Kalibebber
Wonosobo, Central Java - Indonesia 56351

Website: ojs.unsiq.ac.id/index.php/resolusi

ISSN 2621-5764

